

syahrir kila

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

**Kajian Perjuangan
I Benni Arung Data Melawan Belanda**

**Editor
Edward L. Poelinggomang**

**KETEGUHAN DALAM
MENEGAKAN SIRI'**
Kajian Perjuangan
I Benni Arung Data Melawan Belanda

Syahrir Kila

Editor
Edward L. Poelinggomang

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
2012

KETEGUHAN DALAM MENEGAKAN SIRI'
Kajian Perjuangan I Benni Arung Data Melawan Belanda

Penulis

Syahrir Kila

Editor

Edward L. Poelinggomang

Desain Sampul/Layout

Welsy Andries/Monita

Cetakan Pertama 2012

Penerbit

de La Macca

(Anggota IKAPI Sulawesi Selatan)

Jalan Borong Raya No. 75 a Makassar

telp.0411 - 2410294 - 0811468957 - 08114124721

email : de.lamacca@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang - Undang.

Dilarang mengutip isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan Penerbit.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

185 + iv halaman

ISBN No. 978 979 3897 60 8

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
Kerja Sama
Penerbit De Lamacca

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Penerbit	ii
Pengantar Penulis	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Bone Selayang Pandang	15
A. Awal Sejarah	15
B. Masa Pemerintahan Raja Berikutnya	22
C. Konflik Dengan Kerajaan Gowa	29
D. Terbentuknya Hadat Tujuh	48
Bab III Benih-Benih Permusuhan	55
A. Hubungan Bone-Belanda Pasca Perjanjian Bongaya	55
B. Hubungan Bone-Belanda Pasca Kematian ArungPalaka	78
C. Dari Belanda Ke Inggris	100
Bab IV Perlawanan Kerajaan Bone	123
A. Pembaharuan Kontrak Bongaya	123
B. Agresi Militer Belanda	141
a. Serangan Ke Suppa dan Tanate	141
b. Serangan Ke Bone	148
C. Akhir Perlawanan	161
Bab V Penutup	171
A. Kesimpulan dan Saran	171
Daftar Pustaka	183

PENGANTAR PENERBIT

De Lamacca, sebagai lembaga penerbitan anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sejak tahun 2000, telah banyak menerbitkan buku-buku kearifan lokal yang ditulis oleh penulis di nusantara, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesempatan ini kami berbangga dapat menerbitkan **Buku KETEGUHAN DALAM MENEGAKAN SIRI', Kajian Perjuangan I Benni Arung Data Melawan Belanda**. Penulis **Syahrir Kila**. Dengan terbitnya buku ini, tak dapat dipungkiri, bahwa telah memperkaya khasanah kearifan lokal di Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk itu pada kesempatan ini, penerbit de lamacca mengucapkan terimakasih kepada **Syahrir Kila** sebagai penulis, khususnya kepada **Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar** yang telah mempercayakan penerbitan buku ini. Semoga kepercayaan semacam ini dapat terus terbina hingga di masa-masa datang.

Buku KETEGUHAN DALAM MENEGAKAN SIRI', Kajian Perjuangan I Benni Arung Data Melawan Belanda. ini sudah berada di tangan pembaca yang budiman, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

De Lamacca

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat dan hidayat-Nya, kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan pikiran yang jernih untuk selalu menghargai setiap karya yang dibuat oleh ummat manusia yang berilmu dan beriman.

Dalam catatan sejarah, terdapat betapa banyak kerajaan-kerajaan yang pernah eksis dan berdiri di daerah ini sebagai cikal bakal adanya pemerintahan. Namun, beberapa dari kerajaan tersebut kurang diketahui keberadaannya, terutama sepaik terjang dari para rajanya oleh masyarakat karena data yang menyebutkan hal itu masih sangat kurang yang diteliti dan ditulis.

Menurut hemat saya, dari sejumlah keterangan yang disampaikan dan diungkapkan dalam buku ini, belumlah menghimpun seluruh jejak masa lampau para raja dari seluruh kerajaan di daerah ini. Selain karena keterbatasan halaman, mungkin juga karena kemampuan dalam mengumpulkan bahan yang autentik. Apalagi jika dikandung maksud untuk menelusuri mulai dari awal sejarah hingga memasuki zaman kemerdekaan, atau pada zaman kerajaan hingga masa Perang Kemerdekaan.

Namun sebagai suatu upaya untuk mengungkapkan keberadaan para raja dari kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini, dimaksudkan agar dapat menjadi bahan bacaan yang mampu memberikan pewarisan nilai kesejarahan. Bahkan saya

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

menghimbau dan mengajak semua pihak untuk membacanya, sekaligus disebarluaskan utamanya di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pendidik.

Keberadaan buku bacaan yang bermuatan nilai-nilai budaya dan sejarah, bukan hanya akan semakin memperkaya wawasan masyarakat di daerah tersebut, tetapi juga untuk menambah bahan bacaan yang terasa masih sangat kurang sekarang ini. Bahkan dengan terbitnya buku ini, diharapkan akan semakin memperkaya informasi tentang dinamika kesejarahan utamanya sejarah kerajaan di Sulawesi Selatan dalam diorama sejarah Nasional Indonesia.

Buku ini tidak akan pernah terwujud seperti sekarang ini, tanpa adanya dorongan dan bantuan serta kebaik hati dari semua pihak, baik sebagai instansi maupun sebagai pribadi. Terutama kepada ibu Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan serta arahnya kepada penulis, mulai dari tahap awal hingga terwujudnya laporan penelitian ini, kepada beliau saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Tanpa bantuan dan dorongan beliau, pastilah buku ini tidak akan pernah terwujud.

Akhirnya, saya menyampaikan terima pula kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Harapan saya, penerbitan seperti ini harus terus ditingkatkan dan buku ini dapat menjadi sumbangan yang berharga dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Makasar, November 2012

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian Bungaya yang ditanda tangani antara Kerajaan Gowa dan Belanda pada tanggal 18 November 1666, adalah sebagai pertanda Perang Makassar 1667-1667 telah usai. Pihak Gowa dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus mengakui keunggulan Belanda yang dibantu oleh Arung Palakka. Sekalipun isi perjanjian itu sangat menekan pihak Gowa, namun harus diterima karena tidak ada jalan lain sebab kondisi yang semakin memburuk. Kendatipun demikian, sebenarnya pihak Belanda (Speelman) menyadari sepenuhnya bahwa pihak Kerajaan Gowa sebenarnya tidak tunduk sepenuhnya pada isi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Oleh karena itu, maka antara 1668-1669 terjadi kembali peperangan lanjutan antara keduanya, dan yang menjadi tokoh kunci dalam peperangan itu adalah Karaeng Karunrung yang sejak semula tidak menyetujui ditanda tangannya perjanjian Bu-ngaya. Dalam peperangan ini disebutkan bahwa banyak sekali korban yang berjatuh dari kedua belah pihak, termasuk Arung Palakka sendiri menderita luka-luka. Perang lanjutan ini akhirnya ditutup dengan suatu perjanjian yang ditandatangani Sultan Hasanuddin dan Karaeng Karunrung yang dibubuhi segel.¹ Dengan demikian, perang besar yang bertahun-tahun

¹ Daeng Patunru, 1969, *Sejarah Gowa*, Makassar : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Dan Tenggara, hlm.62. Pada waktu itu, juga anggota-anggota

lamanya telah terjadi akhirnya usai dan babak baru bagi Belanda di Sulawesi Selatan untuk menanamkan penjajahannya yang sungguh-sungguh. Sebaliknya Kerajaan Gowa berada dibalik kehancurannya. Organisasi dan struktur kenegaraan Makassar dirombak secara sistematis oleh Kolo-nial Belanda.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai strategi dari Speelman, adalah menata ulang perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di Sulawesi Selatan, dan membagi dua kelompok seperti yang tercantum dalam salah satu isi Perjanjian Bungaya. Kelompok pertama adalah kerajaan yang berada di bawah kepemimpinan Arung Palakka (Bone, Soppeng, Binamu, Bangkala dan Laikang), mereka tersebut adalah merupakan sekutu utama Arung Palakka pada saat Perang Makassar terjadi. Sementara kelompok kedua adalah kerajaan-kerajaan yang membantu Kerajaan Gowa pada waktu Perang Makassar terjadi, antara lain ; Mandar, Luwu, Wajo, Sidenreng, Agangnionjo, Mallusetasi, Suppa, Sawitto, Enrekang dan Toraja. Dalam hubungan itu, Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa ditempatkan sebagai sekutu tertua. Sebenarnya strategi ini adalah untuk membenturkan antara keduanya dalam hal untuk mendapat pengaruh di Sulawesi Selatan. Dan jika hal itu terjadi maka Belandalah yang akan tampil sebagai penengah sekaligus perantara dan pelindung.²

majelis Pemerintahan Gowa terpaksa menandatangani perjanjian sebagaimana yang telah ditandatangani beberapa hari lebih dahulu oleh Raja Tallo dan Karaeng Lengkese. Surat Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1669 oleh Sultan Hasanuddin dan I Mappasomba tidak hadir, entah karena kebetulan sakit, ataukah memang sengaja tidak mau hadir. Karaeng Karunrung juga terpaksa menanda-tangani perjanjian itu

² Poelinggomang. dkk, 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*, Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, hlm.131. Sehubungan dengan pengaturan kelompok politik itu, diatur pula mereka yang sebelumnya telah menjalin hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari kelompok yang berbeda. Hal itu diatur sebagai berikut;

Sementara itu, Kerajaan Bone di bawah kepemimpinan Arung Palakka, mendapat perlakuan khusus dari Belanda untuk dapat memperluas pengaruh kekuasaannya terhadap kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Di samping itu, mendapat kepercayaan bahwa apabila ada raja atau pembesar kerajaan yang ingin menghadap kepada pemerintah Belanda di benteng Ujung Pandang, maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Kerajaan Bone. Aturan inilah yang selanjutnya selalu ingin dipertahankan oleh pihak Kerajaan Bone pascakematian Arung Palakka, agar Bone tetap menjadi sekutu utama dan terpenting bagi Belanda. Memang diakui bahwa pasca perjanjian Bungaya, hubungan antara Arung Palakka dengan Belanda, tidak selalu berjalan mulus, namun memang tidak ada peperangan yang terjadi antara keduanya.

Dengan berkuasanya Belanda di Sulawesi Selatan, turut pula menentukan atau ikut campur dalam hal kenegaraan kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan karena secara nyata Belanda telah memiliki supremasi kekuasaan dan telah menjadi pemegang kendali politik. Berdasarkan isi perjanjian Bungaya, maka seluruh wilayah pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa harus dilepaskan dan menjadi wilayah kekuasaan langsung Kompeni Belanda yang disebut *Gouvernement van Makassar* (Pemerintahan Makassar). Kemudian pemerintahan Makassar ini dibagi menjadi empat bagian pengawasan. Daerah-daerah kekuasaan langsung tersebut, dimana Belanda tidak mencampuri urusan pemerintahan dan menempatkan

(1) bagi mereka yang telah menikah dapat melakukan perceraian atau (2) keluarga itu dapat menghubungi pimpinan kelompok politik untuk meminta izin menetap dan menjadi anggota dari kelompok politik yang memberi izin menetap di negerinya. Hal ini menunjukkan bahwa politik Kompeni berusaha memisahkan dua kelompok itu dengan tegas dan menempatkan masing-masing pihak sebagai lawan bagi pihak lainnya. Pengaruh itu masih dirasakan hingga kini dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan.

kembali penguasa-penguasa lokal untuk tampil menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing dengan catatan harus mengakui Kompeni Belanda sebagai penguasa tertinggi mereka.

Pada masa kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan, banyak sekali terjadi gerakan perlawanan untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa pada masa itu. Gerakan penentangan dilakukan dengan berbagai cara dan kedok terutama oleh Kerajaan Gowa. Di antara gerakan itu adalah Gerakan Refatriasi Syeh Yusuf, yaitu suatu gerakan yang dilakukan untuk mengembalikan Syeh Yusuf ke Tanah Makassar supaya bisa tampil memimpin Kerajaan Gowa. Gerakan ini gagal karena Belanda sudah menduga bahwa Refatriasi Syeh Yusuf ke Tanah Makassar adalah sebenarnya taktik untuk melawan kekuasaannya. Gerakan ini mendapat dukungan dari istana yaitu Raja Gowa Sultan Abdul Jalil dan isteri Arung Palakka sendiri yaitu Daeng Talele.³ Selain gerakan itu, terdapat pula gerakan Batara Gowa I Sangkilang dan gerakan Karaeng Bontolangkaserta La Maddukelleng.

Ketika pemerintah Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan mulai terdesak kedudukannya, sebaliknya Inggeris sudah mulai kuat pengaruhnya di Eropa dan dunia Melayu yang menyebabkan posisinya juga ikut terancam. Pada tahun 1780, Inggeris kemudian mengumunkan perang terhadap Republik Belanda. Pada kesempatan itu Inggeris berusaha untuk menguasai beberapa koloni Belanda dan menyerang wilayah Tanjung Harapan (*Kaap de Goede Hoop*), namun wilayah ini berhasil dipertahankan oleh Belanda karena mendapat bantuan dari *eskader* Prancis. Daerah

³ Kila. 1986. *Gerakan Refatriasi Syeh Yusuf ke Tanah Makassar*, Ujung Pandang : Skripsi pada Jurusan Sejarah dan Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, hlm. 36

pesisir Koromandel, Malabar, dan Bengal berhasil diduduki Inggris serta pesisir Sumatera Barat dan Sailand pada 1782, namun beberapa waktu kemudian wilayah tersebut direbut kembali Belanda setelah mendapat bantuan dari Prancis. Bagi pemerintah Kolonial Belanda, perang antara Inggris itu sangat merugikan sehingga Belanda mengakhirinya dengan suatu perjanjian pada 1784. Isi perjanjian itu adalah Inggris bersedia mengembalikan semua bekas koloninya kecuali Negapatnam asalkan Belanda bersedia membuka wilayahnya untuk perdagangan bebas.⁴

Pada 1795, Inggris berhasil menguasai beberapa wilayah strategis antara lain ; Tanjung Harapan, Malabar, Koromandel, Bengal, Sailand, Melaka dan Maluku. Setelah menduduki wilayah-wilayah tersebut, maka Inggris kemudian memblokir Batavia pada tahun 1800 sehingga Pemerintah Kolonial Belanda sama sekali tidak berdaya untuk melakukan kegiatan perdagangan. Dengan kenyataan itulah sehingga Pemerintah Kolonial Belanda menyerahkan wilayah koloninya kepada Inggris yang meliputi Jawa, Sumatera, Banjarmasin (Kalimantan) dan Makassar. Beberapa waktu kemudian, Belanda kembali mengupayakan agar wilayah koloninya dapat diambil alih kembali dengan jalan mengupayakan

⁴ Poelinggomang. dkk. 2004, *op-cit*, hlm. 168. Desakan Inggris untuk perdagangan bebas itu dipandang oleh pihak Belanda dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonominya, sehingga berusaha untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya di kawasan Semenanjung Melaka. Pemikiran itu erat berkaitan dengan kenyataan di Eropa yang menunjukkan semakin melemahnya kedudukan Belanda, juga sebagai pusat perdagangan teh akibat saingan Inggris yang dipandang melakukan perdagangan gelap. Pada akhir tahun 1784 Kompeni berhasil memaksakan Sultan Mahmud dari Riau-Johor menandatangani perjanjian yang menempatkan wilayah sebagai kerajaan pinjaman, juga hal yang sama dengan Sultan Ibrahim dari Selangor pada tahun 1785. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kompeni kini memiliki pengaruh dalam mengawasi wilayah itu secara keseluruhan daripada sebelumnya.

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

perjanjian perdamaian dengan Inggris dan dicapai kesepakatan pada 1802. Wilayah koloni tersebut diserahkan kembali ke Belanda dengan catatan harus membuka wilayahnya sebagai wilayah terbuka bagi perdagangan bebas.

Inggris kembali mengadakan perluasan wilayah dengan merebut Tanjung Pengharapan pada 1806, dan menyusul Maluku pada 1810. Setelah itu, tentara Inggris kembali melakukan blokade dan menyerang Batavia di bawah pimpinan Lord Minto sehingga Gubernur Jenderal Willem Janssens (1811) yang baru saja digantikan Daendels meng-ungsi ke Semarang. Inggris terus melancarkan serangan sehingga dengan terpaksa Gubernur Janssen menandatangani Kapitulasi di Semarang pada 18 September 1811 sebagai tanda penyerahan tanpa syarat semua wilayah koloni. Selanjutnya, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stanford Raffles (1811-1816) sebagai Letnan Gubernur untuk semua wilayah koloni.

Penyerahan koloni tersebut tidak diterima baik oleh Raja Bone Latenritappu karena menganggap bahwa hal itu tidak disertai dengan suatu pertempuran, apalagi isi perjanjian Bungaya (pasal 6) menyatakan bahwa orang Inggris harus diusir dari Celebes (Sulawesi). Raja Bone kemudian dengan lantang menyuarakan protes atas penyerahan tersebut, seruannya "Kami bukan budak pemerintah Belanda, kami hanyalah sekutunya. Tak ada satu huruf pun dalam Perjanjian Bungaya yang menyebutkan, bahwa Belanda boleh memperjualbelikan atau menjadikan kami sebagai alat pembayaran utang rampasan perang kepada pihak ketiga. Kami sebagai sekutu tahu diri, kami hanya membantu sekutu kami Belanda. Kerajaan Bone, Tanete dan Suppa bersedia berperang dengan Inggris pada barisan terdepan. Kami lebih suka gugur

di medan perang daripada menjadi pembayaran utang perang".⁵ Gubernur Belanda lalu menjawab sikap keberatan raja Bone tersebut dengan menyatakan bahwa: Ia dan semua anggota Perjanjian Bungaya, wajib mematuhi keputusan Gubernur Jenderal Belanda, wakil tertinggi Kerajaan Belanda di Indonesia dan Sulawesi secara khusus. Oleh karena itu, tidak ada lagi perang dengan Inggris. Kemudian raja Bone lalu menjawab lagi pernyataan Belanda itu dengan menyatakan: Bahwa mulai sekarang Kerajaan Bone tidak lagi mengakui Perjanjian Bungaya.⁶ Dan sikap Kerajaan Bone itu segera diikuti pula oleh Kerajaan Suppa dan Tanete atau Agangnionjo.

Sikap penentangan ini mengkhawatirkan pihak Pemerintah Inggris di Makassar, karena itu Inggris mencoba mengingatkan hubungannya saat Kerajaan Bone dibantu Inggris menghancurkan pos-pos pertahanan Belanda di Bulukumba. Begitu juga saat Bone memblokade pantai sebelah Selatan Makassar yang dibantu oleh Inggris. Upaya ini rupanya tidak berhasil membujuk raja Bone untuk mengakui kekuasaannya atas wilayah bekas Hindia Belanda di Sulawesi Selatan, kecuali kalau tuntutan disetujui.⁷Tuntutan

⁵Hamid,dkk.2007. *Sejarah Bone*. Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,hlm.285-286. Setelah pernyataan tersebut, sesungguhnya merupakan suatu sikap "merdeka dan berdaulat" dari ketiga kerajaan. Kerajaan Bone menduduki secara resmi daerah Sinjai, Bulu-kumba, Bantaeng dan Maros. Pajak *Vertiening* yang dipungut dari rakyat petani oleh pemerintah Belanda, dihapuskan secara resmi oleh Kerajaan Bone. Tindakan serupa dilakukan juga oleh datu Suppa dan Tanete untuk daerah-daerah Sigeri, Labakkang dan Pangkajene. Datu Suppa La Kuneng Sultan Adam mengambil alih Parepare dari tangan syahbandar Belanada.

⁶*Ibid.*

⁷Poelinggomang. dkk, 2004,*op-cit*, hlm. 171-172; Tuntutan Kerajaan Bone atas pemerintah Inggris adalah : 1) Setiap raja-raja yang hendak menghadap Resident atau pembesar Inggris harus diantar oleh Raja Bone; 2) Bone tidak ingin membayar pajak persepuluhan seperti yang tercantum dalam isi

itu tidak dipenuhi oleh pemerintah Inggris di Makassar sehingga menjadikan Bone tidak menentu yang pada akhirnya menggiringnya ke dalam peperangan dengan Inggris. Pada tanggal 7 Juni 1814, sebelum fajar menyingsing, tiga buah barisan tentara Inggris menyerang perkampungan orang-orang Bugis di Bontoala, tempat kediaman raja Bone. Bontoala (kediaman raja Bone) dibakar oleh Inggris sehingga raja Bone dan pengikutnya terpaksa melarikan diri dan mengungsi ke tempat lain. Akibat kekalahan ini, Bone harus menyerahkan kembali *kalompoang* kepada Kerajaan Gowa dan Inggris mengangkat pejabat Raja Gowa Karaeng Mangara Bombang. Dengan demikian kondisi Kerajaan Gowa pulih kembali dan tidak lagi terjadi dualisme kepercayaan karena benda kerajaan yaitu *kalompoang* telah dikembalikan.⁸ Wilayah-wilayah penyangga ekonomi yang berada di bawah pengawasan Kerajaan Bone semuanya diambil alih Pemerintah Inggris seperti ; Pelabuhan Parepare, dan sawah-sawah yang terdapat di wilayah utara Makassar dijual dimuka umum dan sebagian diberikan sebagai pinjam-pakai kepada orang-orang Eropa dan Makassar yang berjasa kepada Inggris.

Pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Kerajaan Bone, juga dilakukan oleh sekutu-sekutunya. Pertempuran antara keduanya berlangsung menang – kalah silih berganti diraih kedua pihak. Kendatipun Pemerintah Inggris menang, namun pasti akan

perjanjian Bungaya kalau pemerintah Inggris memberlakukannya; 3) Tidak bersedia mengembalikan Kalompoang yang ada di tangan raja Bone kepada Kerajaan Gowa; 4) Bone mengakui Arung mampu sebagai raja Gowa; 5) Bone tidak mengakui hak yang dipertuan Inggris di wilayah Maros, Bantaeng dan Bulukumba; 6) Bone menuntut kedudukan sebagai wakil Pemerintah Inggris di daerah ini, seperti yang pernah diberlakukan pada zaman VOC.

⁸ Mappangara. 2003. *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*, Makassar : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 63-64

mengalami kesulitan untuk menjaga wilayahnya karena personilnya tidak mencukupi dan alat kekuasaan tidak memadai. Apalagi sebenarnya Inggris tidak dapat berbuat banyak karena kekuasaan mereka hanya terletak pada bidang perdagangan yaitu membangun satu wilayah ekonomi yang luas dengan sistem perdagangan yang liberal. Sebelum usaha-usaha yang dilakukan Inggris menampakkan hasilnya, dengan terpaksa ia harus menyerahkan kekuasaannya kembali kepada pihak Belanda pada tanggal 25 September 1816 berdasarkan Traktat London 1814,⁹ dimana Inggris dengan pertimbangan kepentingan politiknya di Eropa, bersedia menyerahkan kembali wilayah koloni Belanda kepada raja Belanda, kemudian terealisasi pada tahun 1816. Sejak itulah merupakan awal pemerintahan Belanda di wilayah Hindia Belanda. Kenyataan ini memberi legitimasi kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk memulai mengembangkan politiknya untuk menempatkan diri sebagai pelindung dan perantara kerajaan – kerajaan bumiputera.

Setelah berhasil dalam negosiasinya, Pemerintah Hindia Belanda kembali giat untuk menata pemerintahannya di Sulawesi Selatan dengan cara ingin memperbaharui kembali Perjanjian Bungaya tahun 1667. Sebelum pembaharuan perjanjian itu dilaksanakan pada 1824, di Kerajaan Bone terjadi pergantian raja dari To Appatunru, raja Bone ke-23 yang wafat tahun 1823

⁹ Poelinggomang. dkk. 2004. *Op-cit*, hlm.215. Pemerintah Belanda pun giat kembali mengemban pola politik VOC untuk menempatkan diri sebagai pelindung dan perantara-perantara kerajaan bumiputera. Oleh karena itu diusahakan pengakuan atas kedudukannya di wilayah Kepulauan Indonesia. Usaha Belanda berhasil melalui perundingan dengan Inggris yang menghasilkan Traktat London 1824. Inggris mengakui kedudukan kekuasaan dan pengaruh atas pulau-pulau yang berada di sebelah timur Semenanjung Melaka, sementara Belanda harus menyerahkan wilayah pendudukannya di negeri Melayu. Traktat ini juga merupakan awal pengaturan wilayah Kepulauan Indonesia di sebelah barat antara Belanda dan Inggris.

digantikan oleh anaknya bernama I Benni Arung Data sebagai raja Bone ke-24 (1823-1835).¹⁰ Beliau menolak kembalinya pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Sikap penolakan Kerajaan Bone itu, juga dilakukan oleh beberapa kerajaan lokal lainnya. Kenyataan itu mendorong Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen memandang perlu untuk datang sendiri ke Makassar melakukan pe-rundingan dengan raja-raja lokal. Untuk maksud tersebut, dibentuklah dewan komisi dengan tugas untuk menyelidiki lalu memberikan laporan tentang keadaan di Sulawesi Selatan dan sekaligus merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan kekuasaan dengan kerajaan-kerajaan di sana.

Dari hasil penelitian dewan komisi yang dilaporkan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memutuskan mengirim undangan resmi kepada kerajaan-kerajaan lokal (sekutu) untuk melakukan perundingan langsung dengan gubernur jenderal. Untuk maksud tersebut, maka dikirim lagi komisaris Tobias ke Makassar pada tanggal 22 Februari 1824 dengan membawa undangan untuk disampaikan kepada mereka. Pada kesempatan itu, Tobias juga mengajak para raja-raja sekutu untuk hadir nanti dalam pertemuan dengan gubernur jenderal yang rencananya akan dilaksanakan di Makassar. Selain itu, komisaris Tobias juga mengadakan pertemuan pendahuluan dengan raja-raja sekutu di Pangkajene, Sidenreng pada bulan Mei 1824. Pertemuan pendahuluan itu dimaksudkan untuk menyadarkan dan mengingatkan kepada raja-raja sekutu tentang perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya. Hadir dalam pertemuan itu adalah raja-raja dan pembesar Kerajaan Sidenreng,

¹⁰ Daeng Patunru, dkk. 1989. *Sejarah Bone*, Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, hlm. 235

Wajo dan Luwu, sementara dari pihak Belanda dihadiri sendiri oleh komisaris Tobias dan sekretarisnya, yaitu M. Francis.¹¹

Pada tanggal 4 Juli 1824, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tiba di Makassar dan dijemput oleh sejumlah raja dan pembesar kerajaan sekutu, dan pada malam harinya diadakan pesta penyambutan. Memasuki hari ketiga kehadirannya di Makassar (7 Juli 1824), raja Gowa datang menghadap untuk membicarakan perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya dengan Kompeni, yaitu Perjanjian Bungaya. Menyusul kemudian, datang juga utusan Ratu Bone, I Benni Arung Data yang dipimpin oleh Arung Lompu bersama anggota *ade Pitu*. Kehadiran utusan raja Bone ini sebenarnya hanya untuk menyam-paikan permintaan raja Bone menyangkut beberapa hal, antara lain; 1) meminta agar Belanda mengakui kerajaannya sebagai kerajaan yang merdeka dan sekutu yang setara dengan Belanda; 2) ratu Bone dinyatakan sebagai ketua seluruh raja-raja sekutu di Sulawesi Selatan; 3) setiap raja yang ingin menghadap Pemerintah Belanda harus sepengetahuan dan seizin Ratu Bone.¹²

Tuntutan raja Bone itu ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Hindia Belanda dan untuk hal itu, Belanda mengirimkan surat kepada raja Bone dan meminta agar raja Bone sudah harus mengubah pendiriannya dalam jangka waktu limabelas hari. Hal yang sama juga dilakukan oleh raja Tanete (Agang-nionjo) yang berkirin surat ke Gubernur Jenderal yang isinya menyatakan menolak kehadiran kembali Belanda di Sulawesi Selatan dantidak mau berunding. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kerajaan Suppa. Menyadari atas kenyataan itu, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda memutuskan untuk melakukan penyerangan

¹¹Poelinggomang, dkk. 2004. *op.cit.* hlm. 221

¹²*Ibid*

terhadap kedua kerajaan sekutu dari Kerajaan Bone itu. Keputusan itu diambil sebagai strategi agar Kerajaan Bone mau mengubah sikapnya. Tampaknya Kerajaan Bone tidak mau mengubah sikapnya yang dibuktikan dengan ketidakhadirannya dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 30 Juli 1824. Selain Kerajaan Bone yang tidak hadir, juga termasuk Kerajaan Luwu, Soppeng, Suppa, Tanete dan Mandar. Kerajaan yang hadir pada pertemuan itu adalah Gowa, Sidenreng, Buton, Laikang, Sanrobone, Binamu dan Bangkala. Pertemuan mengagendakan perubahan isi Perjanjian Bungaya menjadi 22 pasal. Hal inilah kemudian dikenal dengan nama Kontrak Bungaya di Ujung Pandang (*Vernieuwd Bongaisch Contract*) yang ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 1824.¹³

Isi pembaharuan Kontrak Bungaya adalah dicapainya kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian, persahabatan dan persekutuan antara Pemerintah Hindia Belanda dan raja-raja di Sulawesi Selatan. Pada pasal terakhir dari kontrak itu disebutkan nama-nama raja yang hadir dan bertandatangan, yaitu; raja Gowa dan Tallo, Sanrabone, Laikang, Binamu, Sidenreng, Bangkala. Sedangkan raja-raja yang tidak hadir antara lain; raja Suppa, Mandar, Tanete, Barru dan Luwu. Belanda beranggapan bahwa ketidakhadiran raja-raja tersebut adalah karena dipengaruhi dan dihasut oleh Kerajaan Bone. Itulah sebabnya sehingga dalam kontrak itu hanya disebutkan bahwa kerajaan-kerajaan yang tidak hadir itu hanya sebagai ancaman saja karena apabila Kerajaan Bone sudah ditundukkan maka kerajaan-kerajaan itu pasti mau menandatangani kontrak baru itu. Tetapi apa yang menjadi harapan Belanda untuk

¹³Daeng Patunru.1969. *op.cit.*, hlm.241; Baca juga: Maattulada.1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang:hasanuddin University,hlm.237

dapat menundukkan Raja Bone I Benni Arung Data tidak pernah tercapai sampai akhirnya beliau meninggal dunia.

Karya ini fokus pada Perlawanan Raja Bone I Benni Arung Data melawan Belanda dan mengambil lokasi sebagai batasan spasialnya pada wilayah administrasi Kabupaten Bone, namun tidak tertutup kemungkinan wilayah lain akan dijadikan sasaran penelitian sepanjang hal itu ada kaitannya. Sementara pembatasan masalah waktu akan dimulai pada masa awal Pemerintahan Hindia Belanda, masa pemerintahan Inggris hingga berakhirnya masa pemerintahan Raja Bone I Benni Arung Data (1823-1835).

Perlawanan raja Bone Ke-25, sesungguhnya sangat rumit namun menarik untuk ditelusuri peristiwanya karena sebenarnya peristiwa itu tidak hanya dilatari oleh aspek politik semata, namun juga oleh persoalan sosial, budaya dan ekonomi. Tetapi pada kenyataannya bahwa peristiwa ini belum banyak mendapat sorotan secara tuntas oleh para sejarawan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa judul kajian ini sudah ada yang mencoba untuk menelusurinya, tetapi hal itu hanya dilakukan oleh peminat sejarah bukan sejarawan sehingga hasil kajiannya tentu saja tidak terlalu mendetail. Oleh karena itulah kajian ini mencoba diarahkan untuk mengungkap dan menjelaskan tentang dinamika kesejarahan yang berkaitan dengan Perlawanan Raja Bone Ke-25 Terhadap Belanda 1824-1835. Berangkat dari uraian tersebut di atas, yang akan menjadi pokok persoalan dalam kajian ini adalah mengapa Raja Bone, I Benni Arung Data melakukan perlawanan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda, dan diberi judul Hancur Dalam Menegakkan *Siri* (Kajian Perjuangan I Benni Arung Data Melawan Belanda). (*)

BAB II

BONE SELAYANG PANDANG

A. Awal Sejarah

Sulawesi Selatan yang begitu luas memiliki sejarah panjang yang tersebar pada beberapa kerajaan, seperti kerajaan yang dianggap utama dan besar seperti Gowa, Luwu dan Bone. Kerajaan yang terakhir disebutkan ini pada awal abad ke-16 membentuk persekutuan yang diberi nama Persekutuan Tellumpoccoe (*MattellumpoccoE*). Dari beberapa kerajaan yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan, dalam proses berdirinya sebagai kerajaan yang utuh dan terintegrasi secara internal dalam kerajaan tersebut selalu dihubungkan secara geneologi pada tokoh yang dianggap hebat dan memiliki kekuatan dan kekuasaan di luar batas kemampuan kekuatan dan kekuasaan manusia. Sehingga banyak orang maupun para sejarawan menyebutnya sebagai suatu konsep mitologis.

Kerajaan Bone mulai eksis sebagai kerajaan ketika *Tomanurung* diangkat sebagai raja pertama oleh tujuh orang ketua kelompok yang ada saat itu, dan diperkirakan terjadi tahun 1330 atau abad ke-14 di Sulawesi Selatan. Kehadiran *Tomanurung* dianggap sebagai penyelamat kehidupan manusia di Bone ketika itu, karena pada umdi antara sesama kelompok tadi saling berperang satu sama lainnya untuk mempertahankan kekuasaan *Tomanurung*

sebagai raja pertama menandakan pula telah terbentuknya kerajaan baru yang mereka namakan Kerajaan Bone. Dalam perkembangan berikutnya menjadi salah satu kerajaan besar dan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya sehingga dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bone menjadi incaran kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

Sebelum *Tomanurung* diangkat menjadi raja I, terjadi tanya jawab dengan orang banyak yang diwakili oleh *matoa* Ujung, maka *tomanurung* menjawab: "*Teddua nawa-nawago-temmabballecco'go*, artinya: apakah engkau tidak mendua hati dan apakah engkau tidak mungkir di kemudian hari". *Matoa* Ujung yang mewakili rakyat Bone lalu menjawab: "*Teddua nawanawakkeng-temmabballecco'keng*" yang artinya: Kami tidak mendua hati dan kami tidak akan mungkir di kemudian hari". Setelah *tomanurung* mendengar jawaban rakyat Bone, maka *tomanurung* menjawab: "*Ujujunggi upari botto uluupate'ripakka-pakka ulaweng ada-adammu to maegae, riwettu mabbulo sipeppa'nu maelo pancajika arung*". Artinya: Saya menjunjung tinggi di atas kepalaku dan menghargai kata-kata dan persatuanmu untuk mengangkat saya menjadi raja.¹⁴ Setelah *Tomanurung* menyetujui

¹⁴Ali.1986.*Op-cit.*,hlm.3. Dijelaskan bahwa setelah selesai soal jabab tersebut, maka *tomanurung* menerima dengan baik, maka pada waktu itu juga *tomanurung* dipindahkan dari Matajang ke Bone. Dengan segera rakyat mendirikan sebuah istana (*Langkana*) untuk *manurungge*. Tersebut dalam sumber *lontarak* bahwa sebelum daun-daun dari kayu akan dijadikan sebagai tiang dan perlengkapan rumah lainnya menjadi layu, istana itu sudah harus jadi atau selesai. Di istana inilah *tomanurung* bertahta dan berdiam sebagai raja pertama dari Kerajaan Bone. Tanya jawab yang berlangsung antara wakil rakyat Bone (*matoa* Ujung) dengan *tomanurung* dalam naskah Daeng Patunru.1989, hlm. 16, hal itu dinya-takan sebagai janji atau sumpah antara keduanya. Janji atau sumpah itu berbunyi sebagai berikut (dalam bahasa Indonesia): Engkaulah angin, sedang kami adalah daun kayu. Kemana angin bertiup ke situlah kami mengikut atau terbawa; kehendakmulah berlaku atas kami, kata-kata-mulah yang jadi; bila engkau mengundang, kami datang

perjanjian tersebut, maka rakyat Bone memindahkan *Tomanurung* pergi ke Bone yang pada saat itu berpusat di Kawerang. Dengan demikian sudah resmi *Tomanurung* menjadi raja pertama Bone. Dan inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Bone.

Bila diperhatikan dengan seksama keterangan yang diucapkan oleh kedua pihak tersebut di atas, nampak telah digariskan secara nyata batas-batas kekuasaan antara rakyat dan raja, yaitu suatu persetujuan bersama atas dasar mufakat antara rakyat dan raja atau pemimpin yang akan memangku tongkat kepemimpinan di dalam kerajaan. Dalam perjanjian pemerintahan itu, telah ditetapkan batas-batas antara kedua pihak, yaitu rakyat menyerahkan diri sepenuhnya. Dan raja berkewajiban menjaga, melindungi, memakmurkan dan men-sejahterakan rakyatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa raja bukanlah berkuasa mutlak, dan ia dapat diturunkan dari tahtanya kalau ia tidak mampu mensejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara rakyat dan raja, maka sangat kecil kemungkinan raja mempunyai kekuasaan mutlak dan bersifat sewenang-wenang. Kesan raja atau pemimpin yang menganggap kerajaan (negara) sebagai miliknya, begitu juga atas golongan rakyat banyak tidak akan dilakukan perlakuan dengan sesuka hatinya. Dengan demikian kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja, hanyalah merupakan alat atau sarana

(mendekat), memintalah dan kami akan memberi, memanggillah maka kami menyahut. . Walaupun anak kami atau isteri kami jika kamu tidak menyukainya, maka kami juga tidak akan menyukainya, akan tetapi, engkau memimpin kami semua, agar aman, damai dan tenteram, engkau menjaga kami semua, agar makmur, serta engkau melindungi kami agar tidak menderita sakit. Bandingkan dengan Mattulada, 1999. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, hlm. 41-42; Mattulada, 1985. *Latua Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Jogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm. 414. Muh. Amir, 2005. *Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905*. Ma-kassar: Era Media, hlm. 16-17

untuk mengabdikan kepada orang banyak atau rakyat, untuk kebahagiaan rakyat serta melindunginya dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman jiwa dan kehidupannya.¹⁵

Mencermati hal tersebut di atas, maka sesungguhnya raja yang baru dilantik atau disepakati itu mempunyai beban moral dan sosial di dalam masyarakat karena dia harus memperlihatkan kemampuannya untuk memajukan, mensejahterakan dan melindungi masyarakat. Selain itu, seorang raja harus pula memperlihatkan tingkah laku yang terpuji sehingga dapat diteladani oleh semua lapisan masyarakat, dan tanggungjawab ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bilamana raja yang telah diangkat itu berhasil menunaikan tanggungjawab sosialnya, maka raja pasti mendapatkan simpatik dari rakyat yang dipimpinnya. Perjanjian antara rakyat dengan sang pemimpin (*Manurungnge ri Matajang*) adalah suatu perjanjian sakral karena sebenarnya merupakan suatu sumpah atau janji antara rakyat dan pemerintah (raja) pertama di negeri Bone. Perjanjian sakral ini senantiasa (wajib) hukumnya untuk diucapkan pada setiap pelantikan raja-raja Bone berikutnya.¹⁶

Tomanurung Matasilompoe sebelum diangkat menjadi raja pertama di Bone, diadakan pula musyawarah dan kesepakatan bersama *matoa-matoa* untuk membuat beberapa aturan atau norma-norma. Kekuasaan raja pada awalnya masih meliputi tujuh wanua (desa) dan musyawarah itu menghasilkan kesepakatan yang akan mengikat semua warga. Dalam proses pemerintahan, belum diketahui nama *Tomanurung* tersebut dan oleh masyarakat menyebutnya *Manurungnge ri Matajang* atau Mata Silompoe.

¹⁵Abdullah, 1991. *Andi Pangewrang Pettarani, Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.43

¹⁶Patunru, 1989. *Op.cit.*, hlm.17

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

Penamaan ini oleh ma-syarakat didasarkan pada kehebatan beliau dalam soal menghitung, dimana kalau menghitung kumpulan orang dalam suatu *limpo* cukup dengan melihat saja sudah dapat mengetahui jumlahnya.

Hasil musyawarah antara para *matoa* dengan *Tomanurung* adalah:

1. *Mappolo leteng* (titian patah); maksudnya adalah :
 - a. Perihal ganti-mengganti antara kedua pihak tentang pemilikan suatu barang yang diakui oleh lebih dari satu orang, ditetapkan menjadi milik orang yang memegang barang itu dan tidak dibicarakan lagi.
 - b. Bahwa seseorang ahli waris, lebih dahulu meninggal dari orang tuanya, sehingga ahli waris ini tidak berhak memperoleh warisan dari kedua orang tuanya.
2. *Mappolo bicara*, artinya bentuk keputusan atau penggarisan yang harus ditaati, Keputusan yang sama harus dipersamakan dengan yang lain, dengan kasus serupa harus diserupakan pula, ini merupakan undang-undang peradilan. *Ade'*, artinya ketaatan pada aturan, maksudnya untuk membentuk tatanan hidup yang harus dipatuhi oleh semua pihak, agar ketertiban sosial tidak terganggu. Hal ini merupakan aturan dalam lembaga sosial.
3. *Ade'*, artinya ketaatan pada hukum, maksudnya untuk membentuk tatanan hidup yang harus dipatuhi oleh semua pihak, agar ketertiban sosial tidak terganggu.¹⁷

Selain menetapkan aturan untuk memperbaiki tatanan sosial,

¹⁷Hamid, 2007. *Sejarah Bone*. Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 13; Baca juga: Daeng Patunru, 1989, hlm.19; Andi Sultan Kasim, 1992. *Op.,cit.*, hlm. 26

raja ini juga menetapkan bendera kerajaan (panji kerajaan) yang diberi nama *WorongporongngE*. Beliau tidak diketahui nama sebenarnya, masyarakat hanya memberinya nama berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, yaitu Mata SilompoE karena dapat mengetahui dengan benar jumlah orang atau masyarakat yang sedang berkumpul pada suatu tempat dengan hanya melihatnya saja. Mata SilompoE ri Matajang kawin dengan *manurungngE ri Toro* yang tidak juga dikenal nama aslinya. Dari perkawinan ini lahir lima orang.¹⁸

Raja Bone I dalam melaksanakan pemerintahannya, beliau dibantu oleh beberapa orang ketua persekutuan masyarakat kaum yang saat itu masih disebut *Matoa Anang*. Adapun para *matoa* itu antara lain; *Matoa Ujung*, Pongeng, Tibojong, Tanete Riattang, Tanete Riawang, Ta', dan Macege. Dalam perkembangannya, mereka kemudian disebut *Matoa Pitu*. Atas kerjasama dari para *matoa* itu, sehingga dibuatlah dasar-dasar aturan yang mengikat secara bersama, selain itu, para *matoa* ini juga ditempatkan dalam penataan kekuasaan yang tertib seperti berikut;

1. Menempatkan ketujuh *MatoaWanua* ke dalam satu majelis, dan Mata Simpoe bertindak sebagai ketuanya.
2. Dari ketujuh *Matoa Wanua* itu diikat dalam satu persekutuan yang disebut Kawerang yang berbentuk konfederasi.
3. Kawerang itu kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang dibantu oleh ketujuh *MatoaWanua* sebagai dewan pemerintahan.
4. Tiap *matoa* tetap memegang jabatannya di *wanuanya* (di

¹⁸*Ibid.*, hlm.14; Dalam Daeng Patunru, 1989, hlm.18; Dijelaskan agak berbeda dengan apa yang disebutkan pada sumber sebelumnya, dimana dikatakan bahwa *Tomanurung Mata Silompoe* setelah kawin memperoleh anak sebanyak enam orang yaitu; La Ummas; I Pattanra Wanua; I Bolong Lela; I Tenri Ronrong; We Arratiga; dan yang terakhir adalah I Tenrisolongeng.

- negerinya) dan mengikuti aturan dari pimpinan Kawerang.
5. Tiap *Matoa Wanua* dapat menerima penggabungan negeri-negeri baru yang bersedia bergabung pada kawerang, namun hanya tujuh negeri itu yang duduk dalam majelis.¹⁹

Sebagaimana halnya dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, Kerajaan Bone pun mempunyai *arajang* (*regalia* atau *ornamen*). *Arajang* ini adalah benda-benda yang dianggap sakti yang dipercaya turun dari langit bersama raja pertama. *Arajang* itulah dianggap pemilik kerajaan dan bukan milik raja. *Regalia* merupakan personafikasi kerajaan. Siapa yang memilikinya, maka ialah dianggap wakil *arajang* dan berhak memerintah. *Arajang* juga dianggap sebagai sebagai alat pemersatu seluruh rakyat, di samping ia mempunyai kekayaan berupa sawah, tempat tertentu di laut, dan danau. Hasil milik *arajang* itu adalah milik dan sumber penghidupan bagi raja, namun tentu saja raja tidak boleh menjual atau mewariskannya. Oleh karen itu, raja boleh berganti, tetapi *arajang* harus tetap ada karena ia merupakan *palladium* kerajaan dan merupakan sumber kekuatan raja dan persekutuan hukum adat.

Ketika *Tomanurung ri Matajang* telah memerintah selama kurang lebih 32 tahunnya yaitu 1326-1358 dan telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Bone dengan baik. Pada suatu hari, dikumpulkanlah seluruh rakyatnya, lalu baginda bersabda kepada mereka semua; *Tudang aja mumareulleng; Iyana ritu anakku riasengnge La Ummase Tolawa; Iyatona Upattenning Akkuluadanganetta To Bone*. Artinya; Duduklah semua kiranya tidak kurang sesuatu apapun. Adalah anak kami yang bernama La Ummasa To Lawa, kepadanya kami serahkan membawa janji yang telah pernah kita ikrarkan itu. Dan setelah baginda bertitah, tiba-tiba kilat dan

¹⁹Hamid,dkk.2007. *Sejarah Bone.Op.,cit.*, hlm. 14-15

petir sambar menyambar dan setelah itu pula, baginda sudah tidak nampak di tempat duduknya semula bersama isterinya. Begitu juga payung kuning keemasan beliau bersama cerana hilang dari tempatnya. Demikianlah Mata Silompoe menghilang, seperti halnya pada saat baginda datang tidak diketahui asal usulnya.²⁰

B. Masa Pemerintahan Raja Berikutnya

Ketika Mata Silompoe *mairat*, rakyat Bone dan ketujuh *matoa* pembantu raja sepakat mengangkat La Ummasa atas pesan dari raja Mata Silompoe. La Ummase adalah putra mahkota yang telah dipersiapkan oleh baginda raja Bone yang pertama. Arumpone yang ke-2 ini ketika menduduki tahta pemerintahan Kerajaan Bone, beliau tidak mempunyai payung kebesaran karena sewaktu ayahandanya *mairat*, payung ke-besarnya juga ikut menghilang bersama beliau. Oleh karena itu, ketika baginda bepergian hanya dipayungi *kaliyao* (tameng). Isterinya tidak disebutkan siapa namanya, yang pasti bahwa ia berasal dari keluarga biasa, bukan turunan bang-sawan. Dari isterinya beliau, ia dikaruniai dua orang anak, tetapi secara genetika tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk menggantikan posisi beliau.

Masyarakat sangat mencintai beliau karena prilakunya yang mengesankan dan mempunyai banyak kelebihan, seperti; daya ingatnya yang tajam, penuh perhatian pada kehidupan masyarakat, adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Pada masa pemerintahannya pula, beliau untuk pertama kalinya melakukan perluasan wilayah dengan mengalahkan Wanua Biru, Cellu dan Anre Biring. Selain itu, baginda giat pula mengadakan hubungan persahabatan dengan *wanua-wanua* tetangga. Ketiga *wanua*

²⁰Daeng Patunru, 1989.*Op.cit.*,hlm.20

yang bergabung itu kemudian menjadi lingkaran pertama yang berorientasi pada pusat kerajaan yaitu Kawerang.²¹ Pada masanya pula, baginda mulai memperkenalkan peralatan-peralatan perang dan rumah tangga yang terbuat dari besi. Itulah sebabnya beliau lalu dikenal sebagai Petta Panre BessiE, artinya; raja tukang besi.

Dari segi politik, dapat dikatakan bahwa Kerajaan Bone pada masa pemerintahan beliau, Bone memasuki masa awal pembangunannya. Beliau pulalah yang berselisih paham dengan saudara iparnya (suami dari adiknya yang bernama We Pattanra Wanua). Perang saudara ini berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya, namun tidak seorang pun di antara mereka keluar sebagai pemenang. Sementara itu, adiknya yang diperisteri oleh La Pattikkeng Arung Palakka, dalam keadaan hamil tua dan La Pattikkeng sudah memberikan perintah kepada isterinya bahwa kelak jika ia melahirkan dan anaknya seorang laki-laki, maka ia harus dibunuh pada saat itu juga.

Perintah yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan itu, telah sampai ke telinga La Ummasa raja Bone ke-2. Untuk menghindari agar pembunuhan itu tidak terjadi, maka Arumpone memerintahkan kedua orang anaknya untuk pergi ke Palakka untuk menjemput atau membawa anak itu ke Bone kalau sudah lahir. Ketika We Pattanrawanua melahirkan, maka kedua

²¹Hamid, dkk.2007.*Op.cit.*, hlm.21. Selanjutnya, Ali, 1986. Hlm.7. dalam bukunya disebutkan pula bahwa Baginda La Ummase ter-kenal pada masa pemerintahannya sebagai pelopor dalam pembuatan dan penggunaan alat-alat persenjataan dan pertanian yang dibuat dari besi. Dari sebab itu baginda disebut Petta Panre Bessie (raja yang bertukang besi). Diceriterakan bahwa *Lanreseng* (landasan) *manurung* yang sekarang terdapat di Museum La Pawawoi Kabupaten Bone, berasal dari masa pemerintahan raja Bone ke-2 La Ummasa. Alat landasan *manurung* ini ditemukan di wilayah atau daerah Lasonrong.

bersaudara itu berangkat ke Palakka untuk menjemput anak yang akan lahir baik ia seorang perempuan maupun laki-laki.²²

Kemanakan La Ummasa yang baru lahir itu ternyata seorang anak laki-laki dan oleh beliau akhirnya dijadikan sebagai penggantinya menjadi raja Bone karena beliau sendiri tidak memiliki putra mahkota. Setelah anak itu tiba di Bone pada malam harinya, maka raja Bone segera mengumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa mulai pada saat ini pula Kerajaan Bone kami serahkan kepada anak yang baru lahir ini. Begitu juga janji keramat dan sumpah setia antara baginda Arumpone pertama dengan rakyat Bone yang diturunkan kepada kami, pada hari ini, kami turunkan pula kepadanya. Setelah Baginda selesai bertitah, maka serentak rakyat Bone menyembah tanda menyambut dan menerima baik titah baginda.²³

Titah baginda diterima baik oleh seluruh warga dan para *matoa wanua* sehingga La Saliu Kerrangpeluwa dinobatkan menjadi raja yang ketiga di Kerajaan Bone dalam usia baru sehari semalam. Setelah penobatan itu, maka La Ummasa mengundurkan diri dari tahta kerajaan Bone. Setelah tujuh belas tahun lamanya pemerintahan berlangsung di bawah kendali To Suwalle dan To Salawakka, maka raja tua ini jatuh sakit dan tidak berapa lamanya ia pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Nama anumerta beliau digelar *To Mulaiye Panreng* artinya raja yang pertama kali dikuburkan jasadnya.²⁴ Berhubung umur La Saliu masih bayi ketika dinobatkan jadi raja Bone, maka roda pemerintahan dijalankan oleh

²²Ali, 1989. *Op.cit.*, hlm. 8

²³Daeng Patunru, 1989. *Op.cit.*, hlm. 23. Lebih lanjut pada sumber ini dijelaskan bahwa sesudah itu La Saliu Petta Kerrampeluwa dinobatkan menjadi raja Bone yang ketiga dalam usia sehari semalam. Tujuh hari tujuh malam rakyat Bone berpesta porah tidak tidur menyambut pelantikan Arumpone yang ketiga. Setelah itu, barulah diadakan upacara *welusu lolo*.

²⁴*Ibid.* hlm. 20

dua orang sepupu sekalinya yaitu To Suwalle dan To Salawakka, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. To Suwalle atau yang digelar *Kajao Ciung*, mewakili raja menangani urusan pemerintahan ke dalam, termasuk urusan istana atau biasa juga disebut *Tomarilaleng*. Beliaulah orang pertama yang menja-bat jabatan tersebut di Kerajaan Bone.
2. To salawakka atau yang digelar *Kajao Araseng*, mewakili raja menangani urusan pemerintahan kerajaan keluar, termasuk hubungan dengan kerajaan lain. Beliau ini yang merupakan *Makkedang Tana* yang pertama di Kerajaan Bone.

Roda pemerintahan dijalankan oleh dua orang bersaudara tersebut atas nama raja di Kerajaan Bone, dibantu ketujuh orang *matoa*. Dan saat La Saliu memasuki usia 17 tahun, tahta pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada beliau, sementara sepupu sekalinya tetap pada jabatan yang selama ini diembannya, yaitu *Tomarilaleng dan Makkadang Tanah*. Oleh karena sejak kecil beliau terpisah dengan tua kandungnya, maka setelah beliau mengendalikan pemerintahan Kerajaan Bone secara penuh, maka beliau mengunjungi kedua orang tuanya yang juga menjadi raja di Palakka. Dalam kunjungan itu, kedua orang tuanya mengawinkan beliau dengan sepupunya sekalinya yang bernama We Tenripoppo. Dari Perkawinan itu, beliau dikaruniai dua orang anak yaitu I Benrigau dan La Mappasessu. Selain itu, raja Palakka juga menyerahkan kepada La Saliu pasar Palakka yang kemudian dipindahkan ke Bone.²⁵

Masa pemerintahannya berjalan baik, rakyat sangat mencintainya, baginda gemar bercocok tanam, sehingga perluasan wilayah atau areal persawahan semakin luas yang berdampak pada kemakmuran rakyat yang semakin meningkat. Selain itu, baginda

²⁵Hamid,dkk.2007.*Op.cit.*,hlm.23. Baca juga; Ali, 1986.*Op.cit.*, hlm. 1

juga membuat panji-panji kerajaan menjadi tiga yang sebelumnya hanya satu. Di samping itu, baginda juga yang membagi tiga masyarakat dalam tiga kelompok besar dan setiap kelompok tersebut masing-masing memegang satu panji (bendera atau sejenis umbul-umbul), yaitu:

1. Bendera *WorongporongE*; di bawahnya terdapat *bate* Majang, Maroanging, Bukaka, Kawerang, Pallengorang, Mallari yang dipimpin oleh *Matoa Mallari*.
2. *Bate Cella'Eri Atau* (bendera berwarna merah) berada di sebelah kanan bendera *WorongporongE* yang dipergunakan oleh rakyat; Lemoape, Masalle, Macege, Belawa. Kelompok ini dipimpin oleh To Suwalle digelar *Kajao Ciung*.
3. *Bate CellaE ri Abeo*; Bendera ini juga berwarna merah, tetapi ditempatkan pada sebelah kiri bendera *WorongporongE*. Bendera ini dipergunakan oleh rakyat; Araseng, Ujung, Katumpi, Padaccengnga, Madello dengan pimpinan To Salawakka yang bergelar *Kajao Araseng*.²⁶

Baginda juga sangat sayang kepada kedua orang tuanya, dia juga yang memerdekakan hamba sahaya pusaka dari neneknya dan diberinya suatu perkampungan di sebelah utara Kawerang di dekat sungai, yaitu di kampung Panyula. Sementara, hamba sahaya yang diperoleh selama beliau menjadi raja ditempatkan di Limpenno. Orang Panyula yang bertugas sebagai *makkasiwoiang* ikan dan bertugas sebagai pendayung, bila raja bepergian lewat laut. Dalam bidang perekonomian, beliau berhasil pula mengangkat penghidupan masyarakat dengan jalan memindahkan

²⁶Abu Hamid, dkk. 2007.*Op.,cit.*,hlm.23-24. Baca juga; Patunru, dkk.1989 *Op.,cit.*, hlm.24-25; Ali, 1986.

pasar Palakka ke ibukota kerajaan. Fungsi pasar dimaksimalkan sehingga roda perekonomian kerajaan dapat lebih ditingkatkan dan pengunjung pasar semakin ramai yang datang untuk melakukan transaksi. Selain fungsinya sebagai tempat jual beli segala macam keperluan, pasar juga dijadikan sebagai tempat menyampaikan berbagai hal yang terjadi di dalam kerajaan. Dengan demikian kerajaan akan lebih dikenal keluar daerah yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh para pedagang dan pembeli yang datang ke pasar itu.

Masa pemerintahannya, beliau berhasil memajukan Kerajaan Bone dalam berbagai bidang, seperti perluasan wilayah dan peningkatan kemakmuran hidup rakyat. Pada usia 72 tahun, beliau pada suatu haru lalu mengumpulkan para *matoa* dan seluruh rakyatnya untuk mengadakan suatu pertemuan. Dalam pertemuan itu, baginda menyampaikan kondisi tubuhnya yang semakin tua dan berkeinginan untuk melihat rakyatnya mengadakan pesta rakyat. Para *matoa* dan rakyat sepakat dan menyetujui usul baginda itu dan segera menentukan hari yang tepat untuk melaksanakan rencana itu.

Tiba hari yang ditentukan, maka bendera Worong-porongE dikibarkan yang didampingi oleh bendera merah (*cella'e*) masing-masing satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Ketika *para matoa* dan rakyat telah berkumpul, maka dimulailah pesta rakyat itu dengan sangat meriah. Berbagai jenis permainan rakyat dan hiburan serta ketangkasan yang dimainkan oleh sebagian masyarakat dengan penuh kegembiraan. Setelah masyarakat merasa puas dengan segala bentuk permainan dan hiburan yang disuguhkan, maka Baginda La Saliu Kerrangpeluwa menyampaikan titahnya bahwa puteri saya yang bernama I Banrigau dapat disetujui untuk menggantikan beliau melanjutkan amanat rakyat yang telah diterima baginda dari raja bone ke-2 La Ummasa'. Dan setelah para *matoa* dan rakyat Bone telah

mendengarkan titah baginda itu, maka mereka semuanya kembali ke rumah masing-masing.

Sehari setelah pesta rakyat berakhir, baginda jatuh sakit dan beberapa hari kemudian meninggal dunia (mangkat). Yang menggantikan beliau menjadi raja Bone ke-4 adalah anaknya yang bernama I Benrigau sesuai dengan pesan baginda. Sebelum beliau memangku jabatan sebagai raja Bone ke-4, beliau juga menjabat sebagai Arung Majang. Beliau kemudian dikawini oleh Arung Kaju yang bernama La Tenribali dan dari perkawinan itu lahir sembilan orang anak, antara lain La Tenrisukki dan La Tenrigora.

Masa pemerintahan I Benrigau raja Bone ke-4 (1470-1510) tidak banyak dicatat dalam lembaran sejarah Kerajaan Bone pada masa itu. Tercatat adalah bahwa beliau pernah membeli Bulu Cina dengan harga 90 ekor kerbau dan membeli beberapa petak sawah di daerah Laliddong dengan harga 30 ekor kerbau. Sawah-sawah itu kemudian diketahui penggu-naannya untuk mata pencaharian para hamba-hamba beliau sendiri. Sawah-sawah ini dikemudian hari selalu diganggu oleh orang-orang dari Arung Katumpi yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara Raja Bone ke-4 I Benrigau dengan Arung Katumpi. Perselisihan ini berakhir setyelah melalui perang antara kedua pihak dan Arung Katumpi mengalami kekalahan sehingga negerinya kemudian dijadikan wilayah Kerajaan Bone. Sementara itu, putranya yang bernama La Tenrigora diangkat menjadi arung di Bulu Cina.

Setelah putera I Benrigau yang bernama La Tenrisukki berusia 19 tahun, maka baginda mengumpulkan seluruh rakyatnya dan para *matoa* untuk mengumumkan kepada mereka semua bahwa yang akan menggantikan beliau nanti adalah La Tenrisukki sebagai raja Bone ke-5. Berdasarkan tradisi kerajaan, bahwa setiap pelantikan, bahwa *ulu ada* harus diba-cakan dan diserahkan kepada

raja pengganti. Sedangkan puteranya La Tenrigora diangkat pula menjadi Arung Majang yang berada di dalam wilayah Bulu Cina sehingga beliau juga disebut Arung Cinalah. Setelah I Benrigau turun tahta, maka beliau menetap kadang di Cina dan seri pula di Lalebata. Suatu ketika saat baginda berada di Cina, ia naik ke loteng (*rakkeang*) istana, tiba-tiba datang api dewata menyelubungi tubuh baginda, dan setelah api dewata padam tubuh bagindapun menghilang. Itulah sebabnya sehingga Baginda I Benrigau diberi gelar anumerta *mallajangne ri* Cina.²⁷

C. Konflik dengan Kerajaan Gowa

Pada saat raja Bone ke-4 wafat, maka yang menggantikan beliau adalah anaknya sendiri yang bernama La Tenrisukki sebagai raja ke-5 yang memerintah sekitar tahun 1508-1535. Pada masa inilah peperangan banyak terjadi, dan tergolong besar adalah yang terjadi antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Luwu yang diakhiri dengan kemenangan besar di pihak Kerajaan Gowa. Peperangan ini banyak menelan korban antara kedua pihak, sehingga untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak

²⁷Ali, 1986. *Op.,cit.*, hlm. 12-13. Baca juga : Abu Hamid,dkk. 2007. *Op.,cit.*, hlm. 25-26; Patunru,1989. *Op.,cit.*, hlm.29-30. Lebih lanjut dijelaskan dalam sumber ini tentang kematian I Benrigau yang berbau mitos itu. Dikatakan bahwa: Setelah empat tahun baginda menetap di Cina,tiba-tiba pada suatu hari baginda naik ke atas rangkiang (loteng) rumah duduk di atas *peterana*. Pada saat itu pula di luar perkiraan tiba-tiba datang api dewata bergulung-gulung naik ke rumah melalui anak tangga, terus berputar-putar ke segala penjuru dalam rumah. Akhirnya naik ke rangkiang tempat baginda semayam. Sungguh suatu keajaiban, karena setelah api dewata padam, maka baginda juga sudah tidak ada (*mallajang* atau menghilang).

²⁸Mattulada, 1998.*Op.,cit.*, hlm.92. Beliau menjelaskan bahwa Kerajaan Luwu mengalami kemunduran secara nyata pada masa pemerintahan raja Gowa. Sebuah negeri dalam wilayah Tanah Luwu diambil alih oleh Raja Gowa La Tenrisukki MappayungngE tahun 1530, berdasarkan Perjanjian *Polo Malelai ri Unnyi*, yaitu negeri Cenrana. Selain itu, pengusaan tana Luwu

lagi, maka peperangan itu harus diakhiri dengan suatu perjanjian yang dinamakan *Polo Malelae ri Unnyi*.²⁸ Dalam perjanjian tersebut, Cenrana dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Bone hingga masa pemerintahan raja Bone ke-6. Dalam peperangan itu, pihak Kerajaan Luwu kehilangan payung kebesarannya karena dirampas pasukan Kerajaan Bone lalu dipersembahkan kepada Baginda La Tenrisukki. Mulai saat itulah baginda raja Bone mulai memakai payung kerajaan setelah payung kebesaran Kerajaan Bone yang pertama menghilang bersamaan dengan *mairatnya To Manurung Mata SilompoE* sebagai raja pertama. Itu sebabnya sehingga raja Bone ke-5 ini digelar *Mangkau* (raja) Bone, *MappayungngE* (raja yang memakai payung).²⁹

Selain konflik tersebut di atas, terjadi pula pertentangan antara Kerajaan Bone dengan Arung Mampu. Penyebab terjadinya perselisihan itu adalah soal peternakan dan perbatasan antara kedua kerajaan. Beralasan bagi Arung Mampu karena kerajaannya jauh lebih tua dari Kerajaan Bone. Oleh karena perluasan dan perkembangan Kerajaan Bone, sehingga wilayah Arung Mampu mulai mengalami

diperbaharui oleh keberhasilan Tana Bone memegang hegemoni perairan Teluk Bone. Perkembangan Tana Luwu semakin sempit, karena penggunaan laut sebagai infrastruktur yang membawa kepada kejayaan itu, sudah dikuasai oleh Tana Bone. Kekuatan-kekuatan ekonomi di darat pun, dengan ekspansi Tana Bone ke sebelah barat, mendekati negeri-negeri di pantai Makassar, mulai dari Tana Toraja, Enrekang-Massenrempulu', ke Barru, Soppeng ri Lau, Aja'tappareng, Sidenreng dan Sekitarnya, menutup kemungkinan bagi perkembangan Tana Luwu.

²⁹Hamid, dkk. 2002. *Sejarah Daerah Sinjai*. Sinjai: Pemkab Sinjai kerjasama dengan Yayasan Kebudayaan Pusaka Sinjai, hlm. 129. Baca juga; Sarita Pawelloi, 2000. *Sejarah Lutuu*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, hlm. 110; Daeng Patunru, 1989. *Sejarah Bone*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, hlm. 32. Untuk mengetahui secara detail tentang isi dari perjanjian tersebut, baca juga; Patunru, dkk. 1989. *Sejarah Bone, ibid.*, hlm. 33-36.

pergeseran. Perang pun terjadi antara keduanya dan sudah dapat diduga kalau perang terus dilanjutkan, maka Kerajaan Bone pasti yang menjadi pemenangnya. Sadar akan keadaan dan kekuatan yang dimiliki oleh Arung Mampu yang jauh di bawah kemampuan dan kekuatan Kerajaan Bone, sehingga Arung Mampu dengan kesadaran sendiri, datang ke Kerajaan Bone menghadap pada Arumpone untuk menyatakan kekalahannya. Sebagai bukti penyerahannya, maka Arung Mampu menyerahkan *sabu kati* kepada Arumpone dan Arumpone berkata: "*Elokmu elok Arumpone; Recko Tenmu Passaranumuna Anakku Napattaraku*". Arumpone menjawab; "*Upa-lisuannoko Soronmu Arung Mampu, Mutudang Palili ri Bone, Temmuacinmai yangngi Ullaweng Matase, Patola Malam-pe. Waramparangmmu maega, muappasangeng to ri Munrimmu*". Artinya; "Kuserahkan kembali persembahanmu, wahai Arung Mampu jadilah engkau *palili* dari Kerajaan Bone, janganlah engkau menginginkan hal yang lebih tinggi dan barang indah serta harta benda yang banyak. Demikianlah hendaknya engkau pesankan kepada keturunanmu". Sesudah baginda menjawab pertanyaan Arung Mampu, maka baginda memasukkan Arung Mampu ke dalam sarungnya, atau *ri telli* atau tanda pengampunan dan penerimaan daerah Mampu menjadi *lili* (daerah bawahan) dari Kerajaan Bone.³⁰

Baginda memerintah Kerajaan Bone selama 27 tahun lamanya, dan beliau telah mempersiapkan putra mahkota untuk menggantikan beliau jika kelak turun dari tahtanya. Putra mahkota ini adalah anaknya dari isterinya yang bernama We Tenri Angka yang melahirkan beberapa orang anak. Dalam berbagai sumber disebutkan hanya tiga orang anaknya, salah satunya adalah yang bernama La Ulio Bote'E dan inilah yang dijadikan sebagai putra mahkota. Mungkin

³⁰Hamid, dkk. 2007. *Op.cit.*, hlm. 71-72. Baca juga; Daeng Patunru, dkk. 1989. *Op.cit.*, hlm.37-38

sumber-sumber sejarah tentang Bone tidak menyebutkan secara kese-luruhan dari anak beliau oleh karena anak-anak tersebut tidak mempunyai peranan penting di dalam pemerintahan Kerajaan Bone.

Ketika La Tenrisukki turun dari tahta pemerintahan Kerajaan Bone, putra mahkota (La Ulio Bote'E) yang telah dipersiapkan dan digembleng dengan ketat, naik menggantikan ayahandanya menjadi raja Bone ke-6 (1535-1560). Baginda bertahta memimpin Kerajaan Bone sejaman dengan raja Gowa Daeng Matanre Tumapparisi Kallona (1510-1546). Baginda diberi nama La Ulio Bote'E karena orangnya berperawakan pendek dan gemuk sehingga setiap kali beliau bepergian, maka pengusungnya sekitar lebih tujuh pasang. Pada masa beliau bertahta, baginda banyak melakukan pertempuran-pertempuran, baik untuk mempertahankan wilayah kerajaannya, maupun untuk memperluas pengaruh kekuasaannya ke daerah-daerah lain. Selain itu, baginda juga masih giat untuk melakukan pembinaan dan konsolidasi kerajaan-kerajaan *lili* dalam rangka memelihara dan memperkuat kekompakan serta mempertinggi semangat juang dari seluruh laskar Bone.³¹La Ulio Bote'E selama menjalankan roda pemerintahan di Kerajaan Bone, dibantu oleh seorang ahli tata negara sekaligus sebagai penasihat bernama La Mellong To Suwalle atau yang lebih populer dengan sebutan Kajao Laliddo.

Ketika Tumapparisi Kallona memerintah di Kerajaan Gowa, pernah terjadi bentrokan dengan pasukan Kerajaan Bone di Lacokkong, ketika pertama kali raja Gowa Daeng Matanre berkunjung ke Bone. Tetapi bentrokan ini tidak menyebabkan terjadinya dendam kesumat antara keduanya. Bahkan sebaliknya,

³¹Daeng Patunru, 1989.*Op-cit.*, hlm. 38. Baca juga; Abu Hamid, dkk. 2002.*Sejarah Daerah Sinjai*. Hlm. 129

antara kedua kerajaan ini terjalin persahabatan yang cukup erat. Hal ini dapat dilihat, ketika Kerajaan Bone menyerang Kerajaan Wajo, dimana Kerajaan Gowa tampil membantu Kerajaan Bone. Kerjasama ini sebenarnya oleh Kerajaan Gowa dimaksudkan sebagai taktik untuk menggalang simpatik dari kerajaan besar maupun terhadap kerajaan kecil. Tujuan ini dilakukan karena pada saat itu, Kerajaan Gowa sudah menjadi incaran pendatang dari luar (negera asing atau Eropa).

Persahabatan antara keduanya lebih diperkuat lagi setelah setahun raja Gowa kembali dari Bone lalu mengadakan suatu perjanjian yang disebut *Ulu Kanaya di Tamalate*. Dalam Penandatanganan perjanjian ini, dihadirkan pula alat kebesaran Kerajaan Bone, *La Tea ri Duni* dan alat kebesaran Kerajaan Gowa *Sudanga*. Perjanjian ini oleh orang Bone disebut *Sitettongenna Sudanga dan Latea ri Duni*. Dan beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa perjanjian itu isinya adalah sebagai berikut;

1. *Narekko engka perri'na Bone, maddaungngi tasie na-ola MangkasaE, nakko engka perri'na Gowa mak-kumpellei buluE naola to BoneE.*
2. *Tessinawa-nawakki, tessi patingarai kanna Bone-Gowa, tessiacinnaiyangngi ulawengMatase, patola malampe.*
3. *Iyasi somperengngi Gowa, iyasi manai ada torioloe, iyasi soperengngi Bone. Iyasi manai ada torioloe lettu ri torimurinna.*
4. *Nigi-nigi temmringerrang riada torioloe, mareppai urik-kurinna, lowa-low'a'na, padai ittello riaddappaseng-nge ri batua ri tanae.*

Artinya:

1. Sekiranya orang Bone mengalami kesukaran, maka membentang luaslah lautan untuk diarungi orang Makassar menuju ke Bone untuk membantu. Sekiranya orang Makassar

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

mengalami kesukaran, maka meratalah gunung untuk dilalui oleh orang Bone menuju ke Gowa untuk membantu.

2. Tak akan saling berperasangka jelek satu dengan lainnya, tak akan saling mendatangkan peperangan antara Bone dengan Gowa, tak akan saling mengingini sesuatu yang berharga yang sukar dicari taranya bila salah memilikinya.
3. Siapa yang mengendalikan Gowa, ia lagi pusakai janji orang dahulu.
4. Siapa-siapa yang tak ingat janji orang dahulu, pecah berantakan periuk belangnya, negerinya dihempaskan di atas batu.³²

Kalau disimak isi perjanjian tersebut di atas, sangat baik tujuannya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ternyata perjanjian ini sering dilanggar oleh kedua pihak. Terutama pelanggaran dilakukan ketika telah terjadi pergantian pimpinan atau raja pada kedua kerajaan tersebut. Kondisi damai terjadi antara kedua kerajaan ini berlangsung cukup lama sampai masa pemerintahan raja berikutnya. Setelah La Ulio Bote'E mengendalikan pemerintahan Kerajaan Bone selama 25 tahun lamanya, maka beliau mengundurkan diri, lalu menyerahkan kendali pemerintahan kerajaan kepada anaknya yang bernama La tenrirawe BongkangngE. La UliO Bote'E setelah meninggalnya diberi gelar anumerta *matinroE ri Itterung*.

La Tenrirawe BongkangngE (1568-1578) memiliki sifat-sifat yang jujur, baik hati, pemurah dan lain-lain. Pada masa beliau memerintah di Kerajaan Bone, beberapa daerah bergabung dengan Kerajaan Bone antaranya; Ajangale, Awo, Teko, Balieng, dan pada saat itu pula, raja Tellulimpoe datang dakan senampang

³²Hamid, 2007.*Op.,cit.*, hlm. 75-76. Baca: Dg.Patunru,1989.*Op.,cit.*, hlm. 38; Ali, 1986.*Op.,cit.*, hlm. 16

di Kerajaan Bone. Pada masa pemerintahan beliau, berulang kali kerajaan ini diserang oleh kerajaan untuk menggabungkan daerahnya sebagai bagian dari Kerajaan Bone. Raja ini pula yang mulai membentuk *tomakkajen-nangnge* (pengawas), *joa anakarung* (pasukan anak bangsawan) dan kelompok tukang, beliau pula yang mengadakan senampang di Kerajaan Bone. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berulang kali diserang oleh Kerajaan Gowa. Serangan yang dimaksud itu adalah;

1. Penyerangan Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bone di daerah Meru. Akhir dari pertempuran ini adalah dicapainya suatu persetujuan yang dikenal dengan nama *jori dewataE ri Tangka*.
2. Serangan kedua terjadi di daerah Cellu, dimana pimpinan pasukan Kerajaan Gowa adalah raja Gowa sendiri yaitu Daeng Bonto. Pertempuran ini terjadi kurang lebih lima hari lamanya dan setelah itu pasukan Kerajaan Gowa mengundurkan diri karena pimpinannya terluka.
3. Pasukan Kerajaan Gowa kembali mengadakan serangan ke WalannaE (sekitar SibuluE sekarang). Pertempuran berlangsung tujuh hari dan setelah itu, pasukan Kerajaan Gowa mengundurkan diri karena rajanya terserang penyakit yang menyebabkan beliau wafat setelah tiba di Kerajaan Gowa.
4. Diperkirakan dua bulan setelah serangan tersebut di atas (poin 3) dilakukan oleh Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bone, maka Kerajaan Gowa kembali melakukan serangan yang berpangkalan di Pappolo yang dipimpin oleh Raja Gowa Tunibatta atau nama aslinya I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Raja Gowa ke-11. Serangan ini sempat membuat pasukan Kerajaan Gowa kewalahan hingga memasuki

benteng atau Lalebbata, dan sempat membakar sebagian Kampung Bukaka (*tello sipuena Bukaka*). Berselang beberapa waktu lamanya, maka kembali pasukan Kerajaan Bone dapat memukul mundur pasukan Kerajaan Gowa. Bahkan dalam pertempuran ini, raja Gowa Karaeng Data dapat dibunuh oleh pasukan Kerajaan Bone. Mayatnya kemudian dibiarkan tergeletak di tempat pertempuran karena ditinggalkan oleh laskarnya dan para pemimpinnya kembali ke Gowa.³³

Mayat raja Gowa yang ditinggalkan oleh pimpinan dan laskarnya di medan laga, dikembalikan ke Gowa atas inisiatif raja Bone setelah mendapat pertimbangan dari penasehatnya yang bernama La Mellong atau Kajao Laliddo. Di bawah pimpinan empat orang Arung terkemuka dari Kerajaan Bone, maka mayat baginda di bawa ke Gowa. Beliau hanya empat hari lamanya memerintah Kerajaan Gowa, akhirnya beliau wafat karena dipenggal kepalanya dalam perang tersebut. Oleh karena itu, beliau diberikan gelar anumerta *Tunibatta* artinya; raja yang dipancung kepalanya. Setelah selesai pemakaman jenazah beliau dilaksanakan, dilangsungkanlah suatu perundingan di Kampung Caleppa antara raja Bone bersama Kajao Laliddo dan Mangkubumi Kerajaan Gowa, Daeng Padulung. Dalam perjanjian ini, Kajao Laliddo memainkan peranan penting dengan mengemukakan tuntutan-tuntutannya:

1. Gowa harus mengembalikan negeri-negeri yang terletak di daerah lembah sungai WalanaE sampai pada batas barat dan berbatas pada negeri Ulaweng di sebelah timur.
2. Daerah sebelah utara sungai Tangka, menjadi daerah

³³Patunru, 1969. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebu-dayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, hlm.14. Baca juga; Muh. Ali. 1986.*op.,cit.*,hlm. 20; Mattulada, 1999.*Op.,cit.*, hlm. 79.

kekuasaan Bone, dan daerah sebelah selatan sungai Tangka tetap di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa.

3. Gowa mengembalikan Cenrana kepada Bone.³⁴

Perjanjian tersebut di atas, telah membawa angin segar tentang hubungan keduanya selama beberapa tahun lamanya, terutama pada masa awal dilaksanakannya perjanjian yang dimaksud. Kondisi ini lebih banyak disebabkan karena terjadinya pergantian raja Gowa ke-11 ke peng-gantinya yang bernama I Manggorai Daeng Mamatte, Karaeng Bontolangkasa (1565-1590) sebagai raja Gowa ke-12. Di samping itu, antara raja Bone La Tenrirawe Bongkangnge dengan raja Gowa yang baru diangkat adalah bersahabat karib. Persahabatan ini terjalin karena raja Gowa ke-12 pernah tinggal di Bone dan mendapat perlindungan dari beliau raja Bone akibat suatu kesalahan yang pernah dilakukan di Kerajaan Gowa. Dan ketika pelantikan raja Gowa ke-12 ini, raja Bone La Tenrirawe Bongkangnge bersama para pembesarnya menghadiri acara pelantikan tersebut.

Kondisi dan masa pemerintahan La Tenrirawe Bongkangnge terhitung baik karena selalu memenangkan peperangan, baik terhadap Luwu. Kendati demikian, beliau tidak pernah kehilangan sikap waspada dan selalu menjaga dan memperkuat diri. Bentuk Mawas diri tersebut diwujudkan dalam bentuk menjalin kerjasama, khususnya dengan Tana Wajo dan Soppeng yang berada dalam pengaruh Kerajaan Gowa. Serta Tellu LimpoE (Tondong, Bulobulo dan Lamatti) di sebelah selatan Bone yang berada dalam perlindungan Gowa. Dalam perkembangan kemudian, Kerajaan

³⁴Mattulada, 1999.*Op.,cit.*, hlm.97; Baca : Muh. Ali.1986.*Op.,cit.*, hlm.19-20; Patunru,1989.*Op.,cit.*,hlm. 50-51; Daeng Patunru, 1969.*Op.,cit.*,hlm.15-16

Bone men-jalin kerjasama dengan tiga kerajaan utama di daerah Bugis, yaitu; Bone, Soppeng dan Wajo dalam suatu Perjanjian yang disebut *TellumpoccoE* (LamungpatuE ri Ritimurung), yang dilaksanakan pada tahun 1582.³⁵ Isi perjanjian itu dalam bahasa Indonesia, adalah:

"Negara kita berikatan (bersekutu) laksana *parajo* (tali yang dipakai mengikat pada batang bajak pada luku; tidak putus-putusnya saling bergandengan dan bersandaran, tidak saling mendustai; tidak saling melakukan yang tidak jujur; berkata dalam suasana saling mempercayai, saling mengingatkan di dalam hal kekhilafan; saling menerima peringatan; tidak saling menunggu (membiarkan kekhilafan masing-masing; tidak saling mencabuti tanam-tanaman); tidak merusakkan masing-masing yang telah diatur; tidak saling menanam kebun kita masing-masing; artinya tidak boleh melanggar hak masing-masing; tidak saling menyapu sampah kita masing-masing; artinya tidak saling membuka kesalahan kita masing-masing; tidak saling menyembunyikan diri dalam semak-semak(tidak saling membohongi); tidak saling menahan (melindungi pelarian kita masing-masing); jika ada orang yang bersalah lari masuk ke dalam suatu negeri, lantas ada orang hendak menangkapnya, maka janganlah diberi perlindungan yang bersalah itu; tidak saling menahan orang kita masing-masing yang bersalah; baiklah kita masing-masing menundukkan orang yang keras kepala; baiklah kita mengebiri kerbau jantan kita masing-

³⁵Daeng Patunru, 1983.*Sejarah Wajo*, Ujung pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, hlm. 51. Peristiwa tersebut dihadiri oleh Tosualle, Kajao Laliddo dan Tomaddualeng. Tujuan politik dari perjanjian *LamungpatuE Ri Timurung* adalah hakekatnya untuk menentang politik dari raja Gowa yang sudah lama senantiasa berusaha untuk menanam kekuasaan atau pengaruhnya di tanah-tanah Bugis khususnya dan Sulawesi pada umumnya.

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

masing (menundukkan orang yang kepala batu atau berani melawan); tidak slaing merebahkan atau merusak atau melanggar adat kita masing-masing; tidak saling memukul budak kita masing-masing (tidak boleh memukul budak orang tanpa sepengetahuan tuannya); tidak saling mengambil bicara kita masing-masing atau tidak saling mencampuri urusan kita masing-masing; tidak saling (berusaha) memadamkan (menghapuskan) kebesaran kita masing-masing; baiklah kita saling menahan di luar, tidak saling menahan di dalam; artinya hanya boleh mperluas wilayah kita di luar lingkungan dari negeri kita yang telah bersekutu, tidak boleh memperluas ke dalam, umpamanya Bone tidak boleh mengambil sebahagian wilayah Wajo atau Soppeng atau sebaliknya atau janganlah kita saling mengihtarkan peperangan, jangan orang bodoh mengakibatkan kita berselisih ;jangan orang bodoh mengadu dombakan kita; jangan biarkan orang luar mengatur kita; Jangan kita saling mematahkan semangat kita masing-masing (jangan kita saling menolak permintaan akan jangka waktu yang dibutuhkan untuk berpikir sebelum mengambil sesuatu keputusan); Jangan kita saling menyembunyikan barang kita masing-masing; (baiklah kita memerikan barang kita masing-masing yang terang milik kita); jangan kita saling membagi anak-anak (jika umpamanya budak perempuan dari Bone diperisterikan oleh seorang budak laki-laki dari dari Wajo, maka semua anak yang dilahirkan dimiliki oleh budak perempuan dari Bone, tidak boleh dibagi antara kedua budak yang memiliki itu); Jangan saling membawakan kita ke dalam hal yang kita tidak sukai masing-masing; Tidak saling membeli budak kita masing-masing; jangan kita saling mempercayai jikalau ada pembicaraan (perjanjian) kita, jika bukan *suro ri bateng* (utusan pribadi) yang membawa hasil perjanjian itu; orang yang mempercayai jua, mati terinjak oleh kerbaunya (mati sia-sia), walaupun dia anak

raja; kita saling menghidupkan bangkai ayam kita (dalam usaha masing-masing menegakkan kembali negeri kita yang dirusakkan oleh musuh, baiklah kita tolong menolong); (jika) berenang kita saling berpegangan (saling memberikan pertolongan); jika kita tenggelam kita saling membantu; jika kita hanyut kita sama-sama saling mendamparkan diri kita bersama; kita bersama (menikmati) keadaan yang baik dan kita sama-sama menderita yang buruk atau yang pahit; sama-sama mati sama-sama hidup, tidak dimakan api, tidak terbawa-bawa oleh keburukan tanah (penyakit, banjir, gempa bumi, kerusakan panen dan sebagainya), jangan dibawa oleh orang mati persekeluargaan negeri kita, janganlah terbatas pada suatu generasi saja, akan tetapi kekal adanya; walaupun langit runtuh, peristiwa tenggelam, persahabatan negeri-negeri kita tidak akan terurai; siapa-siapa meninggalkan perjanjian, akan pecahlah

³⁶Daeng Patunru, 1983. *Sejarah Wajo*, Makassar : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, hlm.50-51; Baca juga: Pananrangi Hamid, 1991. *Sejarah Kabupaten daerah Tingkat II Soppeng*, Ujung Pandang: Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, hlm.122-123; Dalam Amir Syarifuddin, 1989, *Perjanjian Antar Kerajaan Menurut Lon-tarak: Mengungkap Salah Satu Aspek dalam Sejarah Hukum Internasional Adat AbaXV-XVIII Di Sulawesi Selatan*, hlm.355-357 agak berbeda dengan bunyi perjanjian yang dimaksud; (dalam bahasa Indonesia), [Di tahun 1120 Hijriah atau seribu tujuh ratus delapan tahun Era, empat malam turunnya Mesek, Mei, di hari Sabtu, empat belas hari turunnya Safar, duduk bersama tiga negeri sekerabat, Bone, Wajo, Soppeng. Ada pun yang disepakati bertiga (untuk) dijadikan pematang, peninggalannya *MatinroEri Bonto-alak*, yaitu jika perkaranya terjadi di Bone, di Bone diputuskan, di Wajo perkaranya terjadi, di Wajo diputuskan, di Soppeng perkaranya terjadi, di Soppeng diputuskan. Jangan putusan itu simpang siur. Demikian pula jika orang Bone berselisih dengan orang Wajo, duduk bersamalah *pakbicara* (hakim) nya orang Bone dan Wajo memutuskan persengketaan kedua pihak. Ataukah orang Wajo berselisih dengan orang Soppeng, duduk bersamalah *pakbicaranya* orang Wajo dan Soppeng keduanya, memutuskan persengketaan kedua pihak. Ataukah orang berselisih dengan orang Bone, makaduduk pulalah *pakbicaranya* masing-masing untuk memutuskan persoalan kedua pihak. Dan apabila telah ada keputusan yang ditetapkan, cepatlah menyampaikan sebagai pegangan bagi kerabatmu

bagaikan piring, hancurlah bagaikan telur tanah tempat duduknya, semoga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.³⁶

Setelah perjanjian tersebut diucapkan, maka ketiga raja yang bersekutu itu masing-masing menjatuhkan batunya di atas telur. Dan seluruh rakyat bersorak dengan riuh rendah, sesudahnya barulah perjanjian itu ditanam, lalu mereka menamakan negerinya *MattellumpoccoE* (tiga besar). Perjanjian ini dilangsungkan di Kampung Bunne, daerah Timurung, Bone dalam tahun 1582. Perjanjian inilah yang dikenal dengan nama *LamumpatuE Ri Timurung*. Perjanjian antara ketiga kerajaan ini membawa pengaruh yang cukup besar bagi kepentingan masing-masing. Setidaknya ketiga kerajaan itu tidak akan saling menyerang dan senantiasa mempertahankan diri terhadap serangan kerajaan lokal lainnya. Selain itu, penggabungan ketiga kerajaan itu melalui perjanjian persaudaraan akan mempunyai inflikasi khusus bagi pembinaan dan pengembangan serta stabilitas politik masing-masing kerajaan.

Kalau kita simak lebih jauh tulisan Amir Syarifuddin, 1989, dikutip dari *Lontarak* Andi Muhammad Ali I, hlm. 50-51, disebutkan bahwa dua kali diperbaharui perjanjian itu. Pembaharuan perjanjian yang pertama dilakukan di Istana Latimojong, Cenrana dan merupakan pembaharuan perjanjian atau pengukuhan kembali perjanjian *TellumpoccoE* yang juga diikuti oleh Kerajaan Luwu. Isi pengukuhan perjanjian *TellumpoccoE* itu adalah:

[Pasal yang menjelaskan pada 1121 Hijrah Nabi kita Muhammad

(pihak-pihak yang ber-sengketa).Inilah pembicaraan yang disepakati oleh mereka bertiga, Bone, Soppeng dan Wajo, apalagi karena (ketetapan) yang ditinggalkan oleh *MatinroE ri Bontoalak*, lagi pula karena kesepakatan ketiga negeri sekerabat telah meneguhkannya. Barang siapa yang tidak mengikuti perjanjian ini, dia tidak akan menemukan kebaikan dunia akhirat, dia pula yang bersama-sama kita hadapi... (?)]. Dikutip dari *Lontara* Bone milik Andi Muhammad Ali I, hlm. 83 dan *Lontara* Bone II, hlm.44-45.

SAW, tahun Ha hari bulan Juni satu malam bulan Rabiulakhir pada hari Senin, maka duduk bersamalah kembali *TellumpoccoE* di Cenrana di rumah bernama Latimojong. Diteguhkan kembali persetujuan di Timurung. Yang juga disepakati *TellumpoccoE* adalah menyekerabatkan negeri di Luwu dengan negeri *TellumpoccoE*. Maka sekerabatlah negeri mereka maupun penguasanya. Dan masih itu juga, perjanjian ri Timurung yang disepakati oleh empat sekerabat, Bone, Sop-peng, Wajo dan Luwu. Adapun yang diputuskan untuk dijadikan pematang, peninggalan *MatinroE ri Bontoalak*, yaitu, jika perkaranya muncul di Bone, di Bonelah diputuskan. Perkaranya muncul di Wajo, di Wajolah diputuskan, di Soppeng muncul perkaranya, di Soppenglah diputuskan, di Luwu muncul perkaranya, di Luwulah diputuskan. Janganlah putusan itu simpang siur. Apakah orang Bone, apakah orang Wajo, apakah orang Soppeng, apakah orang Luwu, salah satunya yang berperkara mereka empat sekerabat. Masih tetap seperti perjanjian di Timurung, yaitu dengan menduduk-kan bersama *pakbicara* (hakim), masing-masing pihak yang berperkara, agar mereka mempertimbangkan kedua pihak. Dan, mereka yang berperkara itu jugalah yang diputuskan persengketaannya kedua pihak. Dan jika ada perkara yang telah diputuskan, maka saling dijalan-kan oleh oleh mereka (hakim) sekerabat apa yang telah diputus. Inilah perjanjian yang dikukuhkan oleh keempat negeri sekerabat, Bone, Soppeng, Wajo, dan Luwu. Lagi pula diteguhkannya peninggalan *MatinroE ri Bontoalak*. Inilah perjanjian yang tidak terbawa orang keluar, sampai ke akhirat kesekerabatan keempat negeri].³⁷

Pada sisi lain, bahwa lahirnya perjanjian tersebut tentu saja mengusik keberadaan dan pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa di Tana Bugis sehingga raja Gowa yang bernama Manggorai Daeng

³⁷ Syarifuddin. 1988. *Op.,cit.*, hlm. 358-359

Mammeta Karaeng Bonto Langkasa menganggap hal itu sangat serius. Beliau menganggap bahwa persekutuan itu benar-benar politik tantangan dari Bone, Soppeng dan Wajo. Olehnya itu, setahun kemudian sesudah terwujudnya perjanjian itu, maka raja Gowa bersama raja Luwu mulai mengadakan serangan terhadap Wajo, akan tetapi serangan pertama itu dapat ditahan sehingga tidak berhasil. Setahun kemudian, Kerajaan Gowa kembali mengadakan serangan untuk kedua kalinya terhadap Wajo, akan tetapi hal itu juga tidak berhasil. Memasuki tahun ketiga (1585) pasca perjanjian itu, Kerajaan Gowa mulai menyerang Kerajaan Bone dan peperangan ini memakan waktu yang cukup lama dan melelahkan antara kedua pihak.³⁸ Dalam tahun 1590, raja Gowa kembali menyerang Wajo, akan tetapi di dalam perjalanannya menuju ke Wajo, beliau diamuk dalam perahunya oleh seorang saudara susuannya (saudara sesusuannya) yang bernama Lolo Tammakkana. Beliau meninggal pada waktu itu juga dan oleh sebab itu beliau digelar Karaeng Tunijallo (raja yang diamuk).

Setelah dua tahun usia perjanjian *TellumpoccoE*, maka raja Bone La Tenrirawe BongkangngE menderita penyakit yang cukup keras yang mengakibatkan baginda wafat. Namun sebelum baginda wafat, beliau masih sempat mengumpulkan rakyatnya untuk menyampaikan suatu wasiat atau titah yang berbunyi: Kami berpesan pada rakyat Bone, bahwa besok lusa kami wafat, maka saudara kami La Inca menggantikan kami menduduki tahta Kerajaan Bone". Setelah itu; baginda memegang tangan La Inca dan bertitah;

Adindaku, kakanda ini sedang sakit keras. Kalau kami sampai sampai meninggal dunia karena penyakit kami ini, adindalah kami tetapkan menggantikan kami. Oleh sebab itu

³⁸Daeng Patunru, 1985,*op.cit.*, hlm.52

dari sekarang-sekarang, adinda perbaikilah perangai dan tingkah laku adinda untuk bersedia memikul pertanggungjawaban yang mulia tetapi sangat berat. Kemudian dari pada itu, kami nasehatkan pula kepadamu, ialah bilamana adinda telah menjadi Arumpone nanti, harapan kami supaya adinda sudi mengawini iparmu Arung Timurung itu (permaisuri kami itu yang sebentar lagi akan menjadi janda setelah kami mangkat). Angkatlah dia itu menjadi permaisurimu nanti, semoga adinda mendapatkan keturunan dari-padanya. Kami menganjurkan yang demikian itu, karena dia itu jarang tandingannya, dan sukarlah akana didapati seorang perempuan bangsawan seperti dia itu. Kiranya dengan dia itu, dapatlah adinda nanti memimpin pemerintahan Kerajaan Bone ini.³⁹ Setelah selesai baginda menyampaikan titahnya itu, maka ba-ginda pun wafat setelah menduduki tahta Kerajaan Bone selama tigapuluh tahun lamanya.

Setelah selesai pemakaman baginda, dilantiklah La Inca menjadi raja Bone ke-8 (1584-1595) menggantikan saudaranya. Baginda kemudian mengawini iparnya atas titah kakaknya (La Tenrirawe BongkangngE). Dari perkawinan baginda itu lahir dua orang anak masing-masing bernama La Tenripale To Akkepeang dan We Tenrijello MakkalaruE. Selama masa pemerintahannya, terjadi banyak kerusuhan di dalam masyarakat sehingga banyak bangsawan Bone me-ninggalkan kerajaan ini untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Antara lain baginda

³⁹Daeng Patunru, 1989, *Sejarah Bone, op., cit.*, hlm.59; Baca juga: Muhammad Ali, 1986. *Op., -cit.*, hlm.23

⁴⁰Ali, 1986. *Op., cit.*, hlm. 24. Sedangkan dalam Patun-ru, 1989. *Op., cit.*, hlm. 60, dijelaskan agak berbeda persoalan nama Arung Palenna dinamakan La Panaungi bukan La Patuwongi yang dihukum buang ke daerah Sidenreng. Setelah menjalani masa pembuangan beberapa waktu lamanya, kembalilah ia ke Bone untuk memohon ampun kepada Arumpone, agar diizinkan kembali

memurkai Arung Palenna La Patuwongi⁴⁰ Topawawoi dan mengasingkannya ke daerah Sidenreng.

Kemudian menyusul lagi beberapa raja-raja bawahan Kerajaan Bone, antaranya Arung Pacing, Arung Awangpone To Saliyu Riawa, dan *Paddanreng* Palakka yang bernama Tosaliyu Riase mengalami nasib buruk yang sama, yaitu mereka dibunuh atas suruhan Raja Bone La Inca. Kondisi itu menyebabkan rakyat Kerajaan Bone tidak lagi tenteram hidupnya. Terutama yang menghancurkan persatuan dalam Kerajaan Bone saat itu adalah karena mensifatkan dalam pemerintahannya dengan *salossotoni tau tessalosserehmae, batettoni tau teppatte'rehmae* artinya; Direndahkannya derajat yang di atas, dan ditinggikannya derajat orang yang di bawah.

Masa pemerintahan La Inca raja Bone ke-7, hampir sama dengan perangai raja Gowa ke-13, I Tepu Karaeng Daeng Parabbung (1590-1593). Kondisi Kerajaan Gowa pada masa itu mengalami kekacauan dimana-mana karena perbuatannya yang tidak terpuji. Baginda memecat pembesar-pembesar kerajaan, antara lain *Tumailalang* yang bernama I Daeng Tamacinna, membagi-bagi hamba raja dan menetapkan *Bate Salapanga* di Gowa menjadi *Sipue Bate*; melarang rakyat berbakti kepada kedua kakaknya, membunuh orang walaupun tidak bersalah. Oleh sebab itu, maka ba-nyaklah orang Jawa (maksud semua orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dll.) meninggalkan ibukota kerajaan Gowa.

Selain itu, juga banyak anak-anak raja dari Gowa pergi meninggalkan Gowa, yang tidak pergi adalah Karaeng Matoaya atau Mangkubumi Kerajaan Gowa / Raja Tallo I Malingkaan

tinggal di Bone seperti sediakala. Tetapi permohonannya itu ditolak oleh Arumpone dan memerintahkan agar segera meninggalkan Bone. Arung Palenna itu pun segera menyingkir pergi tinggal di BukiE. Di sanalah arung yang malang ini disusul dan dibunuh atas suruhan raja Bone La Inca itu.

Daeng Nyonri Karaeng Katangka, Karaeng Barombong, Karaeng Data, Karaeng Allu dan sebagainya. Berhubung karena perbuatan-perbuatannya yang buruk itu, maka rakyat Gowa menurunkannya dari tahta kerajaan, yaitu setelah kira-kira tiga tahun lamanya baginda mengendalikan pemerintahan di Kerajaan Gowa. Setelah baginda turun dari tahtanya, maka ia pergi meninggalkan Gowa dan pergi untuk menetap di Luwu. Di daerah itu baginda akhirnya memeluk agama Islam. Oleh karena itulah sehingga rakyat Gowa memberinya gelar Karaeng Tunipasulu atau raja yang dikeluarkan atau diturunkan. Dari Luwu, baginda lalu pergi dan tinggal di Buton dan wafat pada tanggal 5 Juli 1617.⁴¹

Meskipun dalam kenyataannya bahwa masa pemerintahan La Icca, Kerajaan Bone mengalami banyak kegoncangan akibat ulah perbuatan beliau. Salah satunya melakukan pemerkosaan terhadap salah seorang pengantin wanita ketika yang bersangkutan datang ke istana untuk *makkasiwiang*. Mungkin karena tertarik atas kecantikan sang pengantin baru sehingga tertarik kepadanya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ketika perbuatan bejat itu dilakukan oleh baginda, sang suami memergokinya. Baginda lalu murka dan memburu suami perempuan itu hingga

⁴¹Daeng Patunru, 1969, *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, hlm. 18. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang menggantikan beliau adalah saudaranya yang bernama I Mangngerangi Daeng Manrabbia sebagai raja Gowa ke-14 (1593-1639). Saat itu usianya masih sangat muda sehingga roda pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi Kerajaan Gowa (I Malingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka) hingga usianya sudah dewasa. Mangkubumi Kerajaan Gowa inilah yang untuk pertama kalinya menerima agama Islam (malam Jumat 9 Jumadilawal 1014 Hijriah setujuh dengan tanggal 22 September 1605). Setelah memeluk agama Islam, maka diberi nama Islam Sultan Abdullah Awalul Islam. Kira-kira pada saat itu juga Baginda raja Gowa menerima Agama Islam lalu diberi nama Sultan Alauddin.

ke luar istana, namun tidak berhasil menangkap suami perempuan itu. Karena merasa kesal terhadap suami wanita itu, sebagai tempat pelampiasannya, maka perempuan yang telah dinodai itu lalu dibunuh oleh baginda. Setelah itu, beliau lalu pergi menyulut api dan membakar rumah-rumah penduduk, sehingga separuh perkampungan di Lalebata (Watampone) habis terbakar, sampai di Matajang sebelah Kampung Macege. Atas kejadian itu menyebabkan rakyat kocar kacir tidak menentu untuk menyelamatkan diri. Hanya orang-orang bangsawan yang ada di dalam Lalebata yang masih tinggal dan memikirkan apa yang terjadi.⁴²

Akibat pembakaran yang dilakukan oleh baginda menyebabkan Arung Majang ikut campur dalam persoalan itu. Beliau lalu memanggil kemanakannya yang bernama Dammalaka, dari pertemuan keduanya, disepakati untuk menurunkan baginda dari tahta Kerajaan Bone. Kata sepakat yang telah diambil segera dilaksanakan dengan memerintahkan seorang utusan untuk menyampaikan hal itu kepada baginda raja Bone agar supaya melepaskan jabatannya sebagai raja Bone. Setelah utusan sampai di Lalebata, didapatinya baginda masih berada di halaman sebuah rumah yang hangus karena habis terbakar. Belum habis kata-kata yang ingin disampaikan utusan Arung Majang, maka utusan itu segera dibunuhnya. Setelah itu baginda melanjutkan pembakaran rumah-rumah penduduk yang ada di Lalebata. Sementara itu, *arung* Majang bersama Dammalaka segera berangkat ke Lalebata (Watampone), di sana Arung Majang mendapati Raja Bone La Icca sudah kelelahan karena telah mengamuk ke sana kemari melawan orang banyak yang telah menewaskan banyak orang. Sebab terlalu lelah,

⁴²Andi Palloge, 1990.*Op.,cit.*, hlm.95-96. Baca juga: A.M. Amir. 1986. *Op.,cit.*,hlm. 24.

akhirnya raja Bone duduk bersandar pada tangga istananya. Arung Majang segera turun dari tandunya dan segera menghampiri baginda raja Bone untuk memegang dan mengalas kepalanya dengan telapak tangannya. Setelah itu baginda akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka beliau digelar *matinroe ri adde-nenna*.⁴³

D. Terbentuknya Hadat Tujuh

Masa pemerintahan raja penggantinya (raja Bone ke-9), tidak banyak yang diketahui dan yang pasti bahwa beliau memerintah kurang lebih tujuh tahun lamanya (1596-1603). Suatu ketika baginda berangkat ke Bulukumba dan di sana beliau terserang penyakit lalu wafat. Itulah sebabnya sehingga beliau digelar *matinroe ri Bettung*. Beliau digantikan oleh We Tenrituppu (anaknyanya sendiri) menjadi raja Bone ke-10. Kerajaan Bone pada masa ini mengalami banyak kemajuan, terutama dalam bidang pemerintahan, yaitu mengubah status *ArungMatoa* menjadi *Arung Pitu* atau hadat tujuh di Kerajaan Bone, yaitu;

1. *Matoa Tibojong* ditunjuk dengan jabatan Hadat Tujuh yang selanjutnya disebut Arung Tibojong.
2. *Matoa Ta'* ditunjuk dengan jabatan Hadat Tujuh yang selanjutnya disebut Arung Ta'.
3. *Matoa Tanete Riawang* dengan jabatan Hadat Tujuh, selanjutnya disebut Arung Tanete Riawang.
4. *Matoa Tanete Riattang* dengan jabatan Hadat Tujuh, selanjutnya disebut Arung Tanete Riattang.
5. *Matoa Macege* ditunjuk dengan jabatan Hadat Tujuh yang selanjutnya disebut Arung Macege.

⁴³Abu Hamid, dkk. 2007. *Op.,cit.*, hlm. 81. Baca juga; Andi Palloge, 1990. *Op.,cit.*, hlm. 97; Andi Muhammad Ali, 1986. *Op.,cit.*, hlm. 25; Daeng Patunru, 1989. *Op.,cit.*, hlm. 64

6. *Matoa* Ujung ditunjuk dengan jabatan Hadat Tujuh yang selanjutnya disebut Arung Ujung.
7. *Matoa* Pongceng ditunjuk dengan jabatan Hadat Tujuh yang selanjutnya disebut Arung pongceng.⁴⁴

Perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan beban tugas yang akan diembannya kelak sesuai dengan yang diamanahkan oleh raja putri kepadanya:

“Tuan-tuan sekalian dari jabatan *matoa*, kami angkat kederajat *arung*. Dengan demikian hendaklah tuan-tuan lebih meningkatkan usaha pertanian kami, menerima utusan-utusan yang menjadi tamu kerajaan, terutama sekali mengingat bahwa kami ini seorang raja putri. Akan segala isi *salassa* (istana) yang telah terpenjar pergi entah kemana supaya tuan-tuan kumpulkan, panggillah sekalian supaya kembali. Kami telah mengangkat tuan-tuan sekalian menjadi *Arung Pitu* atau Hadat Tujuh. Jangan sampai berbuat hal-hal yang menyebabkan orang-orang memandang enteng Tana Bone ini. Atau dengan kata lain jangan sampai oleh karena tindakan-tindakan tuan-tuan orang akan memandang bahwa Tana Bone ini tidak baik (*temmula wiring tana Bone*). Atau semisal perahu tumpangan, jangan sampai tuan-tuan menginjak pinggir Tana Bone ini, sebab yang demikian itu dapat menyebabkan Tana Bone menjadi miring lalu terbalik sehingga kita sekalian menjadi celaka. Jangan tuan-tuan mengusir orang keluar meninggalkan negeri atau *temmu-addippang massu-reng*. Ingatlah tuan-tuan sekalian bahwa *akkarungeng* atau tanah-tanah tempat tuan-tuan masing-masing menjadi arung, tuan-tuan tidak akan pusakakan kepada anak cucu keturunan tuan-tuan masing-masing melainkan dengan mupakat dengan kami Arumpone. Terkecuali

⁴⁴Palloge, 1990.*Op.cit.*, hlm.98-99

kalau ada permupakatan antara Arumpone dengan cucu *Puatta Mappayungnge*, maksudnya; cucu Arumpone La Tenrisukki raja ke-5 yang harus menentukan pantas, barulah *Akkarungeng* tuan-tuan itu diharuskan jatuh kepada anak cucu keturunan tuan-tuan.⁴⁵

Sejak saat inilah sistem pemerintahan Kawerang berlangsung dari raja Bone pertama sampai Raja Bone ke-9 La Pattawe Matinroe ri Bettung, Bulukumba. Setelah melalui periode ini, terjadi pemusatan kekuasaan dalam bentuk kesa-tuan Tanah Bone. Pada masa ini ini pemerintahan diperluas untuk menampung makin banyaknya anak bangsawan keturunan *to-manurung* yang harus diberi tempat dalam pemerintahan. Para *matoa pitu* yang sebelumnya masih menjabat anggota dewan dan juga sekaligus bertindak sebagai kepala kampung atau *wanua*, lalu ditarik ke pusat pemerintahan dan fungsinya pada wanua digantikan oleh para anak bangsawan. Ini terutama terjadi setelah *matoa-matoa* dirobah statusnya menjadi arung pitu dengan sebutan lain sebagai Hadat Tujuh atau *Ade' Pitu*. Dewan inilah yang kemudian bertindak sebagai dewan menteri Kerajaan Bone dan mereka pula yang melakukan tugas sebagai kekuasaan eksekutif, di samping sebagai penyambung lidah rakyat terhadap raja.

Dewan Hadat Tujuh Kerajaan Bone dalam perkembangannya ternyata dapat juga naik menduduki posisi raja tetapi tidak dapat menurunkan secara turun temurun kekuasaannya di wilayahnya atau *wanuanya*. Berbeda dengan dua kerajaan besar lainnya, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Balanipa, di Mandar. Misalnya; di Kerajaan Balanipa, Mandar, Dewan Hadat disebut *Sappulo Sokko* (sepuluh kopian). Fungsi *Sappulo Sokko* di Balanipa, Mandar ada tiga

⁴⁵Daeng Patunru, 1986.*Op.cit.*, hlm. 100-101. Baca juga; Andi Palloge, 1990.*Op.cit.*, hlm. 99-100; Andi Muhammad Amir; 1989. *Op.cit.*, hlm. 26-27; Abu Hamid, 2006.*Op.cit.*, hlm. 83-84.

yaitu sebagai pembantu raja atau menteri dan juga sebagai kepala pemerintahan wilayah di daerah asalnya dan fungsi tertingginya adalah jika dia berfungsi sebagai anggota Dewan Hadat yang dapat mengangkat *mara'dia* (raja) dan sekaligus dapat memberhentikannya. Sedangkan dewan hadat di Kerajaan Gowa yang disebut Dewan *Bate Salampang* (sembilan panji), juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan wilayah di daerah asalnya, juga berfungsi sebagai menteri yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahannya. Fungsi tertingginya adalah makalah ia berfungsi sebagai Dewan Hadat yang dapat menurunkan dan melantik raja yang terpilih.

Kalau diperhatikan dengan seksama, maka ada perbedaan mendasar antara kedua kerajaan ini (Kerajaan Gowa dan Kerajaan Balanipa, di Mandar) dengan Kerajaan Bone adalah bahwa di Kerajaan Gowa dan Kerajaan Balanipa, Mandar, seorang anggota Dewan Hadat tidak memungkinkan untuk menduduki jabatan sebagai *somba* dan *mara'dia*, sedangkan di Kerajaan Bone terjadi sebaliknya. Pada kedua kerajaan perbandingan tersebut di atas, tidak pernah ditemukan adanya kasus yang terjadi bahwa seorang anggota dewan hadat naik menjadi *somba* dan *mara'dia*. Sementara hal seperti itu bisa terjadi di Kerajaan Bone asalkan orang itu memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh hadat yaitu harus bangsawan murni yaitu kedua orang tuanya adalah bangsawan tinggi.

Raja-raja Sulawesi Selatan sebagian besar adalah keturunan *Tomanurung*, mereka memiliki darah khusus bangsawan tinggi dan kelompok mereka setidaknya tetap melestarikan tingkat darah tinggi ini sebagai legitimasi atau pembuktian hak sebagai penguasa. Akibatnya ada perjuangan bagi mereka untuk mendapatkan isteri semurni mungkin dan menjamin agar para isteri mereka tidak menikah di luar kelompoknya. Hal ini disebabkan oleh sebab dalam sistem kekerabatan bilateral orang Bugis dan Makassar, seorang

ibu melahirkan harus dihitung dari kedua belah pihak untuk menghitung tingkat kebangsawanan anak yang akan lahir itu. Sebagai akibat dari itu adalah bahwa pada awal abad ke-20, kaum bangsawan dan kelompok penguasa memiliki jaringan rumit dalam perkawinan dan ikatan darah yang menjamin di antara mereka, sehingga mereka membentuk suatu keluarga besar. Orang tua melihat luar kerajaannya untuk memberikan pasangan dari anak yang dilahirkan. Karena *gallarang* dan penguasa adat dan banyak *vasal* bukan keturunan *Tomanurung* atau bangsawan tinggi, para penguasa tidak menikah dengan keluarga adat atau setidaknya ini merupakan aktifitas asli. Namun ada kerajaan di Sulawesi Selatan, setidaknya di Bone, garis antara penguasa dan dewan melebur.⁴⁶

Perpaduan faktor, termasuk kecilnya daerah dan penduduk yang dikuasai oleh *Arung Pitu* sehingga memungkinkan bagi raja-raja Bone abad ke-17 untuk memusatkan kekuasaannya dan mencegah identitas khusus hadat. Keturunannya saling menikah dengan keluarga penguasa, sehingga keturunannya, hadat dan para menteri semua saling berkaitan. Namun kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, seperti; Gowa, Balanipa di Mandar dan Soppeng, tidak ada saling perkawinan antara keluarga penguasa dan keluarga hadat karena ini dicegah atau sepenuhnya dilarang. Di sinilah keseimbangan dipertahankan dan salah satu hasilnya (di Gowa) adalah bahwa keluarga penguasa mempertahankan kemurniannya dan menegakkan hak-hak khusus dengan cara khusus pula. Ketimpangan dalam perkawinan ini merupakan petunjuk bagi kelunturannya dimana sistem tertentu bisa berubah untuk menampung perubahan. Pergeseran ini juga diungkapkan

⁴⁶Sutherland. 1980. *Political Structure And Colonial Control in South Sulawesi*, (terjemahan). The Hague: Martinus Nijhoff. Hlm. 236-237

dalam struktur pusat pada upacara; di Bone, bila kelahiran sama ikatan keluarga menyatukan hadat dan penguasa, tekanan dalam status berada pada tingkat darah putih Arung Pitu dalam hadat tidak memiliki tempat tertentu. Jika kepala kampung salah satu *wanua* yang membentuk daerah inti kerajaan meninggal, posisi penggantinya dalam suatu upacara tidak selalu sama. Ini tergantung pada darah, bukan tergantung pada posisinya dalam adat. Sebaliknya di Kerajaan Gowa, karena tidak terjadi saling perkawinan, kesenioran anggota *Bate Salapang* tergantung pada status lamanya dan tidak berubah; struktur tempat duduk dalam upacara selalu sama, tergantung pada posisi daerah, bukan kelahiran penyandanginya.⁴⁷ (*)

⁴⁷*Ibid.*

BAB III

HUBUNGAN KERAJAAN BONE DENGAN BELANDA

A. Hubungan Bone dengan Belanda Pasca Perjanjian Bongaya

Kekalahan Kerajaan Gowa dari pihak Belanda dan Arung Palakka dalam perang Makassar 1666-1669, memberikan kesempatan kepada Belanda untuk turut ikut campur tangan dalam urusan kenegaraan kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut menempatkan Belanda menjadi pemegang kendali kekuasaan dan politik, sedangkan pemerintahan Makassar dibagi menjadi empat daerah pengawasan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Belanda tidak terlibat langsung mencampuri urusan-urusan pemerintahan daerah kekuasaan langsung. Dengan demikian, raja-raja lokal tampil kembali menyelenggarakan pemerintahannya di daerah kekuasaannya masing-masing sesuai dengan tradisi pemerintahan semula. Hanya saja penguasa lokal (raja-raja) harus mengakui Kompeni Belanda sebagai penguasa tertinggi mereka yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan keamanan. Oleh karena itu para penguasa lokal harus tunduk kepada Belanda sebagai pemegang kendali politik.⁴⁸Kompeni Belanda hanya memusatkan kegiatan

⁴⁸Poelinggomang,dkk. 2003. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*. Makassar: Pemda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 132-133

terpentingnya di Makassar, dan bahkan kota ini telah dipersempit wilayahnya agar gampang diawasi.

Sementara itu, Arung Palakka menganggap urusan Kerajaan Bone dan Soppeng dengan Kerajaan Gowa dianggap telah selesai. Tetapi pada sekutu-sekutu Kerajaan Gowa, hal itu belum tuntas karena ternyata banyak diantaranya yang masih tidak mau mengakui kekuasaan Belanda dan Arung Palakka di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya sekutu-sekutu itu melakukan perlawanan terhadap Arung Palakka seperti; Cenrana, Binuang, Batulappa, Sawitto dan terakhir Kerajaan Wajo ditundukkan oleh Arung Palakka pada tanggal 1 Desember 1670.⁴⁹ Setelah Wajo ditaklukkan, maka Arung Wajo di bawah ke meja perundingan di benteng Ujung Pandang pada tanggal 23 Desember 1670. Setelah penak-lukkan itu dilakukan Arung Palakka, maka pada tanggal 6 Oktober 1671, beliau juga pergi memerangi negeri-negeri Balanipa, Majene dan Campalagian dan berhasil mengalahkan dan mendudukinya. Balanipa dan yang lainnya terpaksa menandatangani *Mara'di* perjanjian di Ford Rotterdam yang disertai sumpah dibawah *Al'kitab* untuk setia kepada perjanjian Bongaya. Pada serangan-serangan pasca perjanjian Bungaya itu, *Arung* Palakka belum menjadi raja Bone (hanya pangerang). Sekalipun beliau belum menjadi raja saat itu, namun beliau telah memperlihatkan kekuatan dan kekuasaannya yang luas dan besar. Laskarnya sangat besar dan kuat melebihi laskar yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin sebagai raja Gowa.⁵⁰

⁴⁹Andaya, 198, *op. cit.*, hlm.240-241 dalam; Darwas Rasyid, 1995, *Latenritatta Arung Palakka dalam Konteks sejarah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan NULai Tradisional, hlm.203

⁵⁰Daeng Patunru, dkk. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yaya-san Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, hlm. 207

Tetapi sebelum itu, Arung Palakka membuat suatu strategi untuk mengimbangi politik adu domba Belanda dengan kebijakan awal beliau melakukan perkawinan politik antara saudara perempuannya dengan putra raja Bone La maddaremmang yang bernama La PakokoE To Wangkone Arung Timurung pada tanggal 20 Mei 1671. Dalam pemi-nangan itu dihadirkan para penguasa dari tiga kerajaan besar yaitu Kerajaan Luwu, Gowa dan Bone dan menetapkan mahar bahwa anak yang lahir dari perkawinan ini nanti akan dijadikan sebagai raja. Perkawinan ini bercorak demi kepentingan politik untuk menciptakan rasa kekeluargaan yang erat antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Perkawinan diplomasi antara bangsawan dan pemuka masyarakat dari satu negeri ke negeri lainnya dalam rangka mewujudkan basis kebersamaan dalam makn *Sempugi*.⁵¹ Beberapa bulan kemudian, Arung Palakka juga melepaskan nazarnya yang pernah diucapkan dahulu sebelum meninggalkan Sulawesi Selatan menuju ke Buton karena diburu oleh pasukan Sultan Hasanuddin. Nazar itu adalah akan mengorbankan seorang putra mahkota Kerajaan Gowa di gunung Cempalagi apabila ia dapat kembali menyelamatkan tanah Bone dan Soppeng. Korban nazar itu kemudian beliau gantikan dengan memotong kerbau sebanyak 400 ekor, 100 ekor diantaranya bertanduk emas dan 300 ekor kerbau biasa. Nazar itu dilaksanakan di *Baruga Tellu Coppo'na* (Timurung-Bone) pada tanggal 16 Oktober 1671. Pada upacara itu juga disediakan tumpeng (songkolo) yang terbuat dari beras ketan setinggi gunung Cempalagi.

Arung Palakka memang telah diberikan hak-hak istimewa oleh Belanda pasca kekalahan Kerajaan Gowa pada perang Makassar yaitu; kewenangan penuh untuk menentukan setiap

⁵¹Hamid,dkk. 2007. *Sejarah Bone*. Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 147

tamu yang ingin menghadap kepada pembesar Belanda di Ford Rotterdam harus melalui Arung Palakka. Tamu-tamu yang akan menghadap itu diperlakukan sama, baik raja-raja maupun tamu asing, kecuali pembesar Belanda. Dengan adanya ketentuan seperti itu, menempatkan Arung Palakka semakin berwibawa dan orang-orang asing merasa jengkel atas kenyataan itu.⁵² Namun demikian, dikemudian hari, Arung Palakka lebih senang tinggal di istana Bontoala daripada tinggal bersama dengan para pembesar Belanda di dalam benteng Ford Rotterdam, Ujung Pandang. Alasannya sangat sederhana bahwa beliau tidak mau didikte oleh para pembesar Belanda.

Sementara itu, Bontoala mulai dibenahi karena akan ditempati Arung Palakka dan menetapkannya sebagai kawasan pemukiman bersama segenap pasukan perang yang pimpinnya secara langsung. Dari tempat inilah direncanakan segala siasat penguasaannya atas negeri-negeri Sempugi diseluruh Sulawesi Selatan. Penetapan Bontoala sebagai wilayah pemukimannya karena letaknya di bagian timur kota Makassar, berbatasan langsung dengan Fort Rotterdam yang terletak di pantai sebelah barat. Hal ini menjadi salah satu perhitungan Arung Palakka untuk menguasai posisi strategi yang akan dipergunakan menghadapi segala kemungkinan timbulnya keadaan darurat perang. Bontoala menduduki posisi sentral untuk pengendalian benteng Mangarabombang di Tallo, di sebelah utara benteng Kalegowa, serta kawasan pantai Rotterdam dan *Vlaardingeng* yaitu tempat-tempat kedudukan Belanda dan orang Melayu di sebelah Barat Bontoala.⁵³

Melihat kekuatan dan kebesaran yang dimiliki Arung Palakka,

⁵²Massiara, 1988. *Menyingkap Tabir Sejarah dan Budaya di Sulawesi Selatan*, Jakarta: yayasan Bhinneka Tunggal Ika, hlm. 125

⁵³Mattulada, 1999. *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Makassar : Hasanuddin University Press, hlm. 229.

membuat para penguasa dan tokoh masyarakat serta masyarakat menganggap Arung Palakka bakal menduduki tahta Kerajaan Bone. Pada sisi lain, para pesaingnya menganggap hal itu berbahaya sehingga harus dirintangi dengan jalan menjatuhkan martabat dan harkat beliau. Strategi lawan politiknya adalah berusaha menculik isterinya, dan ini merupakan konspirasi politik pembesar Kerajaan Gowa dan Bone. Tanggal 2 Juli 1672, Arung Palakka datang melaporkannya ke Rotterdam bahwa isteri dan dayangnya diculik. Menurut mata-mata bahwa yang menculik adalah sekelompok pembesar dan orang terkemuka Kerajaan Gowa. Perbuatan itu dimaksudkan untuk memudarkan martabat dirinya, bahwa hal ini secara kultural dimaksudkan agar rakyat Bone dan pembesar kerajaan tidak menetakannya menjadi raja Bone. Secara kultural seseorang yang pernah mengalami kecurian dipandang tidak layak menjadi pemimpin. Hal ini dimaksudkan bahwa barang-barang miliknya saja tidak dapat ia jaga dan pelihara, apalagi kelak menjadi pemimpin untuk memelihara dan melindungi orang banyak.⁵⁴

⁵⁴Hamid, dkk. 2007.*Op.cit.*, hlm.147. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengaduan dan reaksi emosional dari Arung Palakka mendorong penguasa Kompeni berusaha untuk menenangkannya, dan berusaha mencegah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hal ini dilakukan mengingat pemerintah pusat di Batavia telah mengingat agar jangan lagi ada pertempuran darah karena biaya perang tidak ada lagi. Langkah penyelesaian yang ditempuh adalah memanggil raja Gowa, Sultan Amir Hamzah untuk datang ke Fort Rotterdam. Sultan Gowa menyanggupi untuk mengembalikan permaisuri dan dayangnya dengan mengirim orang ke Mandar untuk mengambilnya. Tetapi utusan Kerajaan Gowa itu kembali tanpa membawa isteri dan dayang Arung Palakka dengan alasan bahwa dia tidak ada di Mandar, dengan demikian dugaan Arung Palakka dianggap tidak benar. Kenyataan itu membuat Arung Palakka sangat kecewa, lalu ia bangkit dan menyatakan kepada penguasa Kompeni (ketua *atau voorzitter*) agar tidak menghalanginya untuk menghukum pembesar Kerajaan Gowa yang terlibat dalam kasus ini. Setelah menyatakan sikap itu, maka ia kembali ke Bontoala dan mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Pada bulan September 1672, Arung

Setelah diangkat menjadi raja Bone ke-14, maka lawan-lawan politiknya kelihatan mempunyai gelagat tidak baik dengan bersiap untuk melakukan perlawanan, baik orang Gowa maupun orang Bone sendiri. Dikalangan orang Bone, terdapat Arung Timurung (adik iparnya sendiri) melakukan perlawanan atas diangkatnya beliau menjadi raja Bone. Perlawanan itu dilakukan karena Arung Timurung merasa berhak juga atas tahta Kerajaan Bone untuk menggantikan ayahandanya La Maddaremmang. Itulah sebabnya sehingga ia meninggalkan Tana Bone bersama Karaeng Massepe dan kemudian bergabung dengan para pembesar Kerajaan Gowa, lalu melarikan diri ke Wajo. Kemudian meneruskan pelariannya ke Mandar, lalu ke Enrekang untuk mendapatkan perlindungan yang aman di pegunungan Tana Toraja. Dari sini beliau lalu mengirim utusan ke berbagai kepala negeri mengajak untuk bersatu melawan Arung Palakka. Kenyataan itu membuat murka Arung Palakka dan akhirnya juga Belanda, pada sisi lain La Maddaremmang sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh putranya sendiri bersama dengan Panglima Angkatan darat Tana Bone.⁵⁵ Kemurkaan Arung Palakka itu dibuktikan dengan memerintahkan orang kepercayaan yang paling dekat yaitu Arung Bakke' Todani untuk mengirim pasukannya menghadapi pasukan gabaungan dari Arung Timurung. Harapan Arung Palakka bahwa pasukan Arung Timurung dengan gampang dapat ditaklukkan,

Palakka berangkat ke Bone dengan segala kelengkapannya, dengan memobilisasi pasukan Angke untuk persiapan menghadapi segala kemungkinan meng-hadapi lawan-lawannya. Ketika tiba di Bone, Arungpone La Madda-remmang, didukung sebagian besar pembesar Tana Bone, menyerahkan tahta Tana Bone kepada Arung Palakka, dan mengumumkan bahwa beliau menempatkan Arung Palakka, To Unru sebagai anak kandungnya sendiri.

⁵⁵Mattulada, 1999, *op.cit.*, hlm. 236

tapi ternyata bahwa dia sendiri harus turun tangan memimpin perlawanan itu. Arung Palakka juga mendapat bantuan sebanyak sepuluh orang serdadu Belanda di bawah pimpinan seorang sersan. Dengan kekuatan pasukan yang besar yaitu sekitar 20.000 orang, maka pasukan Arung Timurung dengan mudahnya dapat ditaklukkan, tetapi Arung Timurung sendiri bersama Karaeng Massepe dan sebagian pasukannya dapat meloloskan diri ke pegunungan Maiwa. Tetapi tidak lama, Arung Maiwa dan Arung Timurung dapat ditangkap, sedang karaeng Massepe bersama saudara-saudaranya dapat meloloskan diri. Di daerah Duri, Karaeng Massepe bersama saudara-saudaranya dihadang oleh pasukan Arung Palakka dan dibabat habis-habisan karena tidak mau menyerah. Beliau bersama saudaranya dipenggal kepalanya lalu diantar ke hadapan Arung Palakka sebagai bukti, begitu juga isteri dan dayang-dayang Arung Palakka yang terculik dulu oleh Karaeng Massepe. Sedangkan Punggawa Daeng Pabila dari Bone dihukum mati, sementara Arung Timurung dibawa ke benteng Fort Rotterdam di bawah perlindungan Arung Palakka. Beliau tidak dihukum mati oleh karena pertimbangan, yang bersangkutan adalah adik ipar Arung Palakka sendiri.⁵⁶

Atas kejadian tersebut di atas, maka Arung Palakka menasehatkan kepada raja Gowa Sultan Amir Hamzah, untuk memberhentikan Karaeng Karunrung, Karaeng Jarannika dan

⁵⁶Jika diperhatikan dengan jelas sumber tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pelarian Arung Timurung dan Karaeng Massepe itu, sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan sikap mereka menolak Arung Palakka dinobatkan menjadi raja Bone, tetapi juga tampak berkaitan dengan peristiwa penculikan isteri Arung Palakka dan dayang-dayangnya. Ketika mereka disergap dan diserang oleh pasukan Arung Palakka di daerah Duri hingga Karaeng Massepe bersama saudaranya dipenggal kepalanya, isteri dan dayang-dayang Arung Palakka juga dite-mukan di sana bersama mereka.

Gallarang Mangasa dari segala jabatan kekusaannya. Pada tanggal 3 September 1674, Arung Palakka membawa para pemimpin dan pemuka masyarakat dari Mandar, bersama 30.000 orang laskar Mandar untuk menghadap ke Fort Rotterdam untuk menyatakan kesetiaannya kepada Arung Palakka dan Kompeni. Setelah itu, mereka kemudian menandatangani perjanjian atau kontrak dalam rangka perjanjian Bongaya. Dan setelah berhasil meredam pemberontakan-pemberontakan yang sekaligus dapat menghapus aib yang telah mencoreng wajahnya, dan tak ada lagi tanda-tanda akan adanya oposisi yang berarti, maka terbukalah kesempatan bagi Arung Palakka untuk melanjutkan tugas kepemimpinannya mem-bangun ketertiban dan keamanan serta kesejahteraan di Sulawesi Selatan.⁵⁷

Keberhasilan Arung Palakka setelah menduduki tahta Kerajaan Bone, pada awalnya disambut baik oleh pihak Belanda di Fort Rotterdam karena telah memperkuat posisi sekutunya yang paling diandalkan, justru berbalik menjadi kekhawatiran mengingat sifat ambisius Arung Palakka. Kerajaan Bone yang kuat itu dan di bawah pemerintahan Arung Palakka kelihatannya dapat menjadi berbahaya bagi Kompeni sebagaimana Gowa yang dulu

⁵⁷Mattulada, 1999.*Op.cit.*, hlm. 239-240. Untuk memenuhi ambisiusnya mensejahterakan rakyat Sulawesi Selatan, maka Arung Palakka berencana melakukan pembangunan di bidang pertanian, persawahan untuk memenuhi makanan pokok penduduk. Dibangun dan diperbaikinya kembali saluran-saluran dan pengairan-pengairan, menata kembali sawah-sawah dan ladang-ladang yang rusak akibat peperangan yang lama di masa lampau (perang Makassar). Maros dan Bantaeng yang menjadi wilayah kekuasaan langsung bagi Arung Palakka, pertama-tama untuk diperbaiki. Kepada anggota pasukan Angke dihadiahkan tanah/ lahan pertanian di daerah Maros dan Sigeri yang sebelumnya adalah milik dari Kerajaan Gowa. Sendi-sendi *pangngadareng* adalah rujukan bagi pelaksanaan strategi umum pembangunan Arung Palakka untuk mewujudkan kesatuan wilayah teritorial Sulawesi Selatan dengan dukungan ikatan kekerabatan *Sempugi*, *Sompung lolo*, *mali siparappe*, *malilu sipainge*, *pada idi padaelo*.

pernah bangkit kembali. Ada beberapa kalangan di Fort Rotterdam menyarankan untuk terus mencegah setiap percobaan baik oleh Bone maupun dari Gowa untuk membentuk persekutuan. Sikap curiga Fort Rotterdam ini menandakan kurangnya pemahaman dasar akan makna kemenangan dalam Perang Makassar bagi Arung Palakka. Tetapi namun demikian, terlepas dari kesalahpahaman Kompeni terhadap pertumbuhan kekuasaan Arung Palakka, mereka tetap mempertahankan hubungan perkawanan dengannya. Karena itu, akhir dari perang Makassar adalah merupakan babak baru bagi keduanya menjadi penguasa bersama di Sulawesi Selatan. Kesepahamanpun telah dicapai, Kompeni mendapat kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam hal perdagangan dan urusan luar negeri, sementara Arung Palakka menjamin lancarnya fungsi hubungan dalam negeri.

Hubungan antara Belanda dengan Arung Palakka sebagai raja Bone, frekuensinya naik turun sepanjang masa pemerintahan beliau. Berbagai peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan, terutama yang ditujukan kepada Arung Palakka sering memicu emosi dan yang menyebabkan sedikit terganggu hubungannya dengan pemerintah Belanda di Fort Rotterdam. Salah satu peristiwa yang terjadi antara Belanda dan Arung Palakka adalah ketika seorang tentara Belanda hilang lalu diketahui meninggal dunia karena dibunuh oleh seseorang yang bernama Syarif. Pembunuhan itu dilakukan oleh karena tentara Belanda tersebut ketahuan telah berbuat tidak senonoh terhadap seorang wanita yang diketahui adalah selir atau gundik dari penerjemah Datu Soppeng La Tenrilai. Arung Palakka sangat terganggu dengan kejadian ini karena penerjemah tersebut (Syarif) adalah orang kepercayaan mertuanya, datu Soppeng. Untuk mengetahui duduk persoalannya, Arung Palakka meminta kepada Harthouwer agar Syarif dapat

dibawa ke Bontoala, namun permintaan itu ditolak, dan oleh Belanda disarankan agar Arung Palakka sendiri datang ke Fort Rotterdam guna melaksanakan penyelidikan itu. Arung Palakka lalu mengutus Arung Amali, Karaeng Lengcese, dan beberapa bangsawan penting lainnya datang ke Fort Rotterdam untuk menanyai si tertuduh. Setelah mengetahui duduk persoalannya, maka utusan Arung Palakka itu memintakan maaf untuk Syarif, namun Belanda tetap pada pendiriannya untuk mengadili Syarif menurut hukum Belanda. Untuk itu bahkan mengingatkan Belanda bahwa Kompeni pun tidak sepenuhnya mencari keadilan karena telah membebaskan Kapten Belanda Jan Fransen padahal yang bersangkutan telah membunuh tiga orang Bugis tanpa ada sebabnya. Merasa kecewa, maka utusan Arung Palakka itu akhirnya kembali ke Bontoala untuk melaporkan hasilnya. Tanggal 12 November 1674, Arung Palakka meninggalkan Bontoala menuju ke Bone karena tidak sudi lagi menerima penghinaan dari pihak Belanda di Fort Rotterdam. Hubungan Arung Palakka dengan Belanda akhirnya terpecah ketika mendengar berita di Bone pada bulan Februari 1675 bahwa Syarif telah mengakui perbuatan karena disiksa dan akhirnya dieksekusi oleh Belanda.⁵⁸ Atas kasus itu, menambah keyakinan Arung Palakka untuk tinggal menetap di Kerajaan Bone, ketimbang dipermalukan di Makassar.

Ketidakhadiran Arung Palakka di istana Bontoala, menciptakan kecemasan bagi kompeni. Ketika Arung Palakka masih berada di Bontoala, apa yang direncanakan masih dapat dipantau oleh Belanda sekaligus dapat dimintai pandangan jika terjadi krisis lokal. Sekarang, dengan tinggal di Bone dia tidak

⁵⁸Andaya, 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*, (terjemahan). Makassar: Inninawa, hlm. 198.

dapat lagi diawasi oleh Kompeni Belanda, bahkan mungkin dapat merencanakan atau sekaligus melakukan perlawanan. Apalagi Kompeni Belanda merasa tidak siap berhadapan dengan masalah setempat, disamping pengaruh terhadap masyarakat dapat berkurang karena kabar tentang keretakan hubungan antara Kompeni Belanda dan Arung Palakka akan tersebar dengan cepat. Arung Palakka menjadi faktor esensial bagi kedamaian Sulawesi Selatan dan kedamaian pikiran Kompeni. Karena itulah utusan khusus Belanda dikirim ke Bone pada bulan April 1675 untuk mem-bujuk Arung Palakka kembali ke Makassar dan membahas keluhan-keluhannya terhadap Harthouwer.⁵⁹

Waktu Arung Palakka sudah berada di Bontoala, ia langsung bertemu Harthouwer untuk membicarakan keluhan-keluhannya dan beliau juga mengajukan daftar janji-janji yang telah diberikann kepada Bone dan Soppeng oleh Speelman yang selalu diabaikan

⁵⁹*Ibid.* Pada sumber yang sama dijelaskan bahwa utusan khusus Kompeni Belanda ke Bone, diperintahkan untuk menginap di rumah Daeng Talele, isteri Arung Palakka dari Makassar dan saudara perempuan Karaeng Lengnese. Dalam banyak kesempatan, pada tahun-tahun sebelumnya, mereka selalu datang meminta tolong padanya untuk memulihkan keretakan yang disebabkan oleh gubernur Belanda atau presiden di Fort Rotterdam yang selalu yang selalu bersemangat dan/atau karena sensi-tifitas Arung Palakka. Tahun 1675, Daeng Talele dianggap sebagai isteri utama Arung Palakka, namun nilai pentingnya belum ditemukanKomperni. Ketika dia memberitahu utusan Belanda di Bone, bahwa Arung Palakka telah diperlakukan tidak hormat dan harus diperlakukan sopan dan"ramah ala raja" oleh Harthouwer, mereka setuju untuk menyampaikan pesan itu. Untuk menegaskan maksudnya, dia menjelaskan bagaimana putus asanya Arung Palakka ketika tiba di Bone dari Bontoala dan bagaimana dia memanggil para bangsawannya dan mengungkapkann daftar keluhannya terhadap Harthouwer. Dengan pengetahuan ini, utusan Belanda mampu meyakinkan Arung Palakka bahwa mereka akan berbicara kepada Harthouwer tentang keluhan-keluhannya. Mereka juga berhasil membujuk Arung Palakka agar tidak pergi ke Batavia untuk meminta ganti rugi langsung ke Pemerintahan Tertinggi Kompeni di Batavia.

oleh para penggantinya. Secara singkat, janji-janji itu adalah :

1. Mereka dapat mempertahankan haknya menurut hukum yang berlaku di negerinya masing-masing.
2. Tidak akan ada perbedaan di antara mereka dengan Butung dan Ternate.
3. Kompeni tidak berhak atas budak-budak mereka, tidak juga berhak menggadaikan mereka tanpa sepengetahuan pemiliknya.
4. Tidak ada budak yang dapat melawan mereka di pengadilan karena praktek ini berlawanan dengan hukum di negeri mereka.

Keluhan-keluhan tersebut di atas tidak segera dapat di atasi, oleh karena beberapa hari kemudian para pejabat-pejabat Kompeni di Fort Rotterdam mengunjungi istana Bontoala agar dapat menghilangkan kecurigaan Arung Palakka terhadap Harthouwer. Atas kunjungan itu, Arung Palakka lalu mengakui kekuasaan Kompeni sebagai penguasa atasan dan kekuasaan tertinggi. Namun yang menjadi keluhan utama Arung Palakka adalah penghinaan yang dirasakan oleh sekutu-sekutu setia Kompeni yang harus meminta izin berlayar ke tujuan tertentu.⁶⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa; keluhan-keluhan Arung Palakka itu mendapat respon dari pemerintah Belanda di Batavia dan mengirim utusan ke Makassar untuk menyelidiki hal tersebut. Untuk maksud tersebut, maka dikirimlah Andries Bogaart (Gubernur dan Direktur Banda), tiba di Makassar dengan intruksi khusus dari Batavia untuk menyelidiki klaim yang dibuat Arung Palakka atas nama Bone dan Soppeng pada bulan Mei 1675. Pertemuan pun dilangsungkan antara Arung

⁶⁰Andaya, 2004. *Ibid.* hlm. 200. Baca juga: Mattulada, 1999. *Op.cit.*, hlm.254-255

Palakka dengan bangsawan-bangsawan tinggi Bugis dan Karaeng Gowa, Sultan Muhammad Ali. Tuntutan Arung Palakka kurang lebih sama dengan apa yang disam-paikan kepada Harthouwer pada pertemuan yang lalu. Dan tidak semua apa yang menjadi tuntutan Arung Palakka dipenuhi oleh Bogaart, namun demikian, Arung Palakka tetap memberikan jaminan kepada Bogaart bahwa selama dia masih hidup, dia tidak akan merusak ketenangan dan kemak-muran tanah ini. Sementara itu, Bogaart juga memberikan hadiah kepada Arung Palakka dan isterinya, Daeng Talele dengan nilai 750 *guilder*.

Hampir bersamaan waktunya dengan masalah *ke-datu-an* di Soppeng, timbul lagi satu persoalan yang harus dihadapi oleh Arung Palakka yaitu peristiwa pemberontakan di Luwu pada bulan Agustus 1676. Datu Luwu Daeng Mattuju mempersiapkan perang dan membujuk negeri-negeri tetangganya untuk bergabung memerangi Arung Palakka, termasuk Arung Matoa Wajo diajak untuk bergabung, tetapi ajakan itu tidak ada yang meresponnya. Bekas Datu Luwu, Daeng Massuro yang diangkat oleh Arung Palakka menjadi Arung Larompong (masuk wilayah Luwu), bangkit menggalang kekuatan untuk membantu Arung Palakka. Tanggal 31 September 1676, berangkatlah Arung Palakka bersama pasukannya dari pelabuhan Cenrana melalui laut Siwa dengan kekuatan pasukan 10.000. orang laskar dari berbagai negeri. Di samping itu, juga terdapat 20.000 orang laskar di bawah pimpinan Daeng Memang melalui darat menuju ke Luwu. Kekuatan yang begitu besar dengan gampangnyanya dapat memporak-porandakan pasukan Datu Luwu. Pasukan gabungan Arung Palakka akhirnya menduduki kotaraja di Ware, sementara Datu Luwu bersama saudaranya melarikan diri ke dalam hutan. Tetapi tidak lama kemudian beliau ditangkap dan di bawa ke Fort Rotterdam dan

ditawan di sana.⁶¹

Keberhasilan Arung Palakka mengatasi kemelut dalam negeri (Sulawesi Selatan), tampaknya membuat pihak Kompeni Belanda curiga dan kuatir. Oleh karena itu, permintaan Arung Palakka sebagai raja Bone untuk mengatur pas (izin perjalanan) perdagangan atau pelayaran anak negeri Sulawesi Selatan, di Bone, ditolak secara diplomasi. Pihak Kompeni berkesimpulan bahwa keinginan Arung Palakka untuk mengatur sendiri Pass perjalanan/pelayaran adalah menjadi bahagian dari tujuan dan sasaran politik Arung Palakka untuk menguasai perdagangan di Sulawesi Selatan. Hal itu akan memudahkan baginya untuk menguasai seluruh Sulawesi Selatan dan menatanya menjadi *TanaSempugi*. Sementara menunggu tanggapan dan ketetapan dari Batavia, Arung Palakka memindahkan untuk sementara waktu Markas besarnya di Bontoala ke Cenrana (terletak dekat muara sungai Cenrana) sebagai pelabuhan yang dapat menampung sejumlah perahu niaga berukuran besar.

Namun dibalik itu, Arung Palakka meyakini bahwa segala kesalahpahaman yang menjadi dasar kebijakan Kompeni Belanda di Fort Rotterdam, tidaklah menjadi sikap dan kebijaksanaan

⁶¹Mattulada, 1999. *Op.cit.* hlm. 258. Baca juga; Andaya, 2004. *Op.cit.*, hlm.220-221. Selain itu, dijelaskan juga tentang syarat-syarat perdamaian yang diajukan oleh Arung Palakka untuk Kerajaan Luwu (Datu Luwu). Syarat-syarat perdamaian itu terdiri atas tiga point, yaitu: 1) Daeng Massuro dengan 5.000-6.000 pasukan Bugis (Bone) diizinkan memasuki Luwu untuk mengambil harta milik kerajaan; 2) Rakyat Luwu menerima kembali Daeng Massuro sebagai penguasa mereka; 3) Mereka yang datang dari Wajo dan daerah-daerah lainnya yang bertempur bersama Luwu diserahkan kepada penguasa mereka dan dijadikan budak. Syarat-syarat ini diterima pada tanggal 13 Oktober 1676 dan secara resmi mengakhiri perang. Kemudian disepakati pula bahwa Luwu harus membayar biaya perang kepada Kompeni 100 *tael* emas karena telah melanggar isi perjanjian Bongaya.

Kompeni Belanda di Batavia. Hal yang amat merisaukan hati Arung Palakka, ialah dugaannya bahwa wakil-wakil Kompeni Belanda di Fort Rotterdam, kurang atau sama sekali tidak memahami makna esensial arti kemitraan yang setara antara Arung Palakka dengan Speelman (Wakil VOC), sebagai Sekutu penakluk di Sulawesi Selatan. Bagi Arung Palakka, seharusnya hal itu dihormati oleh wakil-wakil Kompeni Belanda yang menggantikan Admiral Speelman. Sejak Gubernur Harthouwer yang selanjutnya digantikan oleh Gubernur Dubbeldekop, menyusul Gubernur Jacobs yang tiba di Makassar dalam bulan Januari 1678, mereka semua itu kurang memahami dan tidak menghormati kedudukan kemitraan yang setara, yang dimiliki oleh Arung Palakka. Hal ini terjadi setelah Speelman meninggalkan Makassar, dan pengganti-penggantinya menetapkan kebijakan baru untuk mencegah munculnya Arung Palakka sebagai kekuatan tunggal yang mengendalikan raja-raja bumiputera di Sulawesi Selatan.⁶²

Memang tidak dapat disangkal pihak Kompeni Belanda bahwa Arung Palakka sebagai raja Bone, memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sulit ditandingi oleh lawan dan kawan, apalagi setelah keberhasilannya menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang meronrong kewibawaannya pasca perjanjian Bongaya. Bagi Belanda, Arung Palakka adalah teman dan sekaligus ancaman baginya, oleh karena itu keberadaan Arung Palakka tidak bisa dikesampingkan mengingat pengaruhnya yang begitu kuat dan besar, khususnya di Sulawesi Selatan. Pengaruh kuat Arung Palakka itu kemudian diman-faatkan kembali oleh Kompeni Belanda untuk mengatasi

⁶²*Ibid.* Hlm. 259-260. Karena itulah pihak petinggi Kompeni Belanda di Rotterdam, harus berusaha menciptakan kekuatan penyeimbang terhadap keunggulan kepemimpinan Arung Palakka. Maka terjadilah secara beruntun peristiwa-peristiwa yang seakan menguji keunggulan Arung Palakka terhadap kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Namun semua itu dapat diatasinya dengan baik dan sempurna.

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

orang-orang Bugis dan Makassar yang ada di Jawa sebagai pelarian ketika usai perang Makassar. Pelarian-pelarian ini sangat meresahkan orang-orang Belanda maupun penduduk setempat, sehingga oleh pihak Kompeni Belanda mengang-gap bahwa yang bisa mengatasi persoalan itu hanyalah Arung Palakka sendiri. Oleh karena itulah, maka pihak Pemerintah Kompeni Belanda di Batavia meminta kepada Arung Palakka agar bisa membantu menyelesaikan kasus orang Bugis dan Makassar yang mengganggu di Jawa.

Gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang Bugis dan Makassar, sebenarnya dimulai sejak 1670 hingga tahun 1679 dan sejak itu pula menjadi ancaman bagi Kompeni Belanda karena kegiatan mereka lebih banyak diarahkan menjadi perompak dan sejenisnya. Sementara itu, orang-orang Makassar yang ada di Jawa Timur (Pasuruan) ketika itu ingin menyerahkan diri kepada kompeni Belanda (Speelman). Hal ini diketahui oleh Kompeni Belanda dari berita orang-orang Melayu, tetapi hal itu batal terlaksana karena mungkin disebabkan oleh berita tentang pertentangan Arung Palakka dengan orang-orang Makassar (Kerajaan Gowa) di Sulawesi Selatan, sehingga hilang perasaan lunak dari Karaeng Galesong untuk menyerahkan diri kepada Kompeni Belanda. Dengan kegagalan itu, berarti gagal pula rencana Speelman untuk mengadu domba antara Karaeng Galesong dengan Raden Trunojoyo. Namun demikian, Speelman tetap mengarahkan perhatiannya ke Madura, basis dan titik tolak gerakan Trunojoyo.⁶³

Kondisi di Jawa Timur akibat ulah orang-orang Makassar yang bekerjasama dengan Raden Trunojoyo sudah tidak bisa lagi diatasi oleh Kompeni Belanda. Maka pada tahun 1678, Kompeni Belanda

⁶³H.J. De Graaf, 1987. *Runtuhnya Istana Mataram* (Seri terjemahan), Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafitti, hlm. 181

meminta Arung Palakka datang ke Jawa Timur untuk mengatasi keganasan orang-orang Bugis dan Makassar di sana. Pada tanggal 6 Oktober 1678 rombongan pertama berangkat ke Jawa, dan bulan Juni 1679 rombongan besar kedua laskar Bugis diberangkatkan di bawah komando langsung Arung Palakka. Tanggal 25 November 1678 pasukan-pasukan Speelman dan pasukan Bugis bergabung untuk menyerang Trunojoyo bersama orang-orang pelarian dari Makassar. Dan setelah terjadi pertempuran yang begitu hebatnya, maka kota Kediri dapat didudukinya. Dalam kondisi yang kacau balau itu, Trunojoyo dapat meloloskan diri dengan meninggalkan mahkota emas dan benda-benda kebesaran yang dianggap sakti dari Kerajaan Majapahit dahulu. Benda-benda tersebut direbut oleh Trunojoyo di Keraton Mataram sewaktu beliau mendudukinya pada tanggal 2 Juli 1677.⁶⁴ Pada tanggal 27 Desember 1679, Trunojoyo menyerahkan diri kepada Kapten Yonker, pemimpin laskar Ambon, pengikut Kompeni, karenakelaparan telah menghabiskan daya juang Trunojoyo.

Kedatangan pasukan perang Arung Palakka di Jawa Timur, disambut dengan hangat oleh pasukan perintis yang lebih dahulu berangkat bersama pasukan Kompeni yang telah terlihat dengan segala usaha persiapan pertempuran dan usaha untuk mengajak sisa-sisa laskar Makassar itu memilih jalan damai untuk dikembalikan ke Makassar. Pertempuran demi pertempuran, berhari-hari dilakukan sehingga tersebar berita tentang kedatangan Arung Palakka yang bermaksud mengembalikan sisa-sisa laskar Makassar, baik

⁶⁴Daeng Patunru, 1969, *sejarah Gowa*, hlm.75. Baca juga: H.J. De Graaf, 1989. *Terbunuhnya Kapten Tack; Kemelut di Kartasura Abad XVII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, hlm. 6. Dijelaskan juga bahwa Kompeni Belanda mengharapakan, agar pasukan Makassar pun akan segegar menyera. Tetapi masih diperlukan waktu lebih lama dari satu tahun untuk mengusir tokoh-tokoh peperangan itu dari sarang mereka di daerah Delta Brantas. Barulah kemudian dicari cara untuk mengejar Trunojoyo yang telah melarikan diri itu.

dengan jalan kekerasan maupun dengan jalan damai. Di antara pembangkang itu Daeng Tulolo yang pertama menyatakan bersedia memenuhi ajakan Arung Palakka. Juga diberitakan bahwa Karaeng Galesong pula memenuhi ajakan Arung Palakka itu. Setelah Arung Palakka dengan pasukannya menduduki kubu-kubu pertahanan Karaeng Galesong di Kakaper. Berita bahwa Karaeng Galesong berkehendak memenuhi ajakan damai Arung Palakka, menjadi harapan yang sebenarnya oleh Arung Palakka. Akan tetapi sebelum Karaeng Galesong berkehendak memenuhi niatnya, ia jatuh sakit dan wafat pada tanggal 21 November 1679.⁶⁵

Tugas Arung Palakka di Tana Jawa dianggap telah selesai dan telah melapangkan jalan perdamaian di Jawa Timur dan setelah segalanya selesai, maka Arung Palakka menegaskan kembali kepada Kompeni bahwa kehadirannya di Jawa Timur adalah dalam rangka melunasi hutang budinya kepada Kompeni. Selanjutnya, Arung Palakka kembali ke Makassar membawa sisa-sisa laskar Makassar sebagai bahagian dari tanggung-jawabnya sebagai *pertuanan Tanah Sempugi* Sulawesi Selatan yang dimungkinkan terjadi karena bantuan Kompeni, yang sudi menerimanya sebagai Sekutu, mitra yang setara. Beberapa hari kemudian Arung Palakka secara resmi menyampaikan kepada Gubernur Cops bahwa ia telah kembalikan sisa-sisa laskar Makassar, dari Tanah Jawa.

⁶⁵Mattulada, 1999. *Op.cit.*, hlm.263-264. Kalau dilihat tanggal kematian Karaeng Galesong (21 November 1679) dan tertangkapnya Pangeran Trunojoyo pada tanggal 27 Desember 1679, selisih satu bulan atau Karaeng Galesong lebih dahulu meninggal dunia kemudian baru Trunojoyo ditangkap lalu dibunuh oleh Susushunan sendiri. Sebelum Karaeng Galesong meninggal dunia ia berpesan kepada putera yang ber-nama Karaeng Mamampang, sebagai ahli warisnya agar memenuhi ajakan damai Arung Palakka dan akhirnya dapat kembali ke Makassar bersama kurang lebih 120 orang anggota pasukannya dan 900 orang anggota pasukan dari Wajo dan sebagian lagi tetap memilih tinggal di Jawa Timur.

Keberhasilan Arung Palakka membawa pulang sebagian besar orang-orang Makassar dan Bugis yang ada di Jawa Timur, yang selama ini mengganggu aktivitas Kompeni Belanda, adalah suatu prestise tersendiri. Ini juga membuktikan bahwa sekalipun Arung Palakka sering tidak sepaham dengan Kompeni Belanda, namun hal itu tidak membawa hubungan antara keduanya terputus dan saling bermusuhan. Diakui bahwa Arung Palakka di mata orang Makassar dan Bugis mempunyai pengaruh yang sangat besar dan inilah modal utama beliau dalam membangun Sulawesi Selatan selama menjadi raja Bone. Kendatipun banyak keberhasilan yang dicapai oleh Arung Palakka selama menjadi raja, namun tidak sedikit pula persoalan yang melibatkan dirinya selama itu. Tetapi, persoalan-persoalan yang dihadapi, baik yang ringan maupun yang cukup berat, semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi dibalik keberhasilan itu, muncul suatu persoalan baru yang harus dihadapi dan hal ini tidak pernah diduga sebelumnya yaitu pembangkangan yang dila-kukan oleh orang kesayangan dan kepercayaannya yaitu yaitu Arung Bakke'. Persoalannya semakin menjadi rumit karena Kompeni Belanda seakan berpihak kepada Arung Bakke' sehingga Arung Palakka harus bertindak tegas. Pada sisi lain, Arung Bakke' selain orang kepercayaannya, beliau juga adalah iparnya karena Arung Bakke' mengawini saudara perempuan Arung Palakka.

Hubungan antara Arung Bakke' dengan Arung Palakka memuncak setelah Arung Palakka kembali dari Jawa Timur untuk memerangi orang-orang Makassar dan Bugis yang selama ini bertualang di sana. Rupanya, selama Arung Bakke' menjadi orang kepercayaan Arung Palakka (sejak melarikan diri ke Buton hingga usai perang Makassar), merasa dirinya juga berhak atas beberapa daerah yang ada di bagian utara. Apalagi pada tahun 1677 (sebelum Arung Palakka ke Jawa Timur), Arung Bakke'

telah diakui sebagai tokoh pemimpin di Ajatappareng. Bisa jadi ini karena kekuasaannya yang dijalankan pada masa itu sehingga beliau diberi gelar Addatuang Sidenreng, datu Sawitto, Datu Suppa, Arung Alitta, dan Arung Rappeng. Ini menandakan bahwa beliau telah menjadi penguasa tunggal di Ajatappareng, dan yang tidak terbantahkan bahwa pengaruh Arung Bakke' di wilayah ini sangat besar. Kecurigaan Arung Palakka atas niat jahat Arung Bakke' untuk mendepak Arung Palakka sebagai anak kesayangan Kompeni Belanda terlihat ketika anak Arung Bakke' diterima dengan hangat dan dijamu dengan baik oleh pemerintah Kompeni Belanda di Batavia.⁶⁶

Ketika pesta penyambutan gubernur Cops di Makassar pada bulan Januari 1687, banyak kalangan merasa lega melihat Arung Palakka dan Arung Bakke' terlibat dalam percakapan akrab. Tetapi sehari atau dua hari setelahnya, ketika Arung Bakke' mencoba membawa langsung hadiah untuk Arung Palakka, yaitu seorang budak perempuan, dia ditolak dan ditampik. Arung Palakka berujar kepadanya; "Hanya Presiden yang membuat kita makan dan minum bersama". Dan atas saran Gubernur Cops, Arung Bakke' sekali lagi mencoba untuk menemui Arung Palakka, tetapi dia diperlakukan seperti orang asing. Usaha selanjutnya dengan mengirim pemerjemah Arung Bakke' untuk menemui Arung Palakka, juga sama gagalannya. Dia ditahan di gerbang oleh orang-orang Arung Palakka dan menegaskan bahwa tidak satu pun orang-orang Arung Bakke' yang bisa masuk.⁶⁷

Faktor lain yang mempengaruhi permusuhan antara Arung

⁶⁶Andaya, 2004, *op.cit.*, hlm.290

⁶⁷*Ibid.* Dijelaskan lebih lanjut; bahwa Fort Rotterdam mendengar kabar bahwa Arung Palakka telah mengirim *Arupitu* Bone untuk bertemu para penguasa Soppeng guna membicarakan persengketaan wilayah yang diklaim oleh Soppeng dan Arung Bakke'. Dalam pertemuan delegasi ini, jelas-jelas mengangkat keinginan Arung Palakka, mereka menyatakan kesediaan

Palakka dan Arung Bakke adalah retaknya hubungan perkawinan antara Arung Bakke dan saudara perempuan Arung Palakka yang bernama We Tiringang. Perpecahan antara pasangan suami isteri ini memang tidak dapat didamaikan lagi, karena We Tiringang telah berpisah dengan suaminya dan tinggal sendiri di Palakka. Rupanya perseteruan ini semakin susah untuk didamaikan sehingga banyak pengikut Arung Palakka, khususnya para To Angke sangat menyesalkan pertikaian itu. Atas kenyataan itu, maka berbagai kalangan mencoba untuk menyelamatkan perkawinan Arung Bakke dan We Tiringang dengan jalan Arung Bakke bersama Arung Amali mengunjungi We Tiringang atau dengan Arung Palakka di Cenrana, namun We Tiringang menolak semua permintaan untuk kembali kepada Arung Bakke'. Menyusul penolakan itu, maka Arung Bakke tidak lagi berusaha untuk rujuk dengan We Tiringang atau dengan Arung Palakka. Bahkan Arung Bakke' melengkapi perseteruannya dengan Arung Palakka dengan melakukan perkawinan dari salah satu putri dari istana Sawitto.⁶⁸

berperang dengan Arung Bakke ketimbang menyerahkan wila-yah-wilayah sengketa itu. Belanda ditempatkan pada situasi sulit dalam usahanya memediasi kedua sekutunya yang paling setia ini tanpa memperlihatkan tingkah yang berat sebelah. Tetapi jika Kompeni Belanda ingin menerapkan kebijakan penyeimbang terhadap kekuasaan Arung Palakka di Sulawesi Selatan, mereka terpaksa harus membantu yang lemah yaitu Arung Bakke'. Karena itu, Kompeni Belanda memberikan jaminan dukung-an kepada Arung Bakke' dengan menyarankan agar kembali ke Ajatappareng untuk menjaganya. Dukungan itu diberikan dengan tiga buah kapal Belanda diperintahkan untuk mengiringi perjalanan Arung Bakke' kembali ke Bacukiki, dan dari kota apelabuhan ini, dia hanya melakukan perjalanan pendek untuk sampai ke tempat tinggalnya. Dan hal ini dike-tahui oleh Arung Palakka bahwa Kompeni Belanda telah mengatur semuanya di belakang beliau. Hal ini sudah diyakini oleh Arung Palakka bahwa Kompeni Belanda telah mempunyai hubungan yang sangat erat untuk mendepaknya dari kekuasaan sebagai penguasa tunggal di Sulawesi Selatan.

Atas tindakan Arung Bakke tersebut, membuat Arung Palakka menjadi lebih marah lagi. Tanggal 2 Desember 1680, Arung Bakke mengirim utusan ke Fort Rotterdam untuk menyampaikan adanya rumor yang berkembang bahwa Arung Palakka akan memerangi Arung Bakke. Pada akhir bulan Desember, Arung Palakka lalu menemui Gubernur Cops, dan beliau ditanyai tentang laporan dari Arung Bakke' bahwa Arung Palakka akan menyerangnya. Jawaban itu baru diberikan oleh Arung Palakka melalui kurirnya kepada kompeni Belanda dan tanggal 9 Januari 1681, dan menyatakan bahwa Arung Palakka akan berangkat ke Bone, melalui Ajatappareng untuk memperlihatkan bahwa Arung Palakka tidak mempunyai maksud untuk memerangi Arung Bakke' seperti tersiar dalam "kabar angin" itu. Bahkan, esok harinya Fort Rotterdam telah menerima kabar bahwa Arung Palakka telah bergerak dengan kelengkapan perang bersama para pemimpin pasukan terke-muka ke Sawitto untuk "menegur dengan keras" atas "pen-durhakaan" yang dilakukan oleh Arung Bakke'. Kabar itu lebih diperkuat lagi oleh mantan isteri Kaicili Kalimata (Pangeran Ternate) bahwa pada malam sebelum keberangkatan itu, mereka telah berkumpul dari berbagai kalangan pembesar kerajaan Gowa dan lainnya dan bersumpah setia kepada Arung Palakka untuk pergi bersama ke Sawitto menghukum Arung Bakke' dan rakyat Sawito yang dianggap telah melanggar adat itu. Bahkan pertemuan itu dipimpin langsung Arung Palakka sendiri. Arung Palakka bahkan menegaskan bahwa bilamana Kompeni Belanda memihak dan membantu Arung Bakke, maka Kompeni akan menjadi musuh. Bagi Arung Palakka sudah menjadi tekadnya untuk menghukum Arung Bakke' (Arung Tampareng) walaupun harus membayar

⁶⁸*Ibid*, hlm. 291; Baca juga Mattulada, 1999. *Op.cit.*, hlm. 268

de-ngan nyawanya sendiri.⁶⁹

Pertempuran antara Arung Bakke' dengan pasukan Arung Palakka tidak seimbang, apalagi bantuan yang diharapkan oleh Arung Bakke' ternyata tidak ada. Akhirnya beliau lari ke Mandar untuk minta perlindungan. Mandar tidak mau terlalu jauh terlibat masalah ini sehingga beliau hanya membantu Arung Bakke' untuk kembali ke Makassar (Fort Rotterdam). Namun di sinilah akhir petualangan Arung Bakke' karena menemui ajal pada pulau Salemo. Kepalanya kemudian dipenggal untuk diperlihatkan kepada Arung Palakka dan setelah itu barulah dikebalikan untuk disatukan dengan tubuhnya yang lain. Arung Palakka lalu memerintahkan para pengikutnya untuk menguburkan mayat Arung Bakke' secepatnya. Setelah itu barulah Arung Palakka menyurat ke Fort Rotterdam dan menyatakan bahwa peperangan antara dia dan Arung Bakke' telah usai. Kepada rakyat Ajatappareng telah diperingatkan dengan keras, agar tidak melanggar *panggadareng* dan amanat leluhur dan siapa yang melanggar maka akan mendapat nasib seperti yang dialami oleh Arung Bakke'.

Setelah peristiwa berdarah yang membawa banyak kepedihan

⁶⁹*Ibid*, hlm. 269. Dalam laporan berikutnya menyatakan bahwa perang sudah terjadi di sawitto antara Arung Palakka dan Arung Bakke'. Arung Bakke' memanggil bantuan, untuk melibatkan raja-raja bawahan di Ajatappareng, tetapi tidak seorangpun yang berani membantunya melawan Arung Palakka. Karena merasa sendiri dalam perang, maka Arung Bakke' melarikan diri ke Mandar bersama sejumlah orang pengikutnya, termasuk puteranya yang bernama Daeng Memang. Mara'dia Balanipa, Daeng Rioso bersedia membantu untuk mengantar Arung Bakke', namun yang pertama gagal karena angin berbalik arah sehingga nanti pada pelayaran yang kedua berhasil dan sebelum tiba di Fort Rotterdam, rom-bongan ini singgah di Pulau Salemo (perairan Selat Makassar). Rupanya pelayaran Arung Bakke' ini diketahui oleh pasukan Arung Palakka sehingga mereka ditunggu di pulau itu oleh laskar Wajo yang dipimpin oleh Tobutu. Pertempuran tak dapat dihindari, Arung Bakke' bersama puteranya melarikan diri ke perlawanan hingga keduanya tewas.

yang dikenal dengan peristiwa Arung Bakke dipandang sudah berlalu. Bersamaan dengan itu timbul pula kabar angin bahwa telah terjadi keretakan antara Arung Palakka dengan Kompeni Belanda di Fort Rotterdam dan semakin memanas dan keras. Bahkan diberitakan bahwa Arung Palakka telah membangun angkatan perang, termasuk mengajak Bima dan Sumbawa agar ikut membantu memerangi Kompeni Belanda. Tetapi semua itu tidak pernah dibuktikan hingga Arung Palakka menghembuskan napasnya yang terakhir di istan Bontoala pada tanggal 6 April 1696. Sesuai dengan amanatnya, ia dimakamkan dibukit Bonto-biraeng, Gowa. Juga permaisurinya I Mangkawani Daeng Talele yang menyusul kemudian dimakamkan di samping makamnya, untuk memperingati jasa-jasanya sebagai isteri yang mendampingi dalam perjuangan dan suka duka dalam kehidupan. Hal itu juga membuktikan bahwa keduanya sampai pada akhir hayatnya, memenuhi pasang dalam menyatukan diri ke dalam kesatuan negeri-negeri di Sulawesi Selatan dan merekapun menjadi bagian dari Butta Gowa.

B. Hubungan Bone dengan Belanda Pasca Kematian Arung Palakka

Pada akhir abad ke-17 seluruh Sulawesi Selatan berada pada satu keadaan bersatu dalam satu badan yang dinamakan *Tana Sempugi*, hal itu ditunjukkan pada satu upacara "Sumpah Kesetiaan" oleh Angkatan Darat kerajaan-kerajaan lokal di Makassar pada tahun 1696. Hal ini mengingatkan kita tentang terjadinya satu tingkat kesadaran umum masyarakat Sulawesi Selatan yang tadinya terpecah-pecah dalam kerajaan-kerajaan lokal besar dan kecil, serta persekutuan-persekutuan kaum yang masing-masing memandang diri terpisah atau berbeda dari lainnya. Acapkali di antara kita terjadi perang yang mengobarkan dendam kesumat yang hampir-hampir

tidak berkesudahan. Dalam pernyataan Sumpah Setia pada tahun 1696, sungguh suatu peristiwa puncak dan unik bagi Sulawesi Selatan, karena yang memegang peranan penting adalah Arung Palakka sebagai tokoh pemersatu.

Kini, beliau sudah tiada dan selama 29 tahun memegang jabatan sebagai Arumpone, telah banyak melakukan perbaikan-perbaikan untuk rakyat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kerajaan Bone dan Wajo pada khususnya. Beliau meninggal pada tanggal 16 April 1696 di istana Bontoala dan dimakamkan di bukit Bontobiraeng, kompleks pemakaman raja-raja Gowa dan Tallo. Sesuai dengan adat dan kebiasaan bahwa bila seorang raja meninggal dunia, maka tidak boleh dilakukan pemakaman terhadap mayat sang raja kalau belum diadakan pelantikan bagi penggantinya, dan tentu saja telah mendapat persetujuan dari dewan *adat PituE*. Maka pada hari itu juga dilantiklah La Patau Matanna Tika menjadi raja Bone ke-16 menggantikan pamannya sendiri yaitu Arung Palakka MalampeE Gemme'na.⁷⁰

Ketika Arung Palakka sudah tidak ada, banyak kalangan terutama para pemimpin kaumbangsawan, dan para pemimpin lokal yang telah memberikan kesetiaan yang tulus kepada Arung Palakka, menghadapi kenyataan bahwa suasana persaingan keras yang membuat kristalisasi kawan-lawan bangkit kembali dengan cepatnya. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi para penguasa Bone, Gowa, Wajo dan Soppeng yang sudah menggalang kesatuan gerak menghadapi Belanda di Fort Rotterdam (kini benteng Ujung Pandang). Suasana yang mencemaskan itu bukanlah terjadi antara negeri-negeri utama di Sulawesi Selatan. Ia lebih bersifat persaingan antara para penguasa yang masing-masing berusaha

⁷⁰Hamid, dkk. 2007, *op.cit.*, hlm.181; Baca juga: Mattulada, 1999, *op.cit.*, hlm.275

mencari dukungan dari penguasa Belanda di Fort Rotterdam. Peranan Arunmpone La Patau sebagai penerus Arung Palakka dan sebagai ketua raja-raja di Sulawesi selatan, tidaklah sekuat Arung Palakka dalam menghadapi Kompeni Belanda sebagai sekutu penakluk yang setara. Kini Belanda menjadi pertuanan tunggal. Hal ini memberi peluang tumbuhnya persaingan untuk berkonflik antara raja-raja itu. Karena itu, rakyat kecil lambat laun merasa kurang dapat perlindungan sebagaimana yang didapatkannya ketika Arung Palakka masih hidup.

Pasca kematian Arung Palakka, kondisi politik di Sulawesi Selatan memang semakin sulit ditebak arahnya. Kehidupan masyarakat semakin memprihatinkan karena sumber penghasilan di darat maupun di laut sangat terbatas, sehingga bencana mengancam sewaktu-waktu. Berdasarkan kenyataan itulah secara tiba-tiba raja Gowa (*Sombaya*), Sultan Abdul Djalil menuntut kepada Belanda agar utang perang seperti yang disebutkan dalam isi Perjanjian Bungaya supaya dihapuskan. Tuntutan raja Gowa ini akhirnya dipenuhi oleh peme-rintah Kompeni Belanda pada tanggal 22 Februari 1701. Tentu saja Belanda juga meminta imbalan kepada Raja Gowa Sultan Abdul Djalil yaitu; bahwa diminta kepada raja Gowa dan rakyatnya dapat bersikap lunak kepada Belanda. Begitu juga benteng-benteng yang sedang dipugar oleh Kerajaan Gowa agar dihentikan pemugarannya. Permintaan Kompeni Belanda ini tidak direspon oleh pihak Kerajaan Gowa dan pembesar *Butta Gowa*.⁷¹

Kesulitan-kesulitan baru dialami kembali oleh Sultan Abdul

⁷¹Mattulada, 1999, *op.-cit.*, hlm. 280. Seharusnya kehidupan masyarakat Gowa sedikitnya dapat berubah karena utang perang Kerajaan Gowa terhadap Kompeni Belanda telah dihapuskan sehingga uang yang sedianya akan dipergunakan membayar utang perang, dialihkan untuk membangun kehidupan masyarakat Gowa. Kesulitan-kesulitan yang diha-dapi rakyat Gowa tidak menjadi berkurang, sehingga seolah-olah terjadi wabah "*putus*

Djalil ketika La Patau (menantu Sultan Abdul Djalil sendiri) diangkat menjadi raja Bone menggantikan pamannya (Arung Palakka) menjadi ketua raja-raja di Sulawesi Selatan. Pada awal kekuasaan La Patau, terjadi ketegangan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa lantaran terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Arung Teko dengan seorang bangsawan Soppeng yang bernama Daeng Mambani Arung Balusu. Pembunuhan ini terjadi karena adanya persoalan rumah tangga Arung Teko.⁷² Pembunuhan itu sendiri terjadi di wilayah kekuasaan Kerajaan

asa" yang melahirkan berbagai kejahatan yang sukar diken-dalikan oleh permintaan Butta Gowa. Di samping berkecamuknya keja-hatan di kalangan rakyat, dan ketidakpedulian pembesar kerajaan, me-nimbulkan apatisme dan mimpi-mimpi datangnya *tumanurung* atau juru selamat yang dapat membawa mereka kepada keselamatan dan terhindar dari kesensaraan serta kemelaratan. Sultan Abdul Djalil merasa amat terjepit dan tertekan oleh keadaan rakyat yang semakin kecewa dengan hasil-hasil usahanya, dan kekuasaan Kompeni Belanda yang semakin dominan atas semua penguasa di negeri Sulawesi Selatan setelah mangkatnya Arung Palakka. Kekecewaan Sultan Abdul Djalil atas keadaan yang kurang menggembirakan itu membawa Baginda tidak senang kepada Kompeni Belanda. Dengan segala kemampuan yang masih tersisa, dipu-garnya terus benteng-benteng; Anak Gowa, dan Kalegowa untuk tempat tinggal dan perlindungannya.

⁷²Arung Teko yang bernama La Pasompareng juga merupakan putera mahkota Kerajaan Bone dimana pada masa pemerintahan Arung Palakka diberikan tugas oleh beliau pergi ke daerah Timor untuk mem-bantu Belanda. Ketika La Patau menjadi Arumpone, beliau kembali ke Bone untuk melapor bahwa dia telah kembali dari Timor. La Patau tentu saja menerima Arung Teko apa adanya, apalagi dia pergi ke Timor atas perintah Arung Palakka. Namun dalam hati La Patau, ia juga merasa was-was jangan sampai Arung Teko memint haknya untuk menjadi Arumpone, sehingga akan mengancam kedudukannya. Oleh karena itu, ketika terjadinya peristiwa perkelahian antara Arung Teko dengan Sule DatuE dari Soppeng yang mengakibatkan Sule DatuE meninggal, atas saran Arumpone La Patau meminta kepada Kompeni Belanda agar Arung Teko dipindahkan pengasingannya sejauh mungkin agar tidak kembali ke *Tana Bugis*. Per-mintaan itu juga berkaitan adanya surat dari Gubernur Inggris yang meminta bantuan persenjataan untuk melawan Kompeni Belanda. Akhir-nya Arung Teko bersama keluarganya dibuang ke

Gowa, sehingga raja Gowa merasa tersinggung atas kejadian itu. Apalagi Sule DatuE pada saat itu akan menuju ke istana BallakaeriE (*SalassaE*) di Gowa, dimana di tempat itu telah menunggu isteri Arung Teko yang telah berselingkuh dengan Sule DatuE. Dalam peristiwa itu, raja Gowa telah menuding raja Bone berada di belakang pembunuhan itu. Atas peran Kompeni Belanda dalam kasus itu sehingga ketegangan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa dapat diatasi dengan baik.

Usai duel antara Arung Teko dan Sulle DatuE, maka Arung Teko yang keluar sebagai pemenang akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara oleh Kompeni Belanda dan tidak bisa keluar, dan setelah itu barulah dipindahkan dan dibuang ke Sailand. Pada masa itu juga, terjadi perebutan kekuasaan antara Kompeni Belanda dan Inggris. Gubernur Inggris pada waktu itu yang berkedudukan di Kalimantan, mengirim surat kepada Arung Teko yang sementara di penjara melalui utusan khususnya. Surat yang di bawa oleh utusan khusus Gubernur Inggris itu berisi ajakan kepada Arung Teko agar bersedia memberinya bantuan persenjataan, kalau Arung Teko bersedia melawan Kompeni Belanda. Arung Teko juga dijanji oleh Gubernur Inggris, bahwa kalau kalah dalam melawan Kompeni Belanda, maka Inggris siap untuk berhadapan dengan Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan.⁷³

Pengasingan terhadap Arung Teko ke tempat jauh oleh Belanda melapangkan kekuasaan Arumpone, La Patana Matanna Tikka karena sudah tidak ada lagi ancaman terhadap

Sailand, wilayah ujung Afrika Selatan. Dengan demikian selamatlah kedudukan La Patana sebagai raja Bone karena satu-satunya orang yang akan merebut kedudukannya adalah hanya Arung Teko. Dan di tempat inilah Arung Teko La Pasom-pareng meninggal dunia.

⁷³Abu Hamid, dkk. 2007, *op.-cit.*, hlm. 188-189

kedudukannya. Selama Arung Teko belum diasingkan oleh Belanda ke Sailon, (Srilangka), beliau merasa terancam terus karena Arung Teko juga berhak atas kedudukan itu. Setelah itu datang pula orang Soppeng untuk kedua kalinya yang meminta kepada Arumpone, La Patau Matanna Tika agar mau juga merangkap sebagai Datu di Soppeng, dan hal ini diterima dengan baik dan senang hati.

Pada tahun 1709, hubungan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa kembali mengalami ketegangan akibat adanya peristiwa memalukan yang dilakukan oleh anak Arumpone sendiri yang bernama La Padangsjati. Oleh karena takut atas perbuatan yang telah dilakukan itu sehingga La Padangsjati melarikan diri ke Kerajaan Gowa untuk meminta perlindungan. Raja Gowa pada saat itu adalah Sultan Abdul Djalil yang tiada lain adalah neneknya sendiri karena ibunya yang bernama I Mariama Karaeng Patukkangan adalah anak dari Sultan Abdul Djalil. Oleh karena itu, raja Gowa tentu saja memberikan perlindungan kepada cucunya sendiri. Pemberian perlindungan atas diri La Padangsjati karena raja Gowa menyadari bahwa pendirian Arumpone atas penegakan hukum di Kerajaan Bone tidak pilih kasih, sekalipun itu adalah anaknya sendiri.

Atas perlindungan yang diberikan oleh raja Gowa terhadap La Padangsjati, membuat Arumpone dan anggota *adat pituE* sedikit tersinggung dan berkeras tetap meminta agar La Padangsjati dikembalikan ke Bone untuk diadili. Namun permintaan itu ditolak oleh raja Gowa karena meyakini bahwa cucunya pasti akan dihukum sebagai akibat atas perbuatannya. Atas penolakan itu dan hasutan dari pihak Kompeni, maka Kerajaan Bone menyatakan perang terhadap Kerajaan Gowa dan telah menyadari sejak awal bahwa hal itu pasti akan terjadi. Ketika hubungan semakin memanas, raja Gowa, Sultan Abdul Djalil mangkat pada tanggal 18 September 1709. Baginda lalu digantikan oleh cucunya yang

bernama La Pareppa Tosappewali Sultan Ismail yang juga saudara kandung La Padangsjati. Penggantian ini banyak yang menilai bahwa hubungan antara kedua kerajaan ini akan semakin membaik karena La Pareppa Tosappewali adalah anak dari raja Bone La Patau Matannatikka.⁷⁴

Peperanganpun tak dapat dihindari antara kedua pihak yaitu antara ayah dan anak atau antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa. Di Dalam peperangan ini, Kompeni Belanda berhasil menyeret Datu Soppeng untuk membantu raja Bone. Kompeni Belanda lalu memberi jalan kepada pasukan Kerajaan Bone untuk masuk ke Tidung, sebuah kampung yang terletak di sebelah timur kota Jumpandang dan berpangkalan di sana. Sedangkan pasukan Kerajaan Gowa memilih daerah Katangka sebagai pangkalannya. Setelah Belanda melihat pertempuran terjadi antara keduanya, maka Belanda tampil untuk menengahinya, sehingga pada tanggal 19 Agustus 1710, Kompeni Belanda mendesak pihak Gowa menghentikan peperangan untuk mengadakan perdamaian. Perang antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone pada saat itu disebut *bundu pammanakang* atau perang antara anak dan bapak.⁷⁵

La Patau Matanna Tikka adalah raja Bone yang pertama kali

⁷⁴Mattulada, 1999. *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, *op.cit.* hlm. 281; Baca juga : Abu Hamid, dkk. 2004. *Op.cit.*, hlm.194; Daeng Patunru, 1969, *Sejarah Gowa*, *op.cit.*, hlm.73-74; Daeng Patunru, 1989, *Sejarah Bone*, *op.cit.*, hlm. 210.

⁷⁵Daeng Patunru, 1968, *op.cit.*, hlm. 74-75. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *bundu pammanakang* diakhiri dengan satu perjanjian yang berisi delapan diktum, yaitu; 1] Perjanjian-perjanjian tahun 1667 dan 1669 diperbaharui oleh semua pihak yang bersangkutan.2] Kerajaan Gowa harus membayar ongkos peperangan. 3] Kerajaan Gowa harus menyerahkan kepada Kompeni semua meriam yang besar. 4] Sultan Kerajaan Gowa akan menyerahkan orang-orang yang telah menyeberang (*overloopers*), baik dari pihak Kompeni maupun dari pihak sekutu-sekutunya.5] Gerbang-gerbang atau tembok-tembok pertahanan Kerajaan Gowa harus dirusak-kan dan tidak boleh lagi mendirikan bangunan

mengangkat *matoa* bagi orang-orang Wajo yang berada di Makassar. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang Wajo yang ada di Makassar ada yang mengurusinya dan memimpinnnya sehari-hari. Ketika itu pula, La Patau Matanna Tikka, selain sebagai Arumpone, beliau juga merangkap sebagai *Ranreng Tua di Wajo*. Dan orang pertama yang diangkat oleh beliau sebagai *matoa* Wajo yang pertama adalah La Patelleng Ammana Gappa, oleh karena itu pula Ammana Gappa dinamakan *matoa* Wajo. Selain itu, La Patau diakhir masa jabatannya (1714) membuka arena sabung ayam dan mengundang seluruh *TellumpoccoE* (Bone, Soppeng dan Wajo). Dari Wajo, datang La Salewangeng Arung *Matoa* Wajo untuk mengikuti acara tersebut, dan ikut bersamanya seorang kemanakannya yang bernama La Maddukkelleng Daeng Simpuang Puanna La Tobo Arung Peneki.

Dalam permainan sabung ayam itu, ayam Arung *Matoa* Wajo melawan ayam petaruh dari Arumpone. Ayam Arumpone kalah sehingga para pengawalnya dan para bangsawan merasa malu atas kejadian itu sehingga salah seorang di antara bangsawan itu melemparkan bangkai ayam tersebut ke tengah-tengah kerumunan orang-orang Wajo. Bangkai ayam yang dilemparkan tersebut, mengenai Arung *Matoa* Wajo yang juga berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang Wajo. Kejadian itu membuat La Maddukkelleng marah dan mengamuk, dan dengan mata gelap, ia memburu dan menikam orang yang melemparkan bangkai ayam tersebut sampai meninggal di tempat. Setelah mengamuk

yang demikian tanpa izin dari Kompeni. 6] Daerah-daerah Sudiang, Kajang dan Selayar yang kesemuanya dahulu telah diberikan kepada raja Gowa, harus dikembalikan kepada Kompeni. 7] Raja Gowa akan mengakui La Padangsajati selaku Arung Palakka, akan tetapi tidak lagi memberikan kepadanya gelaran *Karaeng Katangka* atau gelaran lain sesuai adat kebiasaan orang Gowa. 8] Suatu utusan dari Sultan akan berangkat ke Betawi untuk meminta am-punan dan pengesahan perjanjian ini.

dan melakukan penikaman itu, La Maddukelleng melarikan diri kembali ke Wajo. Beberapa hari kemudian, Bone mengirim utusannya ke Wajo untuk meminta kepada Arung *Matoa* Wajo agar mau menyerahkan La Maddukelleng kepada Bone untuk diadili. Atas permintaan itu, maka Arung *Matoa* Wajo menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melarikan diri ke Kalimantan. Sejak itulah La Maddukelleng menetap di Kalimantan dan kemudian menjadi raja Pasir atas nama isterinya.⁷⁶ Tidak lama setelah peristiwa La Maddukelleng itu, maka Arumpone La Patau Matanna Tikka meninggal dunia pada tahun 1714. Nama anumertanya adalah La Patau Matanna Tikka WalinonoE To Tenri Bali MalaE Sanrang Sultan Alimuddin meninggal dunia di Nagauleng, Cenrana.

Setelah perang keluarga dipandang selesai dan dibayar sangat mahal oleh Kerajaan Gowa, maka susul menyusul datangnya kesulitan yang dialami oleh raja Gowa La Pareppa Tosappewali. Golongan bangsawan dan kaum opsisi dalam istana mernggugat posisi La Pareppa Tosappewali. Menurut para oposisi, terutama dari kalangan keluarga raja-raja Tallo dan Bate Salapang, seorang yang harus dinobatkan menjadi raja Gowa, haruslah dipilih dari putera mahkota, atau *Ana' Karaeng ri Gowa* sendiri, yang dihitung dari garis keturunan ayah. La Pareppa Tosappewali, jika dihitung dari garis keturunan ayahnya, maka ia anak dari La Patau Matanna Tikka, Sultan Alimuddin, raja Bone, tidak bisa menjadi raja karena tidak termasuk putera mahkota. Gugatan kelompok opsisi ini lebih memanas lagi karena dikompори oleh pihak Kompeni Belanda di Fort Rotterdam, sehingga pada akhirnya Dewan *Bate Salapang Butta* Gowa, atas kesepakatan Kompeni Belanda

⁷⁶Siardin Andi Djemma dan Sudirman Sabang, 2010. *Sejarah dan Perjuangan La Maddukelleng, Arung Matoa Wajo-Sultan Pasir*. Wajo: Lampena Intimedia bekerjasama dengan Pemkab Wajo, hlm. 29-30

menurunkan La Pareppa Tosappewali Sultan Ismail pada tanggal 20 Agustus 1712. Beliau hanya mengendalikan pemerintahan di Kerajaan Gowa selama dua tahun lamanya.⁷⁷

Ketika Sultan Ismail telah dimakzulkan dari kedudukannya, maka oleh Belanda bersama Dewan *Bate Salapang* lalu mengangkat I Mappaurangi Sultan Sirajuddin. Pengangkatan ini pula menjadi pertentangan di kalangan istana karena terdapat salah seorang bangsawan Tallo yang juga berhak atas kedudukan itu, yaitu Karaeng Bontolangkasa. Karaeng Bontolangkasa dikesampingkan pengangkatannya oleh karena yang bersangkutan sejak lama tidak pernah mau bekerjasama dengan pihak Kompeni Belanda. Selain itu, beliau juga telah menembak mati seorang puteri dari Sultan Ismail, dan setelah itu beliau meninggalkan Butta Gowa. Atas kesalahannya itu, beliau tidak dijatuhi hukuman atas kesalahannya oleh karena derajat kebangsawanannya yang tergolong tinggi. Sebagai hukuman atas perbuatannya, maka beliau diperkenankan tinggal di Kampung Beru dalam kota Jumpandang, namun tidak lama kemudian pindah ke Sumbawa. Tahun 1721, barulah beliau kembali ke Gowa setelah mendapat pengampunan dari pemerintah Kerajaan Gowa atas usaha Mangkubumi Karaeng Bontosunggug.⁷⁸

Sementara itu, di Kerajaan Bone yang naik menjadi raja Bone menggantikan La Patau Matanna Tikka adalah anaknya sendiri yang bernama Batari Toja Daeng Talaga (1714-1715). Beliau juga merangkap sebagai Datu Luwu dan Datu Soppeng, dan sebelumnya beliau adalah Arung Timurung dan setelah diangkat menjadi Arumpone, maka jabatan sebagai Arung Timurung diserahkan kepada adiknya yang bernama We Patimana Ware yang

⁷⁷Daeng Patunru, 1968, *op.cit.*, hlm. 75-76; Baca juga; Mattulada, 1999, *op.cit.* hlm. 282.

⁷⁸*Ibid.* Hlm. 77

juga merangkap sebagai Arung Citta. Oleh karena banyak sekali rintangan yang dihadapi dalam kalangan istana, sehingga beliau akhirnya menyerahkan tahtanya kepada saudara laki-lakinya yang bernama La Padangsajati Toappamole Arung Palakka. Beliau sendiri pergi ke Gowa untuk meminta perlindungan kepada Raja Gowa, La Pareppa Tosappewali yang juga adalah saudara kandungnya sendiri. Hubungan antara Kerajaan Bone, Gowa dan sekitarnya pada masa pemerintahan tidak banyak yang dapat dicatat hingga beliau meletakkan jabatannya sebagai raja Gowa, Bone dan Soppeng. Yang banyak diketahui bahwa beliau sangat dicintai oleh rakyatnya karena beliau berhati mulia.

Hubungan Kompeni Belanda dengan Kerajaan Bone nampak akrab sekali pada masa pemerintahan Raja Bone, Batari Toja Daeng Talaga (1724-1749). Kondisi ini membuat kurang kondusif hubungan antara raja Bone dengan para pembesar istana sehingga beliau kurang disenangi, apalagi beliau lebih banyak tinggal di istana Bontoala, Ujung Pandang dibanding tinggal di Bone. Sementara itu, suaminya (arung Kaju) diangkat menjadi *paddanreng* (wakil raja), berniat menjatuhkan isterinya sebagai raja Bone. Setelah mengetahui niat jahat suaminya itu, maka iapun lalu menceraikan suaminya dan mengusirnya dari Tana Bone. Arung Kaju yang telah diusir itu, akhirnya pergi ke Mandar bersama Karaeng Bonto Langkasa untuk menunggu kedatangan La Maddu-kelleng yang kabarnya akan datang ke Tanah kelahirannya. Karaeng Bonto Langkasa juga tidak senang terhadap raja Bone karena dinilai sangat dekat dengan Kompeni Belanda, sebagaimana Batari Toja Daeng Talaga. Dengan demikian, Arung Kaju, Karaeng Bonto Langkasa dan La Maddukelleng akan menjalin kerjasama untuk melawan Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan.⁷⁹

Kerjasama antara ketiganya terbukti dikemudian hari, setelah bulan Mei 1736, La Maddukelleng bersama pasukannya telah sampai di Penrang. Di daerah ini, beliau banyak mendapat pengikut dan seterusnya berangkat ke Sengkang dan bertemu dengan La Salewangeng, Arung *Matoa* Wajo. Peneki lalu diserang dan berhasil mendudukinya, kemudian beliau diangkat menjadi Arung Peneki. Tanggal 23 Juli 1736, daerah ini diserang oleh Belanda bersama dengan Bone. Awalnya La Maddukelleng terdesak, namun bantuan dari Arung Kaju dan Karaeng Bontolangkasa datang dengan cepat sehingga Wajo tidak dapat diserang. Pasukan Karaeng Bontolangkasa dan Arung Kaju berhasil merebut Maros, lalu me-nyerang pula Pangkajene, Sigeri dan Mandalle. Tetapi karena bantuan Belanda datang dari Tanete dan Mandar sehingga orang-orang Gowa dan pasukan Arung Kaju dipukul mundur, bahkan Arung Kaju sendiri tewas.⁸⁰

Pada bulan April dan Mei 1737, pasukan Wajo dan Kutai menyerang Bone Utara, Sidenreng dan Soppeng, dan bulan Juli-Agustus 1737 barulah dicapai suatu perdamaian setelah ketiga kerajaan itu mempersembahkan denda perang dan berjanji akan

⁷⁹Hamid, 2007. *Op.cit.*, hlm. 203-204. Dalam sumber ini juga dijelaskan bahwa Arumpone Batari Toja setelah mengetahui bahwa La Maddukelleng telah mendarat di Wajo, berangkat ke Ujung Pandang untuk berunding kepada Kompeni Belanda. Diserbulah Bone oleh La Maddu-kelleng, ada juga pasukan Karaeng Bonto Langkasa, dan Arung Kaju yang menghasut orang Bone untuk melawan Arumpone. Setelah membumi-hanguskan Bone, La Maddukelleng kembali meminta *sabbhu-katina* (per-sembahan) Wajo yang pernah diberikan kepada Bone pada masa peme-rintahan Petta To Risompae. Maka kembalilah Wajo menjadi negeri merdeka dari kekuasaan Bone. Diangkatlah La Maddukelleng menjadi Arung *Matoa* Wajo menggantikan pamannya.

⁸⁰Muhammad Abduh, dkk.1985.*Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*.Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, hlm.38

mengembalikan harta benda Wajo yang telah dirampas oleh La Tenritatta Arung Palakka dan Arung Belo yang merupakan denda perang pada waktubenteng Tosora direbut pasukan Bone-Soppeng dan VOC pada waktu perang tahun 1670. Dan setelah Addatuang Sidenreng menyerah, maka pasukan La Maddukelleng dan Sultan Adji Muhammad Idris menyerang Barakka', Enrekang, Letta', Kassa dan Batulappa karena telah berpihak kepada Belanda. Ketika La Maddukelleng ingin menyerang Watampone, tiba-tiba duta keliling Kerajaan Bone datang dan melaporkan bahwa Arumpone Batari Toja (masa pemerintahan kedua kalinya) dan sebagian besar pembesar kerajaan telah melarikan diri ke Jumpandang. Karena persoalan itu, sehingga orang-orang Bone ingin mengganti rajanya, dan pada saat itu bahkan telah dilantik La Oddangriu sebagai Arumpone atas kehendaknya sendiri pada tanggal 9 September 1737, setelah sebelumnya telah memecat Batari Toja Daeng Talaga sebagai Arumpone. Dan setelah itu, semua benda-benda *arajang* Kerajaan Bone dibawa serta ke Tanete.⁸¹

Setelah La Oddangriu diangkat sebagai Arumpone dan Datu Soppeng, maka terjadilah pengelompokan di kalangan rakyat dan istana Bone. Sebagian besar rakyat yang ada di Kerajaan Bone mengakui Denradatu Sitti Nafisa sebagai Arumpone, sementara orang-orang Bone yang tinggal di Jumpandang mengakui Batari Toja sebagai Ratu Bone dan sebagian lagi mengakui La Oddangriu Datu Tanete sebagai Arumpone⁸². Hal yang sama juga terjadi di Soppeng, yaitu bahwa orang-orang Soppeng yang tinggal di

⁸¹Siardin Andi Jemma dan Sudirman Sabang, 2010. *Op.cit.*, hlm.62-63

⁸²Denratu Siti Nafisa oleh sebagian orang-orang Bone mengang-gapnya sebagai Ratu oleh karena La Maddukelleng telah memanggilnya pulang dari Gowa untuk diangkat menjadi Arumpone, akan tetapi pengangkatan itu tidak disetujui oleh Dewan Hadat *Pitu* di Bone sehingga yang bersangkutan lalu pergi ke rumah La Maddukelleng untuk tinggal. Sedangkan pengakuan oleh

Jumpangang mengakui Batari Toja sebagai Ratu Bone dan Datu Soppeng, sedangkan yang tinggal di Soppeng mengangkat La Passaung Arung Mengek Datu Lompollek sebagai raja dan sebagian lagi meng-anggap La Oddangriu Datu Tanete sebagai rajanya.

Jalinan kerjasama antara La Maddukelleng dengan Karaeng Bontolangkasa dan Arung Kaju dalam melawan Belanda oleh karena Karaeng Bontolangkasa merasa sakit hati atas pengangkatan Sultan Sirajuddin sebagai raja Gowa menggantikan Sultan Ismail. Karaeng Bontolangkasa merasa lebih berhak dari Sultan Sirajuddin, namun dikesampingkan oleh dewan *Bate Salapang* dan Kompeni Belanda karen tindak tanduknya selama ini selalu memusuhi Belanda. Lebih dari itu, beliau pernah menembak mati anak raja Gowa Sultan Ismail. Oleh karena derajat kebangsawanannya yang tinggi dan menurut adat di Gowa, beliau tidak boleh dibunuh atas kesalahannya itu, sehingga pemerintah Kerajaan Gowa mengizinkan tinggal di Kampung Beru Jumpangang, tetapi tidak lama kemudian beliau pergi ke Sumbawa dan menikah di sana ketika beliau untuk kedua kalinya datang. Sedangkan Arung Kaju bekerjasama dengan La Maddukelleng oleh karena beliau juga telah dipecat sebagai *jenneng* di Bone oleh isterinya Batari Toja Daeng Talaga.

Pada bulan April 1739, Karaeng Bontolangkasa bersama La Maddukelleng menyerang Kompeni Belanda dalam kota Jumpangang dan mengepung benteng Jumpangang dari segala

sebagian masyarakat terhadap La Oddariu Datu Tanete sebagai Arumpone dan Datu Soppeng oleh karena yang bersangkutan telah membawa serta benda-benda *arajang* Kerajaan Bone dan Soppeng. Masyarakat Sulawesi Selatan menganggap bahwa siapa yang memegang benda-benda *arajang* maka dialah yang dianggap sebagai raja. Hal ini berkaitan dengan konsep bahwa pemilik kerajaan bukanlah orang yang telah diangkat menjadi raja tetapi pemilik kerajaan adalah *arajang* itu sendiri. Itulah sebabnya sehingga siapapun yang diangkat sebagai raja di Bone atau kerajaan lain tanpa disertai benda-benda *arajang*, maka yang bersangkutan dianggap kurang legitimasinya.

penjuru. Sedangkan raja Gowa Abdul Khair Almansur bersama pengikut-pengikutnya meninggalkan ibukota kerajaan Gowa dan masuk ke dalam benteng Ujung Pandang untuk mendapat perlindungan dari Belanda. Sedangkan raja Bone Batari Toja Daeng Talaga, pada saat itu lebih dahulu berada di benteng Jumpandang untuk meminta perlindungan dari Belanda karena pada tahun 1737 baginda diturunkan dari tahtanya oleh Datu Tanete, La Oddangriu Sultan Jusuf Fakhruddin *matinroE ri musu'na*. Tentara Karaeng Bontolangkasa yang berhasil menduduki ibukota Kerajaan Gowa lalu memak-zulkan Sultan Abdul Khair Almansur dan Karaeng Bonto-langkasa sendiri diangkat menjadi raja Gowa pada tanggal 18 April 1739. Pertempuran di dalam kota Jumpandang berlangsung sangat seru dan istana raja Bone di Bontoala dibakar habis oleh pasukan Kerajaan Wajo. Tanggal 17 Juli 1739, barulah pasukan Belanda dapat memukul mundur pasukan Wajo dan setelah itu barulah pasukan Belanda menyerbu masuk ke ibukota kerajaan. Dalam pertempuran itu, Karaeng Bontolangkasa terkena tembakan nyasar oleh pasukannya sendiri sehingga pada tanggal 8 September 1739 beliau meninggal dunia di Kampung Bonto Parang.⁸³

Arung Matoa Wajo La Maddukelleng bersama pasukannya kembali ke Wajo dan Baginda terus bergiat memperkuat persenjataan kerajaannya untuk menghadapi serangan-serangan pembalasan dari Belanda dan raja Bone yang pasti akan terjadi. Benda-benda kerajaan Gowa atau *Arajang Gowa* yang telah dirampas oleh tentara Belanda dari tangan Karaeng Bontolangkasa, diserahkan kembali kepada raja Gowa Sultan Mallawanggau

⁸³Daeng Patunru, 1968. *Op.cit*, hlm. 78-79. Baca juga: Mukhlis, Edward dan Ina Mirawati, 2002. *Batara Gowa; Messianisme dan Gerakan Sosial di Makassar*. Jogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm. 116

yang waktu itu telah menduduki kembali tahta Kerajaan Gowa dan Karaeng Bontomajannang juga kembali pada posisi semula sebagai Mangkubumi kerajaan. Dan pada tanggal 28 Juli 1742, Sultan Abdul Khair wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Kudus. Dan pada tahun 1753, beliau tiba-tiba wafat karena diduga diracuni oleh seseorang yang tak dikenal.⁸⁴

Sementara itu, kondisi Kerajaan Bone pasca kematian Batari Toja Daeng Talaga, kurang kondusif disebabkan pengangkatan La Temmasonge sebagai Arumpone kurang disetujui oleh para pembesar kerajaan Bone. Hal ini erat terkait atas pembunuhan yang telah dilakukan terhadap saudara iparnya yang bernama Arung Kaju, suami dari Batari Toja Daeng Talaga. Karena persoalan itulah sehingga pengangkatan La Temmasonge sebagai raja Bone terkatung-katung karena tidak mendapatkan pengesahan. Atas kenyataan itu, maka La Temmasonge sendiri meminta dukungan kepada Belanda di Fort Rotterdam agar kedudukannya sebagai *mangkau* di Bone bisa dikukuhkan. Selain itu, datang dukungan dari Arung Berru, Addatuang Sidenreng yang meminta kepada Kompeni Belanda agar kedudukan La Temmasonge segera dikukuhkan. Dukungan kedua raja tersebut kemudian didukung pula oleh seorang pembesar Kompeni Belanda di benteng Fort Rotterdam yang bernama Asmaun. Oleh karena itulah sehingga pada tahun 1752 atau dua tahun setelah diangkat menjadi raja Bone, barulah dikukuhkan atas bantuan Kompeni Belanda. Dengan selesainya pengukuhan La Temmasonge sebagai Arumpone, untuk sementara persoalan itu dianggap telah selesai dan Kompeni Belanda mengizinkan beliau tinggal di Bone sebagai raja yang merangkap Datu di Soppeng.⁸⁵

⁸⁴*Ibid.* Hlm. 112

⁸⁵*Ibid.* 208

Sebelum diangkat menjadi raja Bone, beliau adalah *punggawa* atau panglima perang Kerajaan Bone mendampingi Batari Toja Daeng Talaga. Baginda terkenal sebagai ahli strategi perang, berani dan bijaksana dalam usaha memakmurkan Kerajaan Bone. Untuk mempererat hubungan persaudaraan antara kerajaan di Sulawesi Selatan, Baginda sering sekali mengunjungi kerajaan-kerajaan tetangganya. Selain itu, Baginda juga terkenal dengan kebiasaan berburu rusa, menangkap ikan, serta membuat rumah dan perahu sehingga Baginda banyak meninggalkan aturan-aturan tentang hal itu. Karena kebijakan-kebijakannya yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga pada tanggal 23 April 1767, utusan dari Kerajaan Gowa datang untuk menemui Baginda yang dipimpin oleh Karaeng Tombolo dengan membawa *kalompoang arajang* Kerajaan Gowa untuk diserahkan kepada raja Bone. Tujuan utusan Kerajaan Gowa menyerahkan benda-benda kebesaran Kerajaan Gowa tersebut adalah untuk meminta restu raja Bone agar menyetujui Mallisujawa Arung Mampu untuk menduduki tahta Kerajaan Gowa dan permintaan itu diterima baik oleh raja Bone. Baginda wafat pada tahun 1775 di Malimongang, Makassar dan itulah sebabnya beliau digelar *MatinroE ri Malimongang*.⁸⁶

Diangkatnya I Mallisujawa Daeng Ri Boko sebagai raja Gowa atas dukungan raja Bone La Temmasonge Datu Baringeng tidak berjalan mulus oleh karena sebagian besar pembesar kerajaan menganggap Baginda telah merampas tahta saudaranya sendiri Batara Gowa Amas Madina sehingga Baginda meninggalkan tahtanya. Pendapat umum yang menyatakan I Mallisujawa Daeng

⁸⁶Ali, 1986 *Bone Selayang Pandang* Watampone: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone, hlm. 56-57. Baca juga; Andi Palloge. 1990. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Watampone: Yayasan Al Muallim, hlm. 171-172 ; Daeng Patunru. 1989. *Op.cit.*, hlm. 214

Riboko meninggalkan tahta itu tersirat keinginan keluarga dan mungkin juga rakyat, agar tahta kerajaan tetap dikosongkan, hingga kerinduan dan harapan kembalinya Batara Gowa untuk menduduki kembali tahta kekuasaannya terwujud. Itulah sebabnya I Mallisujawa Daeng Riboko menduduki tahta Kerajaan Gowa hanya berlangsung sekitar dua tahun saja (23 April 1767 hingga 3 Januari 1769). Dan untuk membuktikan bahwa Baginda tidak seperti yang dituduhkan kepadanya, maka ia meninggalkan tahtanya dan pergi menetap di sebuah kampung nelayan yang terletak antara *Gouvernement Makassar* yang merupakan wilayah kekuasaan VOC, Kerajaan Gowa, dan daerah Turatea yang pada waktu itu berada di bawah pengawasan Kerajaan Bone. Dengan demikian tahta Kerajaan Gowa menjadi kosong sehingga untuk mengisi kekosongan itu, maka diangkatlah I Temmasonge Karaeng Katangka sebagai *Sombaya* dengan gelar Sultan Zainuddin. Setelah dilantik, beliau kemudian me-nandatangani perjanjian-perjanjian yang pernah dicapai antara Kerajaan Gowa dan VOC pada tanggal 30 Agustus 1770.⁸⁷

Pada awal pemerintahan Sultan Zainuddin dapat dikatakan aman-aman saja karena tidak ada pergolakan yang berarti. Namun keadaan yang dikatakan aman itu, tiba-tiba menjadi hangat oleh karena tanpa diketahui oleh pemerintah Kompeni Belanda maupun pihak Kerajaan Gowa, telah berlangsung suatu rencana dan persiapan pemberontakan yaitu tampil seseorang yang menamakan dirinya Batara Gowa I Sangkilang. Beliau adalah seorang tokoh yang tampil dengan pakaian kebesaran, mengenakan songkok yang dilingkari pita emas, dan keris emas, menghadiri pesta yang diadakan di Sompu, dan menuju ke tempat pesta seraya mengambil tempat duduk terdepan. Kehadirannya

⁸⁷Mukhlis, Edward, Ina Mawarti. 2002. *Ibid.* Hlm. 128-129

membuat heran yang punya pesta dan rakyat yang hadir, karena mengenakan pakaian kebesaran ala seorang raja, akan tetapi datang ke pesta itu tanpa disertai pengiring. Orang yang melihatnya lalu menanyakan namanya, namun dia tidak mau menyahut sehingga orang-orang atau penduduk lalu menamainya I Sangkilang. Melihat orang-orang heran melihatnya, pada akhirnya dia berkata: Apakah di antara anda tidak ada yang mengenal saya? Karena tidak ada orang yang menjawab, maka ia memperkenalkan dirinya bahwa: Ia adalah Batara Gowa yang dahulu pernah ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Sailon. Mendengar ucapan itu, maka gemparlah semua orang yang ada di pesta itu, ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya.⁸⁸

Kehadiran Batara Gowa I Sangkilang lama kelamaan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan raja-raja kecil, ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya pengikut beliau yang tentu saja mengancam kedudukan raja Gowa Sultan Zainuddin. Pengaruh Batara Gowa yang semakin besar dan meluas itu, akhirnya diketahui juga oleh pemerintah VOC di Makassar yang juga menganggap bahwa kehadiran Batara Gowa juga dipandang sebagai ancaman kedudukan kekuasaan VOC. Begitu cepat pemerintah Belanda bereaksi dan memerintahkan Brugman untuk menyerang dan menangkap Batara Gowa. Rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh Brugman diketahui oleh Batara Gowa, sehingga

⁸⁸*Ibid.* Hlm. 130-131. Berita tentang kembalinya tokoh yang diharapkan dan didambakan, yaitu Batara Gowa, cukup menggemparkan raja-raja kecil dan bahkan mereka meragukan kebenarannya. Menurut laporan Belanda bahwa yang bersangkutan telah diasingkan ke pulau Sailan sehingga tidak mungkin akan kembali ke Gowa untuk menuntut haknya atas tahta Kerajaan Gowa. Namun karena keberhasilannya men-ceriterakan perjalannya dari awal hingga tibanya di Kampung Sompu cukup meyakinkan, akhirnya mereka percaya bahwa yang muncul itu adalah benar Amas Madina atau Batara Gowa yang kemudian disebut I Sang-kilang.

Batara Gowa mendahului melakukan serangan terhadap Belanda. Sebelum Batara Gowa menyerbu Kerajaan Gowa, terlebih dahulu ia melakukan penyerangan terhadap *Noorder Provincie* dan berhasil mendudukinya dan menguasai tiga distrik *Noorder Provincie* dan pos VOC di Maros dan semua penduduknya berpihak kepada Batara Gowa. Serangan ini adalah reputasi luar biasa karena hanya dalam waktu singkat beliau dapat mendudukinya. Sebaliknya dalam waktu singkat pula dapat diambil alih kembali oleh pasukan Bone di bawah pimpinan *Punggaawa Datu Baringeng* pada tanggal 21 Mei 1777. Setelah itu, Batara Gowa dan pasukannya menyingkir ke Tallo dan Ratu Tallo Sitti Saleha menyatakan bahwa kerajaannya sudah terpisah dengan Kerajaan Gowa dan menyerahkan tongkat kebesaran kerajaan kepada Batara Gowa dan menyatakan berpihak kepadanya. Dengan demikian tahta Kerajaan Tallo dapat dikuasai. Namun kondisi tidak terlalu lama dikuasai karena beberapa waktu kemudian Tallo dapat diambil alih pasukan Aru Pancana, raja Tanete sekutu VOC.⁸⁹

Selanjutnya, Batara Gowa, Arung Palakka (nenek Batara Gowa), dan pasukannya meninggalkan Tallo dan menguasai ke daerah pedalaman Kerajaan Gowa. Dan setelah beberapa hari berada di pedalaman Kerajaan Gowa, mereka lalu memasuki pusat pemerintahan Kerajaan Gowa dan merebutnya pada bulan Juli 1777. Penyerbuan ini tidak mendapat perlawanan dari pasukan kerajaan, kecuali dari pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 200 orang Eropa dan empat kesatuan tentara. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda dibantu oleh pasukan Bone di bawah pimpinan *maddanreng* Bone. Namun demikian, pasukan Belanda terdesak dan dipukul mundur oleh pasukan Batara Gowa karena ternyata pasukan Bone diperbantukan itu tidak melakukan apa-apa waktu

⁸⁹*Ibid.* Hlm. 140-141

terjadi pertempuran dan hanya diam memperhatikan jalannya perang. Setelah itu, Batara Gowa dapat menguasai ibukota kerajaan dan memakzulkan raja Gowa Sultan Zainuddin⁹⁰ dari tahtanya, selanjutnya Batara Gowa yang dinobatkan menjadi raja Gowa yang diabsahkan dengan menyerahkan kepadanya *kalompoang* (*ornament* kerajaan). *Arajang* atau *kalompoang* itu berhasil, direbut oleh pasukan Batara Gowa waktu mereka menyerbu masuk ke pusat pemerintahan.

Tampilnya Batara Gowa I Sangkilang sebagai raja Gowa tidak berlangsung lama atau hanya kurang lebih setahun. Pada masa ini pula, berkali-kali pasukan Belanda ingin merebut kembali tahta itu dari tangan Batara Gowa, namun tidak pernah berhasil karena beliau mendapat bantuan dari Bone, Soppeng dan Sidenreng. Oleh karena itulah Belanda tidak pernah lagi mencoba untuk mengusik ketenangan Batara Gowa sebelum adanya bantuan dari Batavia. Ketika pasukan bantuan tiba dari Batavia, maka VOC melakukan serangan mendadak pada tanggal 26 Juli 1778 dan berhasil membuyarkan pertahanan Batara Gowa I Sangkilang. Batara Gowa terdesak, akan tetapi berkat bantuan orang-orang Bone, Batara Gowa I Sangkilang dapat meloloskan diri dengan membawa semua benda-benda *arajang* atau *kalompoang*. Pasukan VOC memasuki Kalegowa dan menguasainya pada tanggal 27 Juni 1778. Setelah penguasaan itu, maka langkah selanjutnya yang akan

⁹⁰Raja Gowa Sultan Zainuddin setelah direbutnya ibukota kerajaan, maka beliau pergi ke Fort Rotterdam untuk melaporkan kondisi ibukota kerajaan. Beliau melaporkan bahwa dirinya telah diturunkan dari tahtanya oleh Batara Gowa dan beliau sendiri yang menjadi raja Gowa. Oleh karena itu, Direktur dan Gubernur VOC memberikan izin kepada Sultan Zainuddin dan keluarganya untuk menetap dan tinggal di Mattoanging. Di tempat itu pula beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, kemudian diberi gelar anumerta *Tumenanga ri Mattoanging*.

diambil oleh VOC adalah memaksa rakyat untuk tidak mengakui Batara Gowa I Sangkilang sebagai raja Gowa.⁹¹

Nenek Batara Gowa, yaitu Arung Palakka tiba-tiba meninggal dunia pada bulan Januari 1779 akan membawa dampak terhadap perjuangan Batara Gowa karena beliau itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap orang-orang Bugis dan Makassar. Keikutsertaan nenek Batara Gowa ini dimaksudkan sebagai tokoh pemikat agar orang-orang Bugis dan Makassar tetap ikut kepadanya. Kesetiaan rakyat Gowa pada Batara Gowa karena *kalompoang* atau *regalia* atau *ornamen* kerajaan masih ada di tangan Batara Gowa I Sangkilang, khususnya *Sudanga*, benda yang dipandang sebagai sumber pengabsahan kedudukan kekuasaan seorang raja. Sementara itu, VOC tidak pernah berhenti untuk memadamkan perlawanan Batara Gowa dengan mengumumkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap hidup Batara Gowa I Sangkilang akan diberi hadiah sebesar 2.000 piaster Spanyol dan kepada siapa yang dapat menyerahkan dalam keadaan meninggal dunia akan diberi hadiah 1.000 piaster Spanyol.

Hal inipun tidak pernah berhasil hingga VOC menghentikan serangannya terhadap beliau, apalagi pada saat memasuki tahun

⁹¹Usaha VOC untuk memaksa rakyat tidak mengakui Batara Gowa sebagai junjungan mereka tidak membawa hasil yang memuaskan. Penduduk ternyata tetap mengakui Batara Gowa I Sangkilang sebagai raja mereka dan tetap tidak mau menerima atau mengangkat raja baru. Kenyataan itu menyebabkan pasukan VOC tetap menduduki Kale Gowa sebagai daerah taklukan, dan tidak akan menyerahkan kepada raja Gowa. Untuk dapat memaksakan agar rakyat Gowa tidak mengakui Batara Gowa I Sangkilang sebagai raja mereka, maka pihak VOC melakukan berbagai aksi brutal ke daerah-daerah pedalaman, termasuk membumi-hanguskan kampung-kampung yang dipandang penduduknya berpihak pada Batara Gowa I Sangkilang untuk memaksa penduduk agar meninggalkan batara Gowa, tetap tidak berhasil.

1780, terjadi perang antara pihak Inggris dan Belanda.⁹² Apalagi Gubernur Belanda pada tanggal 16 Juni 1780 meninggal dunia, sehingga Belanda berpandangan bahwa lebih baik baginya jika tidak lagi melibatkan dirinya dalam kesulitan-kesulitan karena Kompeni harus menghemat kekuatan-kuatannya menghadapi nanti serangan-serangan Inggris terhadap Kompeni di Indonesia. Gubernur Makassar Reyke, pengganti van der Voort hanya berusaha memperkecil jumlah pengikut-pengikut Batara Gowa I sangkilang, akan tetapi itupun tidak berhasil, pengaruh Batara Gowa I Sangkilang tetap besar.

C. Dari Belanda ke Pemerintah Inggris

Selama perang Inggris IV (1780-1784), VOC sendiri sudah hampir gulung tikar, dan VOC di Indonesia semakin terpisah dari negerinya di Belanda. VOC bukan hanya harus meminjam sekitar 2.300 prajurit dari Surakarta dan Jogyakarta guna mempertahankan Batavia dari serangan yang diduga akan dilancarkan oleh pihak Inggris (yang tidak pernah terjadi), melainkan juga meminta bantuan keuangan kepada pemerintah di negeri Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai melakukan penyelidikannya terhadap kondisi VOC dan berhasil mengungkapkan kebangkrutan, skandal, dan salah urus di segala segi. Dalam kurun Desember 1794 sampai Januari 1795, Prancis menyerbu negeri Belanda dengan penuh sukses dan membentuk pemerintahan bonekanya di sana. Pada tahun 1796, Heeren VII dibubarkan dan digantikan oleh suatu komite baru. Sesudah itu, pada tanggal 27 Desember 1799, serah terima koloni VOC kepada Pemerintah Belanda, VOC pun secara resmi dibubarkan. Wilayah-wilayah yang menjadi miliknya, kini menjadi

⁹²*Ibid.* Hlm. 150-151

milik pemerintah Belanda. Akan tetapi, hanya perubahan kecil yang terjadi di Indonesia, karena para pemegang jabatan masih tetap orang-orang lama dan tetap pula melakukan cara-cara lama.

Hubungan Belanda dengan Jawa dapat dikatakan agak stabil pada tahun 1792. Dalam teori, pihak Belanda berkuasa secara langsung atas daerah pesisir utara, tetapi dalam kenyataannya para penguasa lokal (bupati) lah yang bertindak sebagai wakil-wakil mereka. Di wilayah pedalaman, perjanjian tahun 1749 yang telah menyerahkan kedaulatan atas Kerajaan Mataram kepada VOC tidaklah mempunyai arti, dan hubungan pihak Belanda dengan istana-istana Jawa dalam kenyataannya hanya berbentuk persekutuan belaka. Para *resident* Belanda di istana-istana bertugas sebagai duta, bukan sebagai penguasa-penguasa penjajah. Pihak Jawa telah menciptakan justifikasi mithologis bagi hubungan mereka dengan pihak Belanda, yang ditemukan terutama di dalam teks-teks yang berjudul *Serat Baron Sekendher* (Kitab tentang Baron Sekender). Teks-teks ini menggambarkan orang-orang Belanda sebagai ahli waris bagi kedaulatan (dan kekuatan-kekuatan supranatural) Pajajaran, di Jawa Barat dan sekutu senior alami dari raja-raja Jawa Tengah, tetapi bukan sebagai kekuatan berdaulat di Jawa Tengah. Kelemahan militer pihak Belanda dan kekuatan militer negara-negara Jawa, khususnya Jogyakarta, mengandung arti bahwa tidak mungkin ada tuntutan di pihak Belanda untuk menjadi penguasa yang berdaulat di wilayah pedalaman.⁹³

Pada tahun 1808 mulai berlangsung suatu zaman baru dalam hubungan Jawa-Eropa. Negeri Belanda telah berada di bawah kekuasaan Prancis sejak 1795. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte

⁹³M.C. Rickfefs.2004. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Swerambi, hlm. 242-243

mengangkat adiknya Louis Bonaparte sebagai penguasa di negeri Belanda pada tahun 1806. Pada tahun 1808, Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal (1808-1811) dan untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis untuk melawan Inggris di Samudera Hindia. Daendels adalah seorang pemuja prinsip-prinsip pemerintahannya yang revolusioner. Dia membawa ke Jawa perpaduan antara semangat pembaharuan dan metode-metode kediktatoran, yang sebenarnya hanya menuai sedikit hasil dan justru banyak perlawanan. Dia berusaha untuk memberantas ketidakefisienan, penyelewengan dan korupsi yang menyelimuti administrasi Eropa, tetapi banyak dari langkah-langkah pembaruannya tak begitu berhasil. Dia memiliki perasaan tidak suka, yang muncul dari naluri-naluri antifeodalnya, terhadap para penguasa Jawa (bupati) di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Bagi Daendels, mereka bukan penguasa atau pemimpin atas masyarakat mereka, melainkan pegawai administrasi Eropa. Diapun mengurangi wewenang dan penghasilan mereka.

Pada bulan Mei 1811, kedudukan Daendels sebagai gubernur jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens, yang telah menderita penghinaan akibat menyerahkan Tanjung Harapan kepada pihak Inggris pada tahun 1806. Dia mampu bertahan cukup lama di Jawa hanya untuk melakukan hal yang sama. Pada tanggal 4 Agustus 1811, enam puluh kapal Inggris muncul di depan Batavia dan pada tanggal 26 Agustus 1811, kota tersebut, berikut daerah-daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens mundur ke Semarang, dimana Legium Mangkunegaran dan prajurit-prajurit dari Jogyakarta dan Surakarta bergabung dengannya. Pihak Inggris berhasil memukul mundur mereka dan, pada tanggal 18 September 1811, Janssens menyerah di dekat Salatiga.⁹⁴

Sementara itu, administrasi pemerintahan VOC kurang teratur selama berkuasa di Sulawesi Selatan, karena VOC lebih mementingkan perdagangan. Di samping itu, VOC terus menerus mendapat perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan. Sekalipun demikian VOC telah berhasil menanamkan dasar kekuasaan Belanda di daerah ini. Dan selama akhir abad ke-18 keadaan keuangan VOC menjadi parah yang menyebabkan menjelang tahun 1798 VOC segera dibubarkan oleh pemerintah Belanda setelah aktif selama lebih dua abad di Indonesia.⁹⁵ Berdasarkan *Staatsregeling* 1796 VOC dengan segala untung ruginya dioper oleh *Bataafsche Republiek*, sedang pimpinan urusan koloni diserahkan kepada sebuah dewan yang bernama *Raad der Aziatischen Bezettingen en Etablissements* yang mulai berfungsi tahun 1800. Dewan ini bekerja hanya sekitar sepuluh tahun lalu datang Inggris menguasai Indonesia pada tahun 1811. Dan sebelum kedatangan Inggris, daerah-daerah kekuasaan VOC yang diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda harus menyerahkan daerah-daerah itu kepada Inggris, yang meliputi Jawa, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura dan Sunda Kecil.⁹⁶

Pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas

⁹⁴*Ibid.* Hlm. 248 . Dalam sumber lain disebutkan bahwa pada waktu yang hampir bersamaan, Inggris bergiat menduduki koloni Belanda. Pada tahun 1806 Tanjung Pengharapan didudukinya, menyusul Maluku tahun 1811, yang memaksa gubernur general Jan Willem Janssens, yang baru dilantik menggantikan Daendels, melarikan diri ke Semarang. Inggris mengejar dan menyerangnya sehingga Janssens terpaksa menandatangani kapitulasi di Semarang pada tanggal 18 September 1811. Kapitulasinya memuat penyerahan tanpa syarat semua koloni Belanda kepada Inggris (Rasyid Asba. 2010. *Gerakan Sosial di Tanah Bugis: Raja Tanete La Patau Menentang Belanda*. Jogyakarta : Ombak, hlm.101

⁹⁵Sutherland, 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birikrasi*, (diterjemahkan oleh Sunarto), Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 34

⁹⁶Limbugau. 1985. *Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintahan*

Stamford Raffles 1811-1816 menjadi Letnan Gubernur wilayah koloni Belanda. Raffles kemudian mengirim para pejabat Inggris ke berbagai daerah koloni lainnya untuk mengambil – alih pemerintahan. Untuk wilayah Makassar dan daerah bawahannya dikirim Ricard Phillips 1812-1814. Setiba di Makassar dilakukan serah terima jabatan dari Letnan Kolonel Johan Caesar van Wikkerman (1809-1812) pada tanggal 6 Maret 1812. Acara ini menandai berakhirnya Pemerintahan Kolonial Belanda di Makassar. Ricard Phillips menganggap bahwa keadaan itu tidak menguntungkan kedudukan Inggris di Makassar. Ia berpendapat bahwa untuk dapat menjamin perdagangan Inggris di Makassar dan mematahkan perdagangan VOC, kedudukan Kerajaan Gowa perlu diperkuat dan dipertahankan.⁹⁷

Beberapa tahun sebelumnya, Kerajaan Bone sebenarnya telah menguasai secara keseluruhan wilayah kekuasaan VOC yang berada di *Noorder Provincie* (provinsi bagian Utara). Bahkan wilayah kekuasaan VOC lainnya yang berada di *Zuider Districten* (distrik-distrik bagian selatan) dan mengancam kegiatan pelayaran dan perdagangan VOC dengan melakukan perampokan. Kegiatan itu sudah dilakukan sejak tahun 1790, tiga tahun sebelum pihak Inggris mulai muncul di perairan Bantaeng dan Bulukumba dengan kapal perangnya. Bahkan menurut catatan bahwa sejak tahun 1796, penduduk di wilayah *Zuider Districten* sudah tidak pernah lagi melakukan penyerahan wajib sepuluh persen dari hasil

Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874. Jogyakarta: (Tesis) Universitas Gajah Mada, hlm. 52-53

⁹⁷PaEni, Edward, Ina Mirawati. 2002. *Batara Gowa: Messianisme dalam Gerakan Sosial di Tanah Makassar*. Jogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 169; Baca juga: Daud Limbugau, 1985. *Terben-tuknya Wilayah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Sela-tan*. Jogyakarta: Tesis pada Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Ma-da, hlm. 53

pendapatan mereka kepada VOC. Satu tahun kemudian (1797), pihak VOC sama sekali telah kehilangan pengaruh kekuasaan dan hak-hak mereka atas *Zuider Districten*. Keberhasilan untuk mematahkan kedudukan kekuasaan VOC di daerah itu berkat kerjasama antara raja Bone La Tenrituppu (1775-1812) dengan Inggris yang dicapai berdasarkan perjanjian rahasia yang dijalin oleh mereka pada tahun 1797. Inggris selanjutnya pada tahun itu juga menduduki dan merebut pos-pos VOC yang berada di Bantaeng dan Bulukumba.⁹⁸Dengan demikian, pihak VOC semakin tidak berdaya lagi menampakkannya sebagai pelindung dan perantara dan menyatukan kekuatan bersama sekutunya untuk menghadapi Inggris dan Bone. Akhirnya pada tahun 1812, Kota Makassar berhasil direbut oleh Inggris.

Sebelum penaklukan kota Makassar oleh Inggris, maka raja Bone La Tenrituppu wafat bulan Juni 1812 di Rompegading, Bontoala. Untuk menggantikannya, *Ade PituE* (Dewan Kerajaan Bone) mengangkat Toappatunru Arung Palakka (1812-1823) menjadi raja Bone. Berbarengan dengan itu, *kalompoang* Kerajaan Gowa diserahkan pula kepada Toap-patunru Arung Palakka. Menurut Toappatunru bahwa Arung Mampu lebih berhak menjadi raja Gowa, karena itu *kalompoang* diserahkan kepada beliau yang ketika itu tinggal di istana Rompegading, dibawah perlindungan raja Bone. Pada bulan Desember 1812 Arung Mampu dan pasukannya menyerang pertahanan pasukan pejabat Kerajaan Gowa, Karaeng Pangkajene, tetapi serangan ini gagal karena ia mendapat bantuan dari pasukan Inggris, Sidenreng dan Soppeng yang berhasil memukul mundur pasukan Arung Mampu. Atas keka-lahan itu, maka Arung Mampu menganjurkan kepada Raja

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 167

Bone Toappatunru agar mempersenjatai orang-orang Bugis yang ada di kota Makassar, dan itu dilakukan oleh raja Bone.⁹⁹Ini sikap penentangan secara terang-terangan yang diperlihatkan raja Bone terhadap Pemerintah Inggris di Sulawesi Selatan.

Meskipun telah terjadi kerjasama antara Kerajaan Bone dan Inggris dalam merebut dan menduduki Bulukumba dan Bantaeng pada tahun 1797, namun ketika Inggris telah dinyatakan sebagai pewaris dari koloni VOC-Belanda di Sulawesi Selatan dan telah menduduki kota Makassar, namun Kerajaan Bone tidak menyetujui hal tersebut. Penyerahan itu, oleh pihak Kerajaan Bone ditolak oleh karena dianggap bertentangan dengan isi perjanjian Bungaya 1667 pasal enam yang berisi antara lain bahwa; orang-orang Inggris harus diusir dari Celebes (Sulawesi). Juga karena penyerahan itu tidak disertai dengan peperangan atau pertempuran. Sikap penentangan Kerajaan Bone ini dianggap mengkhawatirkan pihak pemerintah Inggris di Makassar. Oleh karena itu, *Resident* Makassar, Ricard Phillips (1812-1814) mengingatkan raja Bone Toappatunru Arung Palakka (1812-1823), mengenai hubungan persahabatan antara Bone dengan Inggris pada tahun 1793. Hubungan persahabatan antara kedua belah pi-hak nampak nyata, ketika pada tahun 1797 Inggris membantu Bone menghancurkan pos-pos pertahanan Belanda di Bantaeng dan Bulukumba. Demikian juga, pada tahun 1800 Inggris membantu Bone memblokade pantai sebelah selatan Makassar, tetapi karena gagal menduduki Makassar, maka setelah itu Inggris meninggalkan daerah itu.¹⁰⁰

Upaya pemerintah Inggris melalui Richard Phillips untuk

⁹⁹Poelinggomang. dkk. 2004. *Op.,cit.,*. Hlm. 174

¹⁰⁰Poelinggoamng. dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan, Jilid I*. Makassar : Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Peme-rintah Provinsi Sulawesi Selatan, hlm.171-172

menjinakkan Raja Bone Toappatunru, ternyata tidak berhasil. Toappatunru Arung Palakka, bahkan mengajukan beberapa tuntutan sebagai syarat Kerajaan Bone bersedia menerima kehadiran Pemerintah Inggris di daerah ini. Tuntutan-tuntutan itu antara lain :

1. Bone menuntut supaya raja di Sulawesi Selatan yang hendak menemui residen atau pembesar Inggris harus melalui raja Bone. Hal yang demikian ini ditolak oleh Inggris.
2. Bone menentang pajak persepuluh yang dipungut oleh Belanda yang kemudian diteruskan oleh pihak Inggris pada daerah kekuasaannya seperti yang tercantum di dalam perjanjian Bungaya.
3. Bone tidak bersedia mengembalikan pusaka Kerajaan Gowa (*kalompoang*) yang ada di tangan raja Bone.
4. Raja Bone Toappatunru Arung Palakka menghendaki dan mengakui Arung Mampu sebagai raja Gowa, sedangkan Inggris tidak setuju karena merasa khawatir jangan sampai Kerajaan Bone mempunyai pengaruh besar di Kerajaan Gowa.
5. Raja Bone tidak mengakui yang dipertuan orang Inggris di daerah-daerah Maros, Bantaeng dan atau Bulukumba.
6. Raja Bone menuntut kedudukan yang wajar dan layak dalam soal pemerintahan di Sulawesi Selatan di samping wakil pemerintah Inggris.¹⁰¹

Setelah Pemerintah Inggris mempelajari tuntutan itu, maka

¹⁰¹Mappangara, 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX; Konflik Kerajaan Bone-Belanda 1816-1860*. Jogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada, hlm.90-91. Baca juga: Poelinggomang, dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan, Jilid I*. Makassar : Balitbangda bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 172.

akhirnya dianggap terlalu berlebihan sehingga ditolak. Menurut anggapan Inggris bahwa Bone tidak membantu Inggris dalam mengambil alih kekuasaan di daerah ini, sehingga Inggris tidak perlu memberikan hak-hak istimewa kepada Kerajaan Bone. Berbeda halnya pada saat perang Makassar 1667-1669 berlangsung, Bone banyak memberikan bantuan dalam menaklukkan Kerajaan Gowa, sehingga VOC merasa patut diberikan hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa yang dimaksud tersebut seperti yang tercantum pada poin 1 tuntutan dari Raja Bone Toappatunru. Juga sulit bagi Pemerintah Inggris untuk memenuhi tuntutan Bone terhadap penguasaan atas wilayah Maros, Bantaeng dan Bulukumba karena wilayah tersebut adalah merupakan lumbung padi dan menjadi sumber pendapatan pajak yang besar. Dan secara yuridis, ketiga wilayah itu adalah menjadi wilayah kekuasaan Inggris setelah terjadi pengambil-alihan kekuasaan dari tangan Belanda ke Inggris. Apalagi dua wilayah tersebut sangat rawan bagi perdagangan gelap karena terletak pada garis singgung Laut Flores dan Teluk Bone di sebelah Timur.

Sewaktu Toappatunru hendak memberlakukan adat kebiasaan yang dahulu telah dijalankan raja Bone, Arung Palakka Petta MalampeE Gemme'na, yakni bahwa setiap raja-raja di Sulawesi Selatan yang ingin menghadap pada pemerintah Belanda (sekarang Inggris), harus dengan perantaraan raja Bone. Atas kenyataan itu, maka residen Phillips tidak mau mengakui adat kebiasaan itu, karena katanya hal itu hanyalah kebiasaan saja dan itupun telah banyak menimbulkan kesukaran. Penolak itu tentu saja membuat raja Bone merasa tersinggung karena apa yang selama ini dilakukan dianggap tidak sah oleh pemerintah Inggris. Itulah sebabnya sehingga pada bulan Desember 1813, Toappatunru mulai mengumpulkan senjata-senjata di tempat kediamannya di Bontoala dekat kota Makassar

dan baginda memperkuat juga perkampungan orang-orang Bugis yang terletak dekat kota Makassar. Di samping itu, Toappatunru juga secara terang-terangan mem-perlihatkan sikap dan perilaku permusuhan terhadap Pemerintah Inggris.¹⁰²

Pada tanggal 2 Juli 1814, bantuan dari Batavia tiba di Makassar di bawah pimpinan Mayor Jenderal Nightingale dengan kekuatan terdiri dari 900 tentara, lengkap dengan senjata-senjata berat dan modern. Selain dari tentara Inggeris, ikut pula tentara-tentara pembantu dari Madura dan Sume-nep. Kepada pasukan-pasukan tersebut, juga diperbantukan seorang Inggris yang bernama Craford sebagai politik agent. Pemimpin pasukan ini kemudian mengusulkan perdamaian kepada raja Bone Toappatunru, akan tetapi baginda raja Bone menolaknya dan menyatakan bahwa baginda sama sekali tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak termasuk haknya sebagai pemegang kekuasaan (sebagai raja Bone). Atas pernyataan beliau itu, maka Inggeris pada tanggal 6 Juni 1814 memberikan ultimatum kepada raja Bone bahwa sampai jam 12 malam baginda harus berpikir dan mengakui perbuatan-perbuatannya yang tidak sah serta menyerahkan benda-benda *kalompoang* Kerajaan Gowa.¹⁰³

¹⁰²Daeng Patunru. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, hlm.224-225. Sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh raja Bone belum ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Inggeris sebab, ketika itu kekuatan bersenjata Pemerintah Inggris di Makassar belum kuat atau masih lemah. Untuk mengimbangi sikap raja Bone itu, maka Pemerintah Inggeris mengambil keputusan supaya laskar dari pejabat raja Gowa dibantu oleh laskar Datu Soppeng dan Sidenreng melawan orang-orang Makassar yang berada di pegunungan yang tetap mengakui Sultan Mallisujawa sebagai raja Gowa yang sah. Dan pada saat itu, banyak sekali orang-orang Bone yang ikut pada orang-orang Makassar di pegunungan. Namun demikian, pasukan gabungan itu tidak dapat memberikan pukulan berat kepada musuhnya. Oleh karena itu, pihak Inggris harus mendatangkan pasukan bantuan dari Batavia untuk menghadapi raja Bone dan sekutunya di Sulawesi Selatan.

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

Semua tuduhan Pemerintah Inggris terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak sah yang dilakukan oleh raja Bone tidak diakui oleh baginda. Oleh karena itu, Inggris melalui Mayor Jenderal Nightingale mengeluarkan suatu manifest dan menyebutkan berbagai perbuatan tidak sah yang telah dilakukan oleh raja Bone terhadap Inggris, sehingga Pemerintah Inggris terpaksa mengambil keputusan untuk mengangkat senjata terhadap raja Bone. Perbuatan-perbuatan tidak sah yang pernah dilakukan oleh raja Bone menurut Pemerintah Inggris adalah ;

1. Perkampungan Bugis yang diberikan kepada raja Bone hanyalah merupakan pinjam pakai dan telah dipersenjajati dan diperkuat dengan kubu-kubu pertahanan yang luas, yang pada satu sudut sampai ke laut dan pada lain sudut melewati Bontoala;
2. Raja Bone Toappatunru telah mengakui dan memperlakukan Sultan Mallisujawa sebagai raja Gowa yang sah. Padahal bertentangan dengan sumpahnya yang baginda telah angkat sewaktu baginda dilantik menjadi raja Bone atas persetujuan Belanda;
3. Raja Bone telah menyerahkan benda-benda Kerajaan Bone kepada Sultan Mallisujawa bekas raja Bone atau menyimpannya untuk dirinya sendiri;
4. Raja Bone membantu orang-orang Gowa beroposisi terhadap pemerintah yang sah di Gowa;
5. Raja Bone mengambil dan menguasai daerah Tallo yang dahulu milik VOC dan sekarang milik Inggris dan mengangkat seorang raja di sana;

¹⁰³Mattulada, 1999. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sula-wesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University, hlm. 327.

6. Memberikan keleluasan kepada orang-orang bawahannya untuk menjalankan hak atas sawah-sawah yang bukan miliknya yang terletak di dalam daerah kekuasaan Inggeris dengan mempergunakan kekuatan bersenjata;
7. Memberikan keleluasan kepada orang-orang Bone menghalang-halangi dengan cara kekerasan penagihan pajak *vertienting* (pajak persepuluh) se-hingga *resident* Phillips hampir terkena bahaya maut;
8. Menghasut rakyat di tanah-tanah yang masuk daerah kekuasaan Inggris, yaitu Makassar, Bantaeng dan Bulukumba serta Maros, sehingga terjadi pembunuhan atas diri seorang juru bahasa di Maros dan percobaan pembunuhan atas diri *resident* Phillips;
9. Tuntutan raja Bone supaya baginda mendapat sesuatu kedudukan di samping *Resident* di dalam urusan-urusan pemerintahan;
10. Menghalang-halangi perdagangan di Makassar, baik dari daratan maupun dari lautan;
11. Tuntutan raja Bone, bahwa tidak seorang anggota sekutu atau utusan dapat menghadap *Resident* jika tidak diantar oleh raja atau wakilnya, tuntutan mana ditolak oleh *Resident* dan Komandan Tentara Inggris.¹⁰⁴

Daftar kesalahan itu tidak diakui oleh raja Bone, sehingga

¹⁰⁴Daeng Patunru, 1989.*Op.cit.*, hlm. 226-227. Baca juga: Poelingomang.dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I, Op.cit.*, hlm. 175-176. Daftar Kesalahan Raja Bone yang diungkapkan Pemerintah Inggeris, di dalam Mattulada, 1999, hlm.327 tidak menyebutkan secara menyeluruh dan yang diungkapkan hanya empat poin yang dianggap paling penting saja. Namun dijelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya lebih banyak lagi daftar kesalahan Baginda raja Bone Toappatunru, yang dijadi-kan alasan untuk memerangi Tanah Bone. Tetapi raja Bone tidak mengakui semua yang dituduhkan itu dan dikatakannya tidak beralasan karena menurut anggapan Arumponedan

pada tanggal 7 Juni 1814, sebelum fajar menyingsing, tiga buah barisan pasukan Inggris menyerang perkampungan orang-orang Bugis di Bontoala, tempat kedudukan raja Bone. Raja Bone akhirnya tidak dapat membendung arus serangan dari tentara Inggris yang mendapat bantuan dari pasukan Kerajaan Gowa, Soppeng dan Sidenreng. Perkampungan dan istana Bontoala dibakar habis oleh tentara Inggris dan selanjutnya Arumpone dan pasukannya mengundurkan diri ke daerah Maros untuk membuat kubu-kubu per-tahanan di bukit-bukit Camba, tanpa membawa benda-benda *kalompoang* Kerajaan Gowa. Tentara Inggris sendiri tidak melakukan pengejaran terhadap pasukan Bone, tetapi sebagian kecil pasukan Gowa dan Soppeng serta Sidenreng yang mengejarnya, namun dia dapat dipukul mundur oleh pasukan Bone.¹⁰⁵

Pada waktu raja Bone meninggalkan istana Bontoala, beliau tidak sempat membawa benda-benda kebesaran (*kalompoang*) Kerajaan Gowa yaitu *sudanga*. Oleh Arung Mampu yang tidak ikut dalam pelarian itu, lalu memberikan benda-benda tersebut kepada Datu Soppeng dengan maksud agar benda kerajaan itu melalui Datu Soppeng dapat diserahkan kepada pemerintah Inggris. Setelah Pemerintah Inggris menerima benda-benda kebesaran tersebut, maka segera ia melakukan pemulihan status Kerajaan Gowa dengan mengangkat dan menobatkan I Mappatunru Karaeng Lembang-parang Sultan Abd. Rauf Tumenanga ri Katangka. Usaha itu dimaksudkan untuk menyatukan kembali rakyat Gowa yang terpecah dua golongan besar selama ini, yaitu;

raja-raja bawahan di Sulawesi Selatan, hanya mengenal Arumpone To-Appatunru Arung Palakka sebagai *Pertuanan Tunggal*. Kedatangan orang Inggris dianggap sebagai perampasan yang sewenang-wenang terhadap milik orang Sulawesi Selatan. Belanda dipandang sudah mengkhianati segala macam perjanjian dan persekutuannya dengan raja-raja Sulawesi Selatan.

¹⁰⁵ Poelinggomang. dkk. 2004, *ibid*.

1) Penduduk Gowa yang berada di pegunungan yang memihak kepada Arung Mampu, Sultan Mallisujawa dan Arumpone, 2) Penduduk Kerajaan Gowa yang berada di pesisir, memihak kepada Raja Gowa Sultan Zainuddin Karaeng Katangka yang selama ini memihak kepada Pemerintah Inggris.¹⁰⁶

Setelah pemulihan itu, maka usaha penentuan raja Gowa (*sombaya ri Gowa*) yang definitif telah dilakukan setelah kembalinya *kalompoang* ke Kerajaan Gowa. Entah karena kepercayaan rakyat Gowa yang mendalam kepada kesaktian *kalompoang* atau *regalia* itu, maka setelah mereka mengetahui tentang pulihnya kembali *kalompoang* dan sudah berada di tangan raja Gowa terpilih, maka pertentangan antara rakyat pesisir dan rakyat di pedalaman dapat diakhiri dengan damai oleh raja Gowa terpilih. Beberapa raja negeri di Sulawesi Selatan yang mengakui Sultan Gowa, mengikuti jejaknya Inggris sebagai pertuanan, menggantikan orang Belanda. Dengan dukungan raja Gowa dan beberapa raja Bumiputera lainnya, Pemerintah Inggris tetap memperkuat dirinya, dan selalu bersiap untuk menghadapi perlawanan orang Bone yang belum memberikan kesetiiaannya.

Sementara itu, pelabuhan Parepare yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah Kerajaan Bone diambil alih penguasaannya dan selanjutnya diserahkan kepada Addatuang Sidenreng La Wawo Sultan Muhammad Ali sebagai pengelola karena selama ini telah memperlihatkan kesetiiaannya kepada Pemerintah Inggris sebagai pertuanan. Begitu juga daerah Sigeri dan Pangkajene diambil alih oleh Pemerintah Inggris karena pasukan Kerajaan Bone telah meninggalkannya. Sawah-sawah yang begitu luas dan subur di negeri-negeri di sebelah utara Makassar yang selama ini digarap

¹⁰⁶Mattulada. 1999. *Op.cit.*, hlm.328

oleh orang Bone, karena ditinggal terbengkalai, maka Pemerintah Inggris menjualnya kepada umum, atau mempersewakannya kepada yang mau menjadi pengusaha di bidang pertanian sawah. Antusias menanggapi hal itu, maka banyak yang berminat seperti orang-orang Eropa atau orang-orang Makassar yang telah berjasa kepada Pemerintah Inggris.¹⁰⁷ Selanjutnya perkampungan orang-orang Bugis-Bone dan Bontoala, tempat kedudukan Arumpone di Makassar, oleh Pemerintah Inggris diserahkan kepada Letnan (pemimpin) orang Melayu di Makassar, karena jasa-jasanya kepada Pemerintah Inggris.

Selain itu, Pemerintah Inggris juga berencana ingin mengganti Raja Bone Toappatunru yang selama ini dianggap penghalang dalam segala urusannya, di samping itu, juga direncanakan untuk melakukan penyerangan terhadap pusat Kerajaan Bone. Untuk maksud tersebut, maka Pemerintah Inggris segera mengundang raja Sidenreng, raja Gowa dan raja Soppeng untuk datang menghadap kepada *resident* di Makassar untuk membicarakan maksud tersebut. Berdasarkan saran-saran dari ketiga raja tersebut, yang menyatakan bahwa pasukan Bone dan sekutu-sekutunya terlalu kuat dan dikhawatirkan Wajo akan membantu Bone jika serangan militer ditujukan ke pusat kerajaan itu. Oleh karena itu, Richard Phillips selaku *resident* Makassar dalam rapat tersebut membatalkan rencananya untuk menyerang Bone.¹⁰⁸

Wajo memang perlu diwaspadai karena selama ini pelayar

¹⁰⁷Mappangara, 2004. *Op.,cit.,hlm.*64-65; Baca juga: Mattulada. 1999. *Op.,cit.,hlm.* 329; Poelinggomang. dkk.2004.*Op.,cit., hlm.* 177; Daeng Patunru. 1989.*Op.,cit., hlm.* 229

¹⁰⁸Poelinggomang. dkk. 2004. *Op.,cit.,hlm.* 197. Dijelaskan pula bahwa rapat yang diadakan pada tanggal 12 Juli 1814 itu, Inggris memutuskan untuk membatalkan serangan ke pusat Kerajaan Bone, tetapi setidaknya dapat dijadikan tolak ukur tingkat kesetiaan sekutu-sekutu Inggris di Sulawesi Selatan. Kesiediaan raja Gowa, Sidenreng dan Soppeng menghadiri rapat ini serta saran-saran mereka dalam rapat dapat dijadikan alasan bagi Inggris

niaga orang Wajo yang diharapkan meramaikan pelabuhan Makassar ternyata masih banyak di antara mereka menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Teluk Bone, kadang-kadang ke arah barat melalui Sidenreng, mungkin juga ada yang melalui pelabuhan Parepare. Perlu diketahui bahwa sebelum Parepare direbut Inggeris dan kemudian dikontrakkan kepada Sidenreng, satu-satunya pelabuhan yang dapat dikontrol adalah hanya Pelabuhan Makassar. Sebenarnya Pemerintah Inggeris ingin sekali menjalin hubungan dengan pelayar niaga Wajo, karena pedagang-pedagang ini merupakan pedagang-pedagang Bugis yang cekatan dan telah berpengalaman berniaga di pelabuhan-pelabuhan niaga Nusantara.¹⁰⁹ Selain itu, Inggeris juga harus betul-betul mempelajari laporan keberpihakan Wajo ke Bone, karena sejak Wajo keluar dari Persekutuan *TellumpoccoE* (persekutuan tiga kerajaan yakni: Bone, Soppeng dan Wajo) pada tahun 1640, sejak itu Wajo selalu memperlihatkan keberpihakannya atau kesetiannya kepada Kerajaan Gowa, terutama saat-saat ketika Perang Makassar 1667-1669.¹¹⁰

Berdasarkan laporan dari mata-mata yang dikirim ke Wajo oleh Pemerintah Inggris menyatakan bahwa keberpihakan Wajo ke

bahwa kebijakan pemerintahannya di daerah ini dapat diterima oleh beberapa orang raja lokal yang setia berlindung pada kekuasaan Inggris. Pada tanggal 14 Juli 1814, residen Inggris di Makassar, Richard Phillips, mengirim seorang mata-mata ke Wajo guna mempelajari sikap pemerintah dan rakyat Wajo sehubungan dengan perkembangan politik akhir-akhir ini. Mata-mata yang dikirim itu adalah seorang putera bangsawan Wajo yang sudah lama tinggal di Makassar. Mata-mata itu bernama Daeng Mamala, tinggal di Makassar sebagai seorang pedagang yang sukses menjalankan usaha niaganya melalui pelabuhan Makassar, dan telah merasa terjamin keamanannya di bawah perlindungan Pemerintah Inggris.

¹⁰⁹O.L.Tobing. 1977. *Hukum Pelayaran dan Perniagaan Ammana Gappa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi selatan dan Tenggara, hlm. 23

¹¹⁰Andaya, 1981. *Warisan Arung Palakka* (diterjemahkan oleh Sirimori). Makassar : Ininnawa, hlm. 42

Bone sulit untuk dibuktikan karena anggota Dewan Hadat tidak pernah mencapai kata sepakat tentang perkembangan politik yang sementara berlangsung. Sekalipun Sidenreng dan Wajo berbatasan langsung, namun kedua kerajaan ini sulit membangun kerjasama karena Sidenreng telah berpihak kepada Pemerintah Inggris. Tetapi namun demikian, masih perlu dipertanyakan masalah itu, karena bilamana Wajo dan Sidenreng terputus hubungannya, maka akan terasa sulit bagi pedagang-pedagang orang-orang Wajo untuk menggunakan pelabuhan Parepare yang telah disewakan Inggris kepada Sidenreng. Kalau Wajo tidak menyatakan kesetiannya kepada Inggris, maka pedagang-pedagangnya akan mengalami kesulitan untuk menggunakan pelabuhan Makassar yang kini berada di bawah pengawasan Pemerintah Inggris. Satu-satunya jalan bagi pedagang-pedagang Wajo adalah menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Teluk Bone yang semuanya berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Kerajaan Bone.

Untuk mengantisipasi serangan Kerajaan Bone dan sekutunya, maka Letnan Jackson melaporkan ke Pemerintah Inggris di Makassar bahwa di daerah Maros perlu dibuat benteng pertahanan guna mengawasi wilayah *Noorder Provincie* yang kini setiap saat terancam dari Kerajaan Bone, Tanete dan Suppa. Oleh karena itu, *Resident Phillips* di Makassar, menyurat ke Sekretaris Panglima Angkatan Bersenjata, kapten Nixon di Batavia, bahwa diperlukan segera pengiriman bahan-bahan dari Jawa guna perbaikan barak dan mendirikan bangunan baru di wilayah *Noorder Provincie*. Namun belum sempat terpenuhi permintaan tersebut, tiba-tiba Letnan Jackson melaporkan bahwa pada tanggal 17 Juli 1814 pasukan Bone menyerang pusat pertahanan Inggris di Maros. Demikian juga rakyat Bone yang bermukim di *Noorder Provincie* sengaja membuat kekacauan dengan harapan rakyat setempat akan

merasa tidak aman.¹¹¹

Kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh Kerajaan Bone di wilayah *Noorder Provincie* dimaksudkan agar rakyat di daerah itu mendapat kesan tidak aman dibawah Pemerintahan Inggeris. Pada sisi lain, Kerajaan Bone berharap simpatik dari rakyat setempat bahwa akan lebih aman jika mereka berada di bawah perlindungan Kerajaan Bone. Selain itu, jika mereka berpihak kepada Kerajaan Bone, maka mereka tidak akan dikenakan pajak persepuluhan dari penghasilan mereka yang akan mulai diberlakukan oleh Pemerintah Inggeris pada tanggal 5 Agustus 1814. Peraturan yang baru ini menghendaki agar setiap orang yang menanam padi di wilayah kekuasaan Inggeris harus dikenakan pajak dan *sima*. Untuk pajak tetap diberlakukan sistem *vertienien* (pajak persepuluhan) dari hasil panen. Sementara pajak *sima* tidak dijelaskan peraturannya, namun yang pasti bahwa pajak ini sama sekali baru bagi masyarakat. Kalau seandainya ketahuan ada penduduk yang tidak menyerahkan pajaknya kepada Pemerintah Inggeris, atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan pemerintah harus melakukan sita, maka yang diambil adalah 2/3 dari hasil produksinya.¹¹²

Pada tahun 1814 *resident* Phillips meninggal dunia sehingga Pemerintahan Inggris di Makassar dijalankan oleh Kapten Wood sebagai pejabat sementara, yang kemudian digantikan oleh Mayor Dalton (1815-1816). Pada masa inilah kondisi Sulawesi Selatan bahagian timur mengalami perubahan yang drastis dan amat suram bagi kekuasaan Inggris. Sementara itu, raja Bone yang telah mengundurkan diri bersama pasukannya ke pedalaman Sulawesi Selatan, berhasil menyusun kekuatan perangnya di Bone dan

¹¹²Poelinggomang. dkk. 2004.*Op.,cit.*, hlm. 199.

berusaha untuk melakukan serangan balasan terhadap Inggris. Sebelum penyerangan dilakukan, Bone terlebih dahulu menyerang Soppeng yang telah membantu Inggris selama ini, sehingga kelak Soppeng tidak bisa lagi membantu Inggris. Karena serangan Bone atas Soppeng sehingga Kapten Wood mengeluarkan ancaman dan meminta kekuatan perang Bone segera meninggalkan Soppeng. Kalau tidak dipatuhi ancaman itu, maka pasukan perang Inggris akan dikerahkan ke Bone, melalui Teluk Bone untuk penyerangan dari laut.¹¹³

Kapten Wood mencoba untuk membuktikan ancamannya dengan mengirimkan pasukannya ke Soppeng untuk membantu sekutunya ini yang sedang berperang dengan Bone. Oleh karena jalan untuk ke Soppeng tidak memungkinkan melalui jalan darat, sehingga Inggris memilih jalan laut. Tetapi sebenarnya resikonya sama saja kalau perjalanan melalui laut karena harus melewati wilayah kerajaan sekutu dari Bone yaitu Kerajaan Tanete dan Suppa. Pasukan Inggris ini dipimpin oleh Kapten Jackson yang berlayar dari Makassar dan berlabuh di Parepare. Dari daerah ini, Inggris berencana berjalan darat menuju Soppeng, tetapi di sini dihalang-halangi oleh pasukan Kerajaan Suppa. Pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindari, pasukan Kerajaan Suppa

¹¹³Mattulada, 1999. *Op.cit.*, hlm. 329. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain ancaman tersebut di atas, Pemerintah Inggris di Sulawesi Selatan, pernah juga mau menjatuhkan raja Bone dengan jalan membujuk pembesar-pembesar Tana Bone agar memberontak dan menurunkan Raja Bone Toappatunru dari tahtanya. Tetapi usaha itupun mengalami kegagalan, karena para pembesar Tana Bone amat cinta tanah airnya (Tana Bone) dan amat menghormati pemimpinnya, yang selama ini telah berjuang untuk memperkuat kehormatan dan martabat negeri mereka. Toappatunru yang memakai gelar Arung Palakka, dipandang sebagai pen-jelmaan kembali semangat kemerdekaan dan kebesaran Tana Bone, yang digelorakan oleh La Tenritatta Arung Palakka, Datu Tungke'na Tana Ugi. Usaha licik orang Inggris dan kaki tangannya dari kalangan bumi-putera sendiri mengalami kegagalan sama sekali. Bandingkan dengan: Patunru, 1989. *Op.cit.*, hlm. 231.

mendapat bantuan dari Kerajaan Alitta, Sawitto dan Rappang, sehingga terlalu kuat dan tidak dapat ditandingi oleh pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris mengalami kekalahan dengan tertembaknya Kapten Jackson (pimpinan pasukan), sehingga pasukan Inggris tidak dapat meneruskan perjalanannya hingga daerah Soppeng.¹¹⁴

Sementara itu, Datu Tanete, La Patau *MatinroE ri Sa-lo'moni* dengan terang-terangan memihak kepada Kerajaan Bone Toappatunru karena antara keduanya terjalin hubungan kekeluargaan yang sangat erat (sepupu sekali). La Patau datu Tanete menyerang masuk jauh ke daerah sebelah utara Makassar. Beliau menaklukkan dengan muda daerah-daerah Segeri dan Pangkajene yang dahulu masuk wilayah kekuasaan Belanda yang kemudian beralih menjadi wilayah kekuasaan Inggris; beliau menembus jauh masuk ke dataran Maros. Keberhasilan ini dimungkinkan oleh karena pasukan La Patau mendapat bantuan dari orang-orang Bugis-Bone yang masih tertinggal di sana. Inggris lalu mengadakan serangan terhadap pasukan La Patau di kampung Marana, di pinggir pantai sebelah barat Maros, akan tetapi tidak dapat mengusir pasukan Tanete dari pertahannya.¹¹⁵

Pertempuran-pertempuran kecil masih terjadi di sebelah utara Maros, tetapi itu tidak pernah membawa hasil apa-apa antara kedua pihak. Sementara pasukan Bone dan sekutunya dapat menduduki beberapa daerah kekuasaan Inggris, maka Inggrisipun giat membangun kubuh-kubuh pertahanan yang berhadapan dengan kubuh pertahanan Bone dan sekutunya. Itulah

¹¹⁴Daeng Patunru, 1989. *Op.cit.*, hlm. 232.

¹¹⁵Muhammad Abduh, dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta : Proyek IDSN Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 47.

sebabnya sehingga sering terjadi pertempuran-pertempuran kecil antara kedua pihak dan selalu membawa korban antara keduanya. Sementara itu, Kapten-Wood yang belum berhasil memadamkan perlawanan raja Bone, beliau kemudian ganti oleh Mayor Dalton pada bulan Oktober 1815 sebagai *Resident* di Makassar. Empat hari setelah beliau menggantikan Kapten Wood, maka beliau lalu mengadakan serangan yang dibantu oleh pasukan dari Kerajaan Gowa untuk menyerang wilayah utara, khususnya pertahanan Tanete di Kalibone dan Sangkara, kedua daerah ini berada di pinggiran utara kota Maros. Pasukan Inggris dan Gowa tidak dapat menembus pertahanan Tanete yang mendapat bantuan dari pasukan Bone. Sampai akhir tahun 1815, telah terjadi sebanyak tiga kali pertempuran antara kedua pihak, tetapi tidak membawa arti penting Inggris karena ternyata pasukan Tanete dan Bone tetap dapat menguasai daerah *Noorder Provincie*.¹¹⁶

Sejak Januari sampai Agustus 1816 Mayor Dalton kembali mengarahkan pasukannya beserta sekutu-sekutunya, khususnya Gowa, untuk menggempur pasukan Tanete dan Bone yang bukan saja telah menguasai wilayah *Noorder Provincie*, tetapi juga berusaha menyusup masuk ke dalam kota Makassar untuk berusaha menguasai Tallo. Oleh karena itu, Mayor Dalton akhirnya berkesimpulan bahwa untuk menghentikan perlawanan laskar Bone yang bergerak dari satu negeri ke negeri lainnya, tidak ada jalan lain dari pada memerangi langsung setiap negeri dan menaklukkannya satu demi satu. Tentu saja pendapat dan pemikiran yang ringkas itu, tidak semudah seperti yang disimpulkan berupa pendapat. Medan perang amat luas, dan biaya serta pasukan yang akan dikerahkan, tentu saja juga sangat besar

¹¹⁶*Ibid.* Baca juga; Mattulada. 1999, *op.cit.*, hlm. 331; Poelinggomang. dkk. 2004. *Op.cit.*, hlm. 203; Daeng Patunru. 1989. *Op.cit.*, hlm. 231.

dan karena wilayah kekuasaan Bone sangat luas. Namun demikian tetap diusulkan ke Batavia untuk mendapatkan biaya dan pasukan Inggris yang kuat untuk menaklukkan seluruh Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Arumpone, Toappatunru Arung Palakka yang diakui oleh kebanyakan negeri sebagai Pertuanan Tunggal di negeri ini. Semua negeri di Sulawesi Selatan yang hanya mengakui Arumpone sebagai Pertuanan, menyiapkan laskar lebih banyak dan peratan perang serta persediaan makanan yang memadai, untuk menghadapi perang yang akan memakan waktu yang lama.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pemerintah Inggris di Makassar, yaitu Mayor Dalton dan pasukannya yang jumlah sangat kecil, sangat disadari oleh Pemerintah Inggris di Batavia. Namun demikian kenyataannya, Pemerintah Inggris di Batavia tidak dapat memenuhi kekurangan pasukan yang dialami oleh Mayor Dalton. Itulah sebabnya sehingga keadaan di Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan hingga memasuki bulan Desember 1816. Apalagi karena pergolakan politik di Eropa sudah berakhir, dimana raja Willem I, yang ketika negerinya diduduki oleh Perancis, melarikan diri ke Inggris. Di sana beliau berusaha mengembalikan bekas wilayah koloninya yang diduduki Inggris lewat perundingan. Pemerintah Inggris dengan pertimbangan politiknya di Eropa, bersedia menyerahkan kembali bekas wilayah koloni Belanda yang didudukinya kepada raja Belanda, dengan syarat Pemerintah Belanda harus melaksanakan perdagangan bebas. Akhirnya kesepakatan tercapai dengan ditanda-tanganinya Konvensi London pada tanggal 14 Agustus 1814. Salah satu diktum atau isi perjanjian itu adalah bersedia mengembalikan bekas koloni Belanda yang didudukinya kecuali Tanjung Harapan; dan sebagai gantinya Pulau Bangka, Inggris memperoleh Cocin-Cina. Kedua negara juga berjanji untuk memberantas perdagangan budak. Namun Belanda ternyata tidak dapat segera mengambil alih koloninya,

karena Napoleon Bonaparte berhasil kembali ke Eropa dari tempat pengasingannya di Elba. Oleh karena itu penyerahan koloni, baru dapat dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1816. Inggris diwakili Raffles dan Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang terdiri dari Cornelis Theodorus Elout, Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, dan Arnold Adriaan Buyskes. Van der Capellen kemudian diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1816-1826). Sedangkan di Makassar, Chasse (mantan Gubernur Makassar) ditunjuk sebagai Komisaris untuk menerima wilayah tersebut dari D.M. Dalton (1815-1816). Upacara penyerahan berlangsung pada tanggal 25 September 1816.¹¹⁷ (*)

¹¹⁷Poelinggomang. 2002. *Makassar Abad XIX; Studi tentang Kebi-jakan Perdagangan Maritim*. Jakarta : Gramedia, hlm. 56; Baca;Mukhlis PaEni,dkk. 2002. *Op.,cit.*, hlm. 171; Poelinggomang. dkk. 2004. *Op.,cit.*, hlm. 205.

BAB IV

PERLAWANAN KERAJAAN BONE

A. Pembaharuan Kontrak Bongaya

Sejak penyerahan kembali wilayah koloni Belanda kepada raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1816, sejak itu pula merupakan awal Pemerintahan Hindia Belanda di wilayah ini. Pemerintah Belanda pun giat kembali mengembang pola politik VOC untuk menempatkan dirinya sebagai pelindung dan perantara kerajaan-kerajaan Bumiputera. Oleh karena itu, Belanda mulai mengadakan penataan pemerintahan dengan terlebih dahulu menetapkan salah seorang dari Komisaris Jenderal menjadi Gubernur Jenderal, yaitu GAGP.-Baron van der Capellen (1816-1826). Kehadiran kembali Pemerintah Hindia Belanda ini dipandang merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan Kompeni (VOC), sehingga mendapat reaksi dan penolakan keras dari sejumlah kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, seperti Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone dan sekutunya.

Sikap penolakan Kerajaan Gowa atas kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan bisa dipahami kalau kita kilas balik ke masa Pemerintahan Inggris di Sulawesi Selatan. Pada masa itu, Kerajaan Gowa telah merasa berhutang budi kepada Pemerintah Inggris karena telah berhasil mengembalikan

ornamen terpenting Kerajaan Gowa dari tangan raja Bone, yaitu *sudanga* (parang peninggalan Lakipadada), yang menjadi alat penting dan legitimasi untuk kedudukan dan kekuasaan bagi seorang raja di Gowa. Beralihnya *ornamen* itu ke tangan raja Bone berkaitan dengan terjadinya peristiwa Batara Gowa I Sangkilang yang berusaha merebut tahta Kerajaan Gowa. Oleh karena itu, pihak Pemerintah Kerajaan Gowa sangat kecewa terhadap Pemerintah Inggris yang telah menyerahkan kedudukan Kekuasaannya kembali kepada pihak Belanda. Namun demikian, pihak Pemerintah Kerajaan Gowa, tidak dapat menyatakan sikap penentangannya secara terbuka atas kembalinya Belanda ke Sulawesi Selatan, karena pada sisi lain tampilnya Karaeng Data (anak Batara Gowa I Sangkilang) menentang penobatan I Mappatunru Karaeng Lembangparang Sultan Abdul Rauf (1816-1825) menjadi raja Gowa. Hal itulah yang menyebabkan pihak Pemerintah Kerajaan Gowa dengan terpaksa harus menerima kembali Belanda untuk berkuasa dengan harapan Belanda dapat memerangi gerakan Karaeng Data.¹¹⁸

Itulah sebabnya sehingga pemerintah Belanda merasa kecewa atas sikap Kerajaan Bone yang menolak kehadirannya. Padahaldi awal kehadirannya kembali di Sulawesi Selatan, Pemerintah Belanda memandang bahwa pasti mendapat sambutan dari Kerajaan Bone dan sekutu-sekutunya, termasuk Kerajaan Tanete dan Suppa. Dugaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan itu menentang kehadiran pemerintah Inggris. Selain itu, berdasarkan Perjanjian Bungaya, Kerajaan Bone adalah kerajaan sekutu terpenting dan memiliki hak istimewa

¹¹⁸J. Tideman "de Batara Gowa op Zuid-Celebes", dalam: BKI No.61, 1908, hlm. 350-390. Dikutip oleh Poelinggomang, 2004, *dkk.Op.,cit.*, hlm. 217; Baca juga: Muhklis PaEni, Edward, Ina Mirawati, 2002, *op.,cit.*, hlm.174.

sebagai sekutu tertua. Sementara Kerajaan Tanete selama periode Kompeni Belanda, merupakan sekutu yang setia karena senantiasa memberikan bantuan pasukan. Namun demikian kenyataannya berbeda. Kerajaan Bone, Tanete dan Suppa, serta sekutu-sekutunya bersikap menentang kembali kehadiran pemerintah Belanda, khususnya Kerajaan Bone. Kepergian Inggris dimanfaatkan oleh Kerajaan Bone untuk menduduki kembali wilayah-wilayah koloni yang dahulu menjadi daerah pemerintahan langsung seperti Maros, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar.¹¹⁹

Sikap kurang bersahabat Kerajaan Bone atas kehadiran kembali pemerintah Hindia Belanda dibuktikan pada saat penguasa Belanda menyampaikan kepada raja-raja negeri Sulawesi Selatan untuk datang menghadap kepada penguasa Belanda saat penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Inggris ke Pemerintah Hindia Belanda. Pada saat upacara penyerahan kekuasaan, raja-raja negeri yang bekerjasama dengan Inggris, yaitu Gowa, Soppeng, Sidenreng dan berbagai negeri bawahannya, datang memenuhi undangan Pemerintah Belanda di Makassar. Malahan Raja Gowa Karaeng Lembang Parang yang diangkat jadi raja Gowa pada zaman kekuasaan Inggris, datang ke Makassar dengan sejumlah pembesar Butta Gowa dan pengikut-pengikutnya dalam jumlah cukup banyak untuk menyatakan sambutan selamat datang, dan kesetiaan kepada pemerintah Belanda dan agar dikukuhkan kedudukannya sebagai raja Gowa.

Lain halnya dengan Raja Bone Toappatunru Arung Palakka, hanya mengirim utusan ke Makassar untuk mengucapkan selamat datang kepada Komisariss Belanda. Arumpone, melalui utusannya,

¹¹⁹Rasyid, 2010. *Gerakan Sosial di Tanah Bugis; Raja Tanete La Patau Menentang Belanda*. Jogyakarta: Penerbit Ombak, hlm.102.

selanjutnya menjanjikan kerjasama dalam kemitraan setara, seperti kerjasama antara VOC Belanda dengan Arumpone La Tenritatta pada abad ke-17. Juga dituntut sebagai pertuanan atau pimpinan dari semua raja-raja di Sulawesi Selatan dan menghendaki raja-raja negeri Sulawesi Selatan, tidak akan langsung berhubungan dengan Belanda dan harus dilakukan melalui Arumpone sebagai Pertuanan yang setara dengan Pemerintah Belanda. Juga menjadi tuntutan raja Bone, agar Bontoala dan perkampungan orang Bugis di Makassar dikembalikan kepada Arumpone untuk ditempati membangun kembali istananya. Tuntutan-tuntutan itu berdasarkan pada hak-hak yang diakui oleh Belanda

pada zaman La Tenritatta Arung Palakka, mitra yang setara dengan Admiral Speelman, dan sebagai Pertuanan dan ketua raja-raja negeri Sulawesi Selatan.¹²⁰ Tuntutan itu tentu tidak dapat diterima oleh Pemerintah Belanda oleh karena kondisinya sudah berbeda. Lagi pula Pemerintah Hindia Belanda terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan gerakan Karaeng Data, anak Batara Gowa I Sangkilang. I Sangkilang sendiri pada zamannya sangat membahayakan dan menyulitkan kedudukannya pada saat itu.

Selanjutnya, diceriterakan bahwa pada waktu I Sangkilang meninggal dunia, anaknya yang bernama Karaeng Data baru berusia delapan tahun. Dan setelah dewasa, beliau banyak

¹²⁰Mattulada, 1999. *Op., cit.*, hlm. 333. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketika para penguasa Belanda sudah kembali di Makassar, maka ketika itu negeri-negeri yang terletak di sebelah Utara kota Makassar, seperti; Maros, Pangkajene dan Tanete, tetap memelihara kesetiaan kepada Arumpone, sebagai Pertuanan Sulawesi Selatan. Laskar datu Tanete La Patau, tetap menguasai Maros dan negeri-negeri sekitarnya. Laskar Tana Bone sendiri, tetap menguasai dan berada di kubu-kubu pertahanannya di gunung batu di daerah Camba yang berada di dataran tinggi. Dan kondisi medan seperti itu terlalu berat dirasakan bagi Belanda.

pergaulan sehingga mempunyai pengaruh besar di kalangan rakyat Gowa. Pada masa akhir pemerintahan VOC di Sulawesi Selatan, Karaeng Data meninggalkan Makassar dan pergi tinggal di Ambon, di sini Karaeng Data mendapat perlakuan istimewa dari Pemerintah Inggris di sana. Itulah sebabnya sehingga ketika beliau kembali ke Makassar pada masa awal pemerintahan Inggris (1812), ia mendapat keleluasan untuk tinggal bebas di Galesong. Tidak berapa lama beliau tinggal di Galesong, maka resident Phillips memerintahkan Galesong agar memerintahkan Karaeng Data meninggalkan daerah itu. Alasan pengusiran itu adalah karena Karaeng Data kelihatannya akan menyambung gerakan yang pernah dilakukan oleh ayahandanya I Sangkilang. Oleh karena itulah sehingga Karaeng Data meninggalkan Galesong dan pergi ke wilayah pegunungan dimana rakyat di daerah itu mencintainya. Dan pada masa inilah Karaeng Data dinyatakan menjadi buronan yang dapat dibunuh tanpa ada sangsi hukum bagi pelakunya atau *tuniboya*. Karaeng Data dinyatakan sebagai buronan atau burung yang bebas, dalam bahasa Belanda disebut *vogelrij verklaaring* yang artinya bisa dibunuh di luar hukum.¹²¹

Berkat dukungan dari penduduk pedalaman Makassar itu mendorong Karaeng Data memberanikan diri kembali ke Beba (Galesong) dan mejadikannya sebagai pusat pemerintahannya. Di Beba, ia membentuk organisasi pemerintahan dengan mengangkat penduduk yang dikenal pemberani (*tubarani*) sebagai pendamping dan pembantunya yang dikenal dengan sebutan *pallapa barambang* dan mereka itulah yang menjabat sebagai Panglima Perang. Mereka yang terkenal adalah Gunturuna I Da Depo, Kali'na I Sanro Nande, dan Bosi Sarrona Garanci Daeng Malala. Di samping itu, ia juga

¹²¹Daeng Patunru, 1969, *Sejarah Gowa, op. cit.*, hlm. 92.

dibantu oleh sejumlah pemberani yang berfungsi sebagai pengawal pribadi yang disebut Cambang. Para Cambang yang terkenal adalah; Cambang Manggarai, Cambang Raulo, Cambang Bissoloro, Cambang Mangga, Cambang Bulu' Tanah, Cambang Mammesu, Cambang Moncongong, dan Cambang Rubia. Pembentukan pemerintahan bayangan oleh Karaeng Data merupakan ancaman bagi kedudukan Kerajaan Gowa karena menghambat dan melemahkan kedudukan Kerajaan Gowa.¹²²

Oleh karena itu dalam bulan Agustus 1819, Karaeng Data bersama kurang lebih 2.000 orang pasukannya memasuki Beba dengan maksud untuk memisahkan kekuatan raja Gowa dan Belanda dari daerah-daerah Selatan. Meskipun sebenarnya daerah-daerah ini telah diserahkan oleh Sultan Zainuddin menurut perjanjian kepada Belanda, akan tetapi pada hakekatnya daerah-daerah tersebut masih mempunyai hubungan batin yang kuat dengan Kerajaan Gowa. Raja Gowa, Karaeng Lembangparang dengan dibantu oleh tentara Belanda dan laskar Addatuang Sidenreng, lalu menyerang Karaeng Data secara besar-besaran. Pihak Pemerintah Belanda selanjutnya memerintahkan kepada Komandan La Fontaine bersama dua orang Kapten, 10 orang opsir (sembilan orang Eropa dan satu orang bumiputera), memimpin 240 orang tentara, yang terdiri atas 137 orang Eropa dan 103 orang bumiputera untuk bergabung dengan armada Kerajaan Gowa berangkat ke selatan, dengan maksud menyerang kedudukan Karaeng Data di Beba dari arah Utara.¹²³

Setelah peristiwa itu, nampaknya gerakan Karaeng Data juga berakhir, karena perpecahan antara penduduk pedalaman dan penduduk pesisir Kerajaan Gowa berhasil dipulihkan. Keberhasilan

¹²²Mukhlis, Edward, Ina Mirawati, 2002, *op.cit.*, hlm. 175-176.

¹²³*Ibid.*

itu bukan hanya tergantung pada keberhasilan membinasakan tokoh utama gerakan yaitu Karaeng Data, akan tetapi terletak pula pada ketiadaan pemimpin yang mampu mengorganisasikan penduduk yang merasa tidak puas terhadap keadaan yang berlaku pada waktu itu. Meskipun penduduk yang mendukung dan menggabungkan diri dengan Karaeng Data yakin bahwa bukan Karaeng Data yang meninggal dalam perang Beba, namun mereka mengakui bahwa Karaeng Data telah meninggalkan mereka, dan baru akan kembali kelak pada waktu yang tidak diketahui dengan pasti untuk memimpin mereka kembali dalam suatu kehidupan

¹²⁴Daeng Patunru, 1969. *Ibid.* Seterusnya dijelaskan bahwa "Menurut pengikut-pengikut Karaeng Data bahwa apa yang telah diumumkan oleh raja Gowa tidaklah benar, karena yang tewas itu adalah salah satu pengikut beliau yang mirip Karaeng Data dan menyamar dengan memakai pakaian dan senjata yang dikenal biasa dipakai oleh beliau. Karaeng Data sendiri menyembunyikan diri dan menunggu waktu yang baik untuk tampil lagi ke depan guna berjuang terus hingga Kerajaan Gowa dapat dimerdekan dari kaum penjajah dan sekutu-sekutunya. Malahan sampai sekarang pun masih banyak yang percaya tahyul menganggap bahwa Karaeng Data masih hidup dan akan datang lagi di tengah-tengah rakyat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Pada zaman penja-jahan seringkali pemerintah Belanda dipusingkan menghadapi gerakan Batara I Sangkilang dan anaknya, yaitu Karaeng Data tersebut karena berbau mistik, sehingga banyak di antara penganjur gerakan-gerakan itu ditangkap dan dihukum di muka Pengadilan atau dibuang. Karaeng Data sebagaimana juga dengan ayahnya, Batara Gowa I Sangkilang dalam kalangan masyarakat merupakan tokoh-tokoh mitos. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa pejuang yang nekad menggunakan nama Karaeng Data yang melakukan perjuangan untuk mengusir Belanda. Itulah sebabnya Belanda sangat takut kepada setiap gerakan mistik, apalagi yang terang-terangan hendak mengusir Belanda dan sekutu-sekutunya, sehingga setiap gerakan itu ditumpasnya secara radikal".

¹²⁵Mukhlis, Edward, Ima Mawarni, 2002. *Op.cit.*, hlm. 179. Pada catatan kaki sumber ini menjelaskan bahwa "Pengikut Karaeng Data membuktikan kebenaran ceritera mereka itu dengan menyatakan bahwa Karaeng Lipukasi yang diminta untuk membuktikan kebenaran, apakah kepala atau hati yang dibawa dari medan perang itu adalah kepala dan hati dari Karaeng Data, ternyata ragu dan tidak yakin. Keraguan itu disebabkan oleh karena kepala

yang baru dan menyenangkan. Karena itu, para pendukung dan pengikut Karaeng Data senantiasa percaya dan menyatakan bahwa yang terpancung dalam perang itu adalah Cambang Raulo.¹²⁵

Setelah usai penumpasan gerakan Karaeng Data dilakukan oleh Belanda di Sulawesi Selatan, berarti satu urusan telah diselesaikan yang dianggap menghambat kembalinya pemerintah Hindia Belanda di daerah ini. Namun demikian, bahwa hubungan antara Belanda dengan para raja-raja di daerah ini tidak juga pernah membaik. Setidaknya hal itu dapat dilihat antara tahun 1816-1824, sebelum Gubernur Jenderal Hindia Belanda G.A.G Phillip Baron van der Capellen (1816-1826) berkunjung ke Makassar. Hubungan Belanda dengan raja-raja Sulawesi Selatan, tidak berkembang dengan baik seperti yang diharapkan oleh Belanda. Arumpone dengan negeri-negeri bawahannya, tetap memperlihatkan sikap permusuhan dan tidak percaya lagi dengan maksud baik Pemerintah Hindia Belanda. Hubungan Tana Bone dengan Butta Gowa, Soppeng dan Sidenreng yang menerima baik kedatangan Belanda kembali untuk berkuasa semakin renggang juga adanya.

Sebelum terjadi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, Arumpone Toappatunru Arung Palakka, wafat dalam tahun 1823 setelah memegang jabatan sebagai raja selama sebelas tahun.

yang dibawa itu adalah kepala seorang yang ber-cambang. Sedangkan Karaeng Lipukasi mengetahui bahwa Karaeng Data tidak bercambang. Di samping itu, Karaeng Lipukasi juga terperanjat karena ketika ia memakan hati orang itu yang telah dicampuri air jeruk dan diletakkan dalam cawan, ternyata pahit. Menurut keyakinan mereka bahwa hati seorang yang luar biasa seperti Karaeng Data seharusnya gurih seperti bongkol kelapa. Itu berarti hati itu bukan hati seorang yang luar biasa atau hati Karaeng Data. Itulah sebabnya sehingga ajaran yang berhubungan dengan keyakinan para pengikutnya bahwa suatu saat Karaeng Data akan kembali. Pengikut dan pendukung Karaeng Data yakin bahwa Karaeng Data hanya melayang atau menghilang dari pandangan mata kasar (*asayang*).

Pada masa pemerintahannya, beliau dikenal sebagai seorang raja sangat gigih menentang usaha Pemerintahan Inggris untuk menguasai Sulawesi Selatan, juga terhadap kembalinya Belanda untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Inggris. Ancaman apapun, beliau tidak pernah mengubah sikapnya untuk tetap bertahan, tidak menerima *kekuasaan asing* untuk memerintah Sulawesi Selatan sebagai negeri jajahan. Arumpone Toappatunru Arung Palakka setelah wafatnya diberi gelar *matinroE ri Lalebatana*, artinya: Baginda yang bersemayam di dalam bentengnya.¹²⁶

Sekalipun demikian, langkah yang ditempuh Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan dalam menghadapi kerajaan-kerajaan sekutu, tetap dengan lunak dan bergiat mengingatkan kembali perjanjian yang pernah dicapai. Selain itu memohon bantuan militer dari Batavia untuk mempertahankan kedudukannya dari kemungkinan serangan dari sekutu, khususnya Bone, Tanete dan Suppa. Permintaan bantuan pasukan itu diterima, namun belum

¹²⁶Mattulada. 1999. *Op.,cit.*, hlm. 334. Selanjutnya dikatakan bahwa: Toappatunru Arung Palakka mempunyai seorang puteri dari isterinyayang bernama I Bau Karaeng Kaju. Puteri ini bernama I Baego atau I Benni. Puteri itulah yang disetujui oleh Dewan Arung PituE Tana Bone, menjadi Arumpone dan dilantik menjadi raja Bone tahun 1823 serta dianugerahi Gelar Sultana Saleha Rabiyyatuddin. Dengan terjadinya peru-bahan pimpinan Tana Bone, ke seorang ratu, maka Belanda mengharapkan akan terjadinya perubahan sikap Tana Bone menghadapi Belanda. Pihak penguasa pusat Hindia Belanda di Batavia, mengharapkan akan terjadinya perubahan politik Tana Bone terhadap Belanda, yang dipandanginya tetap sebagai musuh, karena dengan mudahnya menyerahkan kekuasaan kepada Inggris, tanpa membicarakannya dengan penguasa Tana Bone yang menjadi sekutu setara di negeri ini. Setelah kembali dengan mudahhendak menguasai kembali negeri-negeri yang pernah ditinggalkannya, tanpa perlawanan. Tana Bone yang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda, menyatakan diri sebagai negeri merdeka. Tana Bone mengorbankan perang terhadap Inggris. Maka Tana Bone mengobarkan perang terhadap Inggris. Maka Tana Bone tidak mungkin dengan begitu mudah menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Sulawesi Selatan.

dapat dipenuhi karena Belanda di Batavia juga membutuhkan pasukan untuk memulihkan kedudukannya di Jawa. Karena itu, rencana untuk memulihkan kembali kedudukannya di Sulawesi Selatan baru mulai dicanangkan pada tahun 1822. Untuk itu, dibentuk suatu komisi yang terdiri dari: Gubernur Makassar dan daerah bawahannya, Kolonel Jan van Schelle (1821-1825) dan Mr. Johan Hendrik Tobias. Tugas yang diembankan kepada komisi itu adalah menyusun laporan tentang kondisi politik di Sulawesi Selatan dan merumuskan rancangan perbaikan kondisi politik dan kedudukan Pemerintah Hindia Belanda.¹²⁷

Berdasarkan laporan dan pertimbangan komisi, maka direncanakan kehadiran langsung Gubernur Jenderal untuk melakukan perundingan dengan kerajaan-kerajaan sekutu menyangkut perbaikan butir-butir Perjanjian Bungaya. Laporan yang disampaikan oleh komisi Tobias mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda di Batavia. Oleh sebab itu, Gubernur Jenderal membuat undangan dan diantar kembali oleh Tobias ke Makassar untuk disampaikan kepada raja-raja kerajaan sekutu pada 22 Februari 1824. Dengan dasar itu sehingga dibentuk panitia persiapan yang dipimpin oleh gubernur, Kolonel Schele bersama Johan Hendrik Tobias. Tugas utama dari panitia ini adalah menyusun rencana agenda dan materi pertemuan. Materi-materi inilah yang dibahas terlebih dahulu dalam suatu rapat pendahuluan oleh panitia yang dipimpin oleh Gubernur Makassar dengan raja-raja Sulawesi Selatan, mendahului pertemuan langsung yang akan dilaksanakan dengan Gubernur Jenderal. Ada empat diktum pokok yang dibahas dalam pertemuan awal itu, yaitu:

1. Mengetahui keinginan raja-raja negeri Sulawesi Selatan

¹²⁷Rasyid, 2010. *Op.cit.*, hlm. 103.

tentang kepentingan dan tuntutan-tuntutan masing-masing yang disesuaikan dengan kepentingan rakyat dan Pemerintah Hindia Belanda.

2. Merintis upaya menentukan pembagian wilayah antara Pemerintah Hindia Belanda dengan wilayah-wilayah kekuasaan raja-raja setiap negeri.
3. Mencari negeri atau wilayah negeri di luar yang dikuasai oleh Belanda, yang mungkin sudah ditempati petugas atau pegawai Belanda untuk memajukan perdagangan dan pertanian.
4. Meningkatkan urusan keamanan masyarakat dengan penempatan petugas-petugas Polisi Belanda, untuk mengamankan milik orang seorang, serta perubahan-perubahan peraturan kepolisian yang akan diatur secara terpusat oleh Pemerintah Hindia Belanda.¹²⁸

Setelah Gubernur Jenderal Baron van der Capellen tiba di Makassar pada tanggal 4 Juli 1824, maka Panitia persiapan kemudian menyampaikan laporan pemantauan dan pertemuan pendahuluannya sebanyak tiga poin yang kemudian akan dijadikan dasar atau pedoman dalam perundingan. Ketiga poin adalah; 1) *Gubernemen* di Makassar akan meliputi semua negeri di Sulawesi, dari dan dengan Teluk Palos sampai Tanjung Valsh atau Taliabu, beserta Pulau-Pulau Buton, Selayar dan Sumbawa, kerajaan-kerajaan dalam wilayah itu, akan membentuk suatu persekutuan dimana Tanah Belanda mengepalainya, sedangkan Bone dan Gowa menjadi anggota persekutuan tertua; 2) semua

¹²⁸Mattulada. 1999. *Op.,cit.*, hlm. 335. Dalam sumber lain disebutkan bahwa instruksi dari panitia itu bukan hanya ada empat poin, tetapi sebenarnya ada sepuluh poin yang dirinci secara jelas satu dengan lainnya.. Patunru, 1969. *Sejarah Gowa, Op.,cit.*, hlm. 236-237.

pekerjaan untuk rumah tangga raja-raja, seperti rodi, pemberian upeti atau hadiah-hadiah kepada pejabat kerajaan oleh rakyat, harus dihapuskan; 3) pemusnahan atas pohon rempah-rempah tidak diperbolehkan lagi dilakukan oleh siapa pun.¹²⁹

Setelah kedatangan Gubernur Jenderal dari Batavia, maka Gubernur Makassar mengirim utusan menyampaikan undangan untuk hadir dalam pertemuan lanjutan di Fort Rotterdam.¹³⁰ Raja Tanete, La Patau dengan tegas menyatakan kepada utusan itu bahwa dia tidak bersedia memenuhi undangan itu. Raja Bone, I Maning Arung Data (1823-1835) juga tidak ikut menghadiri pertemuan tersebut, tetapi yang bersangkutan hanya mengirim utusannya yaitu Arung Lompu dan anggota *Ade PituE* untuk mengikuti pertemuan, dengan pesan menyampaikan tuntutan agar pemerintah Belanda mengakui kedudukannya sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat dan menjadi sekutu yang setara dengan Belanda.¹³¹

Setelah Belanda kembali ke Makassar, maka La Patau raja Tanete langsung mengadakan pertemuan dengan para petinggi kerajaan untuk membahas tentang keputusan beliau menolak ajakan kerjasama oleh pihak Belanda. Setelah rapat dimulai, maka La Patau segera menyampaikan keputusannya yang telah menolak

¹²⁹Rasyid. 2010. *Op.,cit.*, hlm.104-105. Selain tiga poin tersebut di atas, ditetapkan pula bahwa di negeri-negeri yang dikuasai langsung, pajak persepuluhan dibayar dalam natura atau dengan uang yang diatur begitu rupa, bahwa rakyat sesudah membayarnya, bebas menguasai penghasilan tanahnya. Cara ini juga untuk mengakhiri pemungutan yang sekian lama dibebankan kepada rakyat oleh orang-orang yang sama sekali tidak berhak. Baca juga: Mattulada, *op.,cit.*, hlm.335

¹³⁰Mattulada. 1999. *Ibid.* Ia menjelaskan bahwa raja-raja yang diundang ke Makassar adalah untuk penghormatan atas kedatangan Gubernur Jenderal dan melakukan permusyawaratan untuk merumuskan "Suatu Perjanjian Baru" mengenai hubungan Hindia Belanda dengan raja-raja Sulawesi Selatan.

¹³¹*Geschiedenis Overzicht van Celebes*, dalam: Rasyid.2010. *Op.,cit.*, hlm.106.

utusan Belanda yang mengajaknya untuk melakukan kerjasama, dan cenderung melakukan perang dengan Belanda. Para peserta rapat terdiam setelah mendengar pernyataan beliau karena tidak menduga sikap pemimpin mereka. Di tengah kebisuan itu, tiba-tiba Kadi Tanete mengajukan dua pandangan, yaitu; 1) tidak ada kerajaan yang berani menentang Belanda; 2) para pendahulu kita telah menjadi sahabat Belanda. Sikap yang diperlihatkan La Patau itu menandakan bahwa keputusannya tidak boleh di ubah dan beliau lalu menjawab usulan dari Kadi Tanete dengan menjawab ; "Kalau begitu turunkanlah perahuku dan saya akan pergi mengembara". Jawaban itu menandakan bahwa beliau lebih senang diturunkan dari tahtanya jika para petinggi kerajaan tidak mendukungnya. Mendengar jawaban dari Baginda La Patau, maka *Pabbicara Ripoccing* segera menjawabnya dan menyatakan "Kami semua tidak pernah mewarisi tradisi untuk menurunkan raja dari tahta kerajaannya, kecuali pohon kayu itu tumbang dengan sendirinya barulah diganti, ataukah raja sendiri mengundurkan dirinya". Jawaban itu menandakan bahwa keputusan beliau akhirnya disetujui oleh para peserta rapat.¹³²

Usai pertemuan, maka beliau lalu mengirim surat kepada Pemerintah Belanda di Makassar, isi suratnya adalah kembali menegaskan bahwa dia tidak akan hadir dalam pertemuan yang telah dirancang oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan beliau juga menjelaskan bahwa dia tetap menolak dan menentang kehadiran Belanda di Sulawesi Selatan. Sikap raja Tanete ini diikuti pula oleh raja Kerajaan Suppa, walau pun caranya agak berbeda yaitu

¹³²Musa, 1990, et all. *IyanaE Poadadaengngi Attoriollongnge ri Tanete*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebu-dayaan, hlm. 156 dan Basrah Gising, 2002. *Sejarah Kerajaan Tanete*. Makassar: Sama Jaya, hlm.138, dalam Rasyid, 2010, *op.cit.*, hlm.106

mengirimkan utusannya ke Makassar untuk menyampaikan maksudnya yaitu menolak untuk hadir dalam pertemuan yang akan diselenggarakan nanti serta menyatakan menolak kehadirannya kembali di Sulawesi Selatan. Sikap penolakan kedua kerajaan itu, juga tidak berbeda dengan Kerajaan Bone, Ratu Bone bahkan mengirim saudaranya sebagai utusan yang bernama La Map-paEwa Arung Lompu, bersama beberapa orang pembesar untuk mewakili beliau dalam pertemuan-pertemuan yang akan diselenggarakan dengan pihak Belanda/ Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kepada semua utusan itu dibekali amanah tentang sikap ratu Bone yang tidak berubah yaitu Tana Bone tetap merdeka dan Sekutu Belanda yang setara. Arumpone adalah Pertuanan dan Ketua Raja-Raja Sulawesi Selatan. Tidak seorang pun raja di Sulawesi Selatan yang boleh berhubungan langsung dengan Pemerintah Hindia Belanda, tanpa melalui Arumpone. Pendirian itu dipegang teguh oleh para utusan dan disampaikannya dengan penuh sopan santun dalam pertemuan.¹³³

Perundingan-perundingan yang dilakukan mendahului perundingan pembaharuan Perjanjian Bungaya 1824, tidak menghasilkan keputusan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemerintah Hindia Belanda. Banyak sekali hambatan berat yang harus dilalui oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk mewujudkan kembali ambisinya menjadi pemimpin dan Pertuanan di Sulawesi Selatan. Sekalipun Pemerintah Hindia Belanda memaksakan kehendaknya, namun sikap yang diambil oleh utusan Kerajaan Bone tetap menolak kehadiran mereka. Pertemuan awal yang dilakukan

¹³³Mattulada.1999. *Op.,cit.*,hlm. 336; Baca juga; Rasyid, 2010.*Op.,cit.*, hlm.107-110; Patunru, 1969.*Sejarah Gowa. Op.,cit.*, hlm. 96-97; Patunru.1989. *Sejarah Bone.Op.,cit.*, hlm. 239-240; Suriadi Mappangara.2003. *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar: dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 69-75

oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda gagal menghasilkan suatu kesepakatan, penyebabnya karena para raja yang diundang untuk menghadiri pertemuan awal itu tidak banyak yang hadir.

Dalam pembicaraan yang dilakukan oleh Arung Lompu, beliau tetap menuntut supremasi Bone atas kerajaan-kerajaan di Celebes harus diakui bahwa tidak ada seorang raja yang diperkenankan menghadap gubernur jika tidak diantar oleh raja Bone. Oleh karena sikap tegas itulah sehingga Gubernur Jenderal Belanda mengambil sikap dengan terlebih dahulu mengadakan sok terapi terhadap Kerajaan Tanete dengan ancaman akan diserang untuk menaklukkannya, begitu juga terhadap Kerajaan Suppa. Hal ini dilakukan mengingat bahwa kedua kerajaan ini sejak kedatangan Belanda sudah menampakkan sikap bermusuhan dan bahkan bersekutu dengan Kerajaan Bone. Ultimatum Belanda ini, juga dimaksudkan untuk menakut-nakuti utusan Kerajaan Bone agar mau mengubah sikapnya yang saat itu sementara berada di Makassar melakukan perundingan dengan Gubernur Jenderal.

Kendati pun Gubernur Jenderal telah mengeluarkan ancaman serangan terhadap sekutu Kerajaan Bone, yaitu Kerajaan Tanete dan Kerajaan Suppa, namun pendirian Arung Lompu tidak goyah sedikit pun. Akhirnya, Arung Lompu kembali ke Bone membawa sepucuk surat dari Gubernur Jenderal untuk diserahkan kepada Arumpone. Surat itu berisikan penolakan Gubernur Jenderal atas pendirian dan sikap politik Arumpone, serta semua tuntutananya. Dan kepada Arumpone di berikan waktu lima belas hari lamanya untuk memikirkan dan mengubah sikapnya. Beberapa kemudian setelah surat diterima oleh Arumpone, maka baginda pun mengirim surat jawaban kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, atas nama Tana Bone, Arumpone, para pembesar utama Tana Bone dan rakyatnya. Surat jawaban tersebut mempertegas kembali hak-hak

dan tuntutan Tana Bone, sebagai negeri merdeka, dan hanya akan menerima bersekutu dengan Belanda atas dasar kemitraan yang setara. Ditambahkannya sebagai penutup surat itu, bahwa Tana Bone bersedia bekerjasama atas dasar sikap tersebut.¹³⁴

Setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengetahui dengan pasti tentang sikap Kerajaan Bone, Kerajaan Tanete dan Kerajaan Suppa, maka perundingan yang telah dilakukan sehari-hari lamanya antara raja-raja negeri di Sulawesi Selatan, rupanya kurang berhasil. Oleh karena itu, perundingan akhirnya ditutup oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 27 Agustus 1824 di Makassar. Perjanjian ini kemudian dinamakan Pembaharuan Kontrak Bungaya, dalam bahasa Belanda disebut *Vernieuwd Bongaisch Contract* (Kontrak Bungaya yang diperbaharui).¹³⁵ Isinya adalah :

1. Perdamaian dan Persahabatan antara Gubernur Belanda dengan raja-raja yang termasuk dalam Perjanjian ini, berlaku sebagai anggota persekutuan.
2. Gubernemen Belanda diakui sebagai pelindung Persekutuan Gubernemen dengan raja-raja anggotanya.
3. Tidak ada keistimewaan di antara anggota-anggota Persekutuan dari apa yang disebut anggota saudara Tua dengan anggota saudara Muda.
4. Raja Gowa dan raja Bone dianggap sebagai anggota-anggota

¹³⁴Daeng Patunru. 1989. *Sejarah Bone, op.cit.*, hlm. 239-240. Berhubungan dengan surat jawaban dari Arumpone itu, yang menolak datang untuk menghadiri pertemuan. Maka pada tanggal 30 Juli 1824, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membuat perjanjian baru dengan raja-raja yang ikhlas, tanpa dihadiri atau persetujuan raja Bone. Kepada Baginda Arumpone diberikan waktu selama dua bulan untuk berpikir dan masuk pada perjanjian baru itu dengan kedudukan sebagai anggota tertua dari persekutuan. Sesudah lewat waktu tersebut, maka jabatan penghormatan itu tidak lagi akan diberikan kepada raja Bone.

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

tertua Persekutuan, dan mereka itu menjamin untuk menghormati antara satu sama lainnya, mengenai daerah-daerah kekuasaan masing-masing.

5. Anggota-anggota Persekutuan menjadikan musuh-musuh Gubernur sebagai musuh-musuhnya, dan sahabat-sahabat Gubernur menjadi sahabat-sahabatnya.
6. Luas dan batas-batas wilayah kekuasaan Gubernur kemudian akan ditentukan dan ditetapkan secara tertulis.
7. Penyelesaian sengketa antara anggota persekutuan melalui dewan sekutu di Ujung Pandang.
8. Demikian juga dengan perselisihan kecil.
9. Raja-raja sekutu berjanji untuk tidak saling berperang.
10. Tindak kejahatan yang berat dengan ancaman hukuman mati hanya dapat diselesaikan atas perintah raja dan dewan Hadat kerajaan. Dan perkara-perkara pembunuhan tidak dapat lagi dikenakan hukuman denda, akan tetapi harus dengan hukuman badan. Kecuali orang-orang Kristen yang melakukan kejahatan, maka dia harus pula diadili oleh orang-orang Kristen juga.
13. Memajukan pertanian.
14. Rakyat dari raja-raja yang masuk perjanjian boleh berdagang dimana-mana asal mempunyai Pas dari Gubernur Belanda dan harus membayar bea cukai masuk dan keluar.
15. Gubernur boleh mendirikan benteng-benteng pertahanan di Celebes, dimana saja menurut kesukaannya.
16. Dilarang mengadakan surat menyurat dengan negara-negara asing dan menerima utusan-utusannya tanpa persetujuan Gubernur.
17. Mata uang Belanda yang harus berlaku di Celebes.
18. Dalam hal kesulitan pengangkatan seorang raja baru,

Gubernemen memberikan keputusan.

19. Sesudah ditutup perjanjian ini tidak ada lagi seorangpun yang akan diterima masuk perjanjian selain dari-pada persetujuan dari anggota-anggota Sekutu.
20. Gubernemen akan dapat mengadakan perjanjian dengantiap anggota Persekutuan tentang urusan-urusan rumah tangga negerinya masing-masing.
21. Gubernemen akan memberi bantuan kepada raja-raja yang bersekutu di mana perlunya.
22. Raja Bone hilang haknya sebagai anggota Sekutu Tertua, bilamana baginda dalam jangka waktu dua bulan sesudah perjanjian ini ditutup.¹³⁶

Sampai batas waktu yang ditentukan, raja Bone tidak juga datang untuk menandatangani Pembaharuan Kontrak Bongaya. Oleh karena itu, Belanda memastikan bahwa Raja Bone, I Benni Arung Data adalah sponsor utama kerajaan-kerajaan yang tidak mau datang untuk berunding dan menandatangani terhadap

¹³⁵Mengenai tanggal dilaksanakannya perundingan tentang Pembaharuan Perjanjian Bungaya, terdapat beberapa sumber yang saling berbeda; Misalnya sumber yang menyatakan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1824 adalah: Mattulada, 1999. *Op.,cit.*, hlm. 337; Rasyid, 2010, *op.,cit.*, hlm.107; Edward, dkk. 2004. *Op.,cit.*, hlm. 222; Sedangkan sumber yang menyebutkan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 1824 adalah: Patunru, 1969. *Op.,cit.*, hlm. 9 ; Daeng Patunru, 1989. *Op.,cit.*, hlm. 241; Andi Palloge, 1990. *Op.,cit.*, hlm. 182; Daud Limbugau. 1985. *Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874*. Jogyakarta: Universitas Gajah Mada (Skripsi), hlm.56. Sementara sumber lainnya menyebutkan bahwa Pembaharuan Perjanjian Bungaya dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1824 adalah; Suriadi Mappangara, 2004. *Op.,cit.*, hlm. 72.

¹³⁶Daeng Patunru. 1989. *Op.,cit.*, hlm.242-243; Mattulada.1999. *Op.,cit.*,hlm. 337-338; Poelinggomang. Dkk.2004. *Op.,cit.*,hlm. 222-223; Daeng Patunru. 1969. *Op.,cit.*, hlm. 94-95; Setelah selesainya ditanda tangani Pembaharuan Perjanjian Bongaya itu, maka Gubernur Jenderal Hindian Belanda meninggalkan Makassar pada tanggal 13 September 1824 kembali ke Batavia.

pembaharuan Kontrak Bongaya. Itulah sebabnya tiga kerajaan yang bersekutu itu yang secara berturut-turut kemudian diserang oleh Belanda yaitu Kerajaan Tanete, Kerajaan Suppa dan Kerajaan Bone.

B. Agresi Militer Belanda

a. Serangan Belanda ke Suppa dan Tanete

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pembangkangan yang dilakukan oleh Kerajaan Tanete terhadap kehadiran Pemerintah Hindia Belanda di Bumi Sulawesi Selatan, maka pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan ekspedisi militer untuk menaklukkan Kerajaan Tanete dan Suppa. Jumlah personil yang dipersiapkan untuk menyerang Kerajaan Suppa dan Tanete adalah 600 orang, terdiri atas 180 serdadu Eropa, 176 orang pribumi, 10 orang *huzzar* dan empat meriam lapangan masing-masing ditarik 4 ekor kuda. Para perwira dan serdadu seluruhnya berjumlah 366 orang. Dan 48 orang marinir dari kapal *Eurydice* dibawah Letnan van Pelt, dan dua palaton kelasi dibawah Letnan Laut D'Ablaing dan van Cattenburg. Letnan Pinet dan van Dedel, keduanya dari kapal *Eurydice*, menawarkan diri untuk ikut dalam ekspedisi yang membawa serta ajudannya. Seluruh kekuatan pasukan ini terdiri atas 20 orang bintara dan serdadu (termasuk 200 orang serdadu Eropa) dan 28 ekor kuda. Marinir dibawah Letnan Kolonel Buijs terdiri atas lima kapal layar, dua kapal meriam dan sebuah kapal pengangkut.¹³⁷

Dalam bulan Oktober 1824, Rabu pagi, kapal perang Belanda telah berada di depan perairan Pancana. Komandan ekspedisi lalu mengirim kurir untuk menemui La Patau, Raja Tanete untuk

¹³⁷Bakkers, J.A. 1862. "Tanete end Baroe", dalam TNI, Thn XI, No.2. dikutip oleh Rasyid. 2010. *Op.cit.*, hlm. 110-111. Baca juga: Muhammad Abduh, dkk. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, IDSN, hlm. 70-72

menyampaikan pesan Pemerintah Belanda agar beliau dapat mengubah sikapnya dan bersedia datang ke Makassar untuk menandatangani Pembaharuan Kontrak Bongaya dan menerima kedatangan kembali Belanda di Sulawesi Selatan. La Patau tidak goyah dari pendiriannya, dan menyatakan bahwa itu adalah merupakan suatu penghinaan pada dirinya. Oleh karena itu Belanda mendaratkan pasukannya di Sudin, sebuah tempat antara Kampung Ance dan Kampung Nyingo yang menurut perkiraan Belanda bahwa tempat itu kurang mendapat perhatian Kerajaan Tanete sehingga pertahanannya agak lemah. Akhirnya menjelang malam pasukan ekspedisi menembakkan meriam ke pusat pemerintahan Tanete, perang pun mulai berkobar.¹³⁸

Pada tanggal 16 Juli 1824 angkatan laut Belanda mulai memuntahkan pelurunya terhadap benteng Tanete yang terletak dipinggir pantai. Pasukan Tanete membalas pula serangan Belanda dari benteng Pancana. Tanete mempertahankan diri dengan perlawanan yang seru. Kedua belah pihak menderita kerugian yang tidak sedikit, di pihak Belanda gugur Letnan Burger dan beberapa orang prajurit lainnya. Ekspedisi yang dilancarkan pihak Pemerintah Hindia Belanda ini berhasil mendesak pasukan Tanete pimpinan La Patau. Banyak korban yang jatuh sehingga La Patau memutuskan mengundurkan diri ke daerah pegunungan. Sebelum mengungsi, beliau sempat mengirim utusan untuk menemui saudara perempuannya yang bernama Daeng Tanisanga agar mengambil alih pemerintahan serta melakukan perundingan dengan pihak Pemerintah Belanda di Makassar untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Selain itu, beliau juga mengharapkan

¹³⁸Poelinggomang, 2005. *Sejarah Tanete: Dari Aganganionjo hingga Kabupaten (belum terbit)*. Pemerintah Kabupaten Barru, hlm. 113; Muhammad Abduh, dkk. 1985. *Ibid.*

agar mengangkat Kadi Pancana, Daeng Masabbi menjadi Kadi Tanete untuk melakukan perundingan, dan mengangkat pula Pabbicara Daeng PaliE sebagai pendampingnya. Setelah semuanya terlaksana maka diumumkanlah kepada masyarakat tentang penyerahan tahta kerajaan kepada Daeng Tanisanga.¹³⁹

Setelah penyerahan tahta kerajaan itu, maka Ratu Tanete Daeng Tanisanga mengutus Daeng Masabbi menemui Komandan Ekspedisi untuk melakukan gencatan senjata dan bersedia berunding. Ia juga menyampaikan bahwa ratu tidak dapat datang karena berhalangan. Permohonan itu dikabulkan pihak pimpin ekspedisi dan berjanji akan mengunjungi sang ratu pada pukul 15.00 (pukul tiga sore). Dalam pertemuan itu, ratu disuruh menghadap ke pemerintah di Fort Rotterdam. Ratu menyetujuinya dan berpesan untuk mengirim utusan yang bernama Ince I Sariba untuk datang ke Makassar.

Tidak beberapa lama kemudian datang utusan menjemputnya dan ia bersama pembesar kerajaan, termasuk Daeng Masabbi dan Pabbicara Daeng PaliE pergi ke Makassar. Kedudukannya direstui oleh Pemerintah Belanda dan bahkan melantiknya secara resmi menjadi ratu Tanete. Setelah itu menandatangani Kontrak Bongaya di Makassar. Kesediaannya mendorong Belanda membangun strategi baru dengan memberi gelar bahwa La Patau adalah Arung Matowa dan adalah Daeng Tanisanga sebagai Arung Malolo. Strategi itu dimaksudkan dapat memikat La Patau untuk datang memohon ampun kepada Pemerintah Belanda dan tidak lagi melakukan perlawanan. Strategi baru itu tidak membuat La Patau bergerak hatinya sedikitpun. Itulah sebabnya La Patau lebih memilih

¹³⁹Rasyid, 2010.*Op.cit.*, hlm.113. baca juga: Muhammad Abduh,dkk. 1985. *Op.cit.*,hlm. 72; Poelinggomang. 2000.*Op.cit.*,hlm. 113.

¹⁴⁰Mappangara, 2004.*Op.cit.*, hlm. 116; Baca juga: Basrah Gising, *op.,-cit.*, hlm. 144; Abd. Gaffar Musa,dkk.*Op.cit.*, hlm. 168, dalam : Poelinggomang. 2005. *Op.cit.*, hlm. 114

memihak kepada Arumpone berperang melawan pasukan Belanda yang bergiat menduduki kembali distrik-distrik bagian utara (*Noordeer Provincie*) pada bulan November 1824.¹⁴⁰

La Patau akhirnya kembali ke Tanete pada awal tahun 1826 dan tinggal di luar pusat pemerintahan. Lalu beliau mengirim utusan untuk menyampaikan ornamen kerajaan yang ada padanya untuk diserahkan kepada adiknya yang telah dilantik menjadi Ratu Tanete. Penyerahan ornamen itu menunjukkan bahwa ia merestui dan mensyahkan pergan-tiannya. Setelah itu La Patau masuk ke pusat kota pemerintahan (*Lalebata*) dan tinggal di rumah INeba. Kehadiran beliau akhirnya diketahui oleh Pemerintah Hindia Belanda, karena itu iapun kemudian diserang pada tahun 1827. Penyerangan ini sebenarnya dilakukan oleh Belanda karena telah dituduh menyembunyikan dan melindungi seorang musuh, yaitu Petta Ambarala. Serangan itu tidak berhasil menangkap beliau karena berhasil meloloskan diri ke daerah Citta, Soppeng. Atas penyerangan itu, maka ratu Tanete berangkat ke Makassar untuk menghindari tuduhan membantu La Patau dan membuktikan kesetiiaannya kepada Belanda dan lagi pula agar supaya serangan tidak dilakukan di Tanete. Namun demikian, Belanda kemudian mengampuninya setelah beliau bersedia menandatangani kontrak politik yang menya-takan bahwa Kerajaan Tanete berstatus kerajaan taklukkan yang kedudukan pemerintahannya dipinjamkan oleh Pemerintah Belanda kepada pihak ratu Tanete Daeng Tanisanga se-bagai pelaksana pemerintah lokal di Tanete. Dan pada tahun 1829, La Patau diangkat kembali menjadi raja Tanete denga status raja pinjaman dan hal ini dilakukan Pemerintah Hindia Belanda dengan harapan yang bersangkutan tidak lagi mengadakan perlawanan.

¹⁴¹Sumber Arsip: ANRI, *Kolonial Verslag* (1839-1848), dalam Edward, 2005.*Op.,cit.*, hlm. 115. Baca juga; Muhammad Abduh,dkk. 1985.*Op.,cit.*, hlm. 73-74; Rasyid. 2010.*Op.,cit.*, hlm. 114-115.

Kekuasaan atas wilayah itu yang dipinjamkan kepada La Patau 1829-1830 harus pula dipisahkan dari Lipokasi, Pancana, dan Lalolang, dipinjamkan kekuasaannya kepada putera mahkota lainnya.¹⁴¹

Pada tanggal 22 Juli 1824, pasukan Belanda menyerang Segeri, Kolonel H.de Steurs dinaikkan pangkatnya karena jasanya yang gemilang menaklukkan daerah-daerah tersebut tadi. Sesudah itu, Belanda mengirim utusan atau eks-pedisinya ke Suppa. Dan sebelum pengiriman ekspedisi itu, Belanda lebih dahulu mendirikan pos penjagaan dan benteng di daerah Pancana, Segeri dan Mandalle. Namun ekspedisi Belanda untuk menyerang Suppa tidak membawa hasil. Sebenarnya, sebelum Gubernur Jenderal Van der Capellen kembali ke Batavia, ia sudah mengeluarkan perintah untuk mengirimkan ekspedisi ke Suppa. Pada tanggal 2 Agustus 1824, pasukan Belanda terdiri dari angkatan laut di bawah pimpinan Kapitein Luitenant Terzee Buys, membawahi empat buah kapal kecil, dua buah kapal meriam, dibantu oleh pasukan Barru yang memakai kapalnya sendiri bersama pasukan darat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Reeder, yang terdiri dari pasukan infanteri, ditambah pasukan darat Sidenreng menyerang Kerajaan Suppa. Untuk menghadapi pasukan Belanda, Suppa mempersiapkan 400 pasukan infantri dan 300 pasukan berkuda, serta bantuan dari Sawitto, Rappang dan Alitta.¹⁴²

Pasukan Belanda akhirnya mendarat di Suppa pada tanggal 5 Agustus 1824. Pertempuran sengit terjadi setelah pasukan perintis di bawah pimpinan Letnan Bauff dengan 30 orang anggota bawahannya terjebak dan mendapat serangan dengan tiba-tiba dari pasukan Suppa yang sedang menunggu-menunggu. Pasukan Belanda terpaksa bertahan sambil berusaha mengudurkan diri

¹⁴²Muhammad Abduh, dkk. 1985. *Op.cit.*, hlm. 67-68.

dengan meninggalkan korban yang tidak sedikit. Di samping itu, Belanda juga berusaha meng-hubungi Sultan Adam agar menyerah saja, namun usaha Belanda ini pun sia-sia karena beliau tetap bertekad untuk meneruskan peperangan melawan Belanda. Tanggal 13 Agus-tus 1824, Belanda tetap bertekad menyerang Kerajaan Suppa dengan mengerahkan sejumlah besar pasukan yang terdiri dari satu detasemen pasukan marinir di samping pasukan artileri membuka serangan berikutnya. Pusat Kerajaan Suppa dihujani peluru meriam sehingga terjadi pertempuran yang cukup sengit yang mengakibatkan korban berjatuhannya antara kedua pihak. Gugur di pihak Belanda adalah Letnan Laut van Pelt bersama sebelas orang anggota pasukannya tewas, banyak pula yang terluka. Namun serangan ini tidak berhasil menundukkan Kerajaan Suppa.¹⁴³

Pada tanggal 23 Agustus 1824, sebuah kapal perang dari Makassar tiba lagi di Parepare membawa bantuan yang terdiri dari 110 orang serdadu infantri dengan persenjataan 10 meriam ukuran besar dan kecil untuk memperkuat pasukan Belanda dalam melawan Suppa. Usaha Belanda untuk menutup Suppa dari sebelah utara dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1824 oleh pasukan

¹⁴³Abduh, dkk. *Ibid.* Kegagalan untuk merebut Kerajaan Suppa, menyebabkan pimpinan Pemerintah Belanda di Makassar mengirim Kolonel H. De Steurs. Beliau adalah salah seorang Kolonel Belanda yang telah dianggap sukses dalam perang penaklukkan Kerajaan Tanete. Kolonel Steurs ini ditugaskan untuk mengambil alih pimpinan penyerangan, Kolonel Steurs didampingi oleh Komisaris Pemerintah Mr. Tobias. Penunjukan itu didasarkan pada surat yang dikeluarkan pada tang-gal 13 Agustus 1824. Setelah itu, maka pasukan Belanda mulai menembaki Suppa dengan hebatnya, baik dari darat maupu dari laut. Dari darat, Belanda dibantu oleh pasukan Sidenreng dan pasukan Gowa. Dalam pertempuran ini Letnan satu Bauff dan Letnan dua Simonius bersama satu detasemen pasukannya diperintahkan untuk membakar habis Suppa. Namun serangan ini gagal, bahkan Letnan Bauff sendiri tewas. Sementara pasukan lainnya yaitu Letnan Letnan Simonius dengan 33 orang anggota pasukannya terluka para semuanya.

gabungan Sidenreng dengan kekuatan 2000 orang dan 70 orang serdadu Belanda. Sebagian pasukan Belanda mengadakan serangan dari selatan dan sebagian lagi menembaki dari laut. Usaha untuk melumpuhkan Kerajaan Suppa ini juga belum berhasil dilakukan oleh Belanda meskipun mendapat bantuan dari beberapa sekutu lokalnya. Empat hari berikutnya, yaitu tanggal 30 Agustus 1824 kembali Belanda melancarkan serangannya di bawah pimpinan Letnan Fokker. Serangan kali ini dengan kekuatan satu detasemen pasukan angkatan laut yang menyerang Suppa sambil membakar, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, namun inipun mengalami kegagalan. Korban jatuh dipihak Belanda yaitu meninggalnya Letnan Strek dan menewaskan sebanyak 22 orang pasukannya dan luka-luka sebanyak 71 orang termasuk Kapten Pahl.¹⁴⁴

Atas kenyataan itu, maka pimpinan pasukan Belanda di Makassar lalu meminta tambahan bantuan dari Batavia guna menghadapi perlawanan rakyat Sulawesi Selatan selanjutnya. Permintaan itu akhirnya dikabulkan, dan pada awal bulan November 1824 pasukan yang diharapkan oleh Kolonel Van Schelle, telah tiba. Pasukan bantuan itu dipimpin oleh Kolonel Bischof yang disusul dengan pasukan ekspedisi berikutnya dengan persenjataan yang lebih lengkap yang dipimpin oleh Mayor J.J. Van Geen.

¹⁴⁴Abduh,dkk. 1985. *Ibid.* Hlm. 69. Kegagalan-kegagalan beruntung yang dialami pasukan Belanda dalam menghadapi Kerajaan Suppa, ternyata membuat para pasukannya mengalami patah semangat atau putus asa. Usaha menaklukkan Kerajaan Suppa ternyata sangat berat sekalipun ia hanya kerajaan kecil. Sekalipun bahwa yang memimpin penyerangan ke Suppa adalah seorang yang berpangkat kolonel yang telah berjasa menaklukkan Kerajaan Tanete, namun gagal total dalam perang melawan Kerajaan Suppa. Sebaliknya, kegagalan Pemerintah Belanda mengalahkan dan menaklukkan Kerajaan Suppa, membawa pengaruh yang cukup besar di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Bone.

Pasukan inilah nantinya yang akan melakukan serangan-serangan terhadap kerajaan-kerajaan yang tidak mau menandatangani pembaharuan "Kontrak Bongaya" yang telah ditandatangani oleh beberapa kerajaan sekutu Belanda pada tanggal 27 Agustus 1824.

b. Serangan Belanda ke Bone

Sejak pergantian pemerintahan dari VOC-Belanda kepada Pemerintahan Inggeris dan dari Pemerintahan Inggeris kembali ke Belanda, di Sulawesi Selatan terus menerus terjadi perlawanan dari para pejuang yang ada di daerah ini. Terutama sekali terjadi pada dekade abad ke-19 dan abad ke-20. Paling gencar perlawanan terjadi sejak kedatangan kembali Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal J.B. Van Hentsz untuk menggantikan posisi Pemerintahan Inggeris. Peperangan dan perlawanan yang paling menonjol terjadi pada masa itu adalah perang antara pasukan Kerajaan Suppa, Tanete dan Bone melawan ekspedisi pasukan Belanda pada tahun 1824.¹⁴⁵

Pada waktu terjadinya persekutuan antara Kerajaan Bone jaman Arung Palakka dengan Belanda, dimana kedua belah pihak saling membantu usaha memperkokoh dan mem-perkuat kekuasaannya di wilayah masing-masing. Pada waktu itu, Kerajaan Bone diberi kekuasaan dan hak istimewa oleh Belanda yaitu bahwa semua raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan yang akan berhubungan dengan Gubernur Belanda di Ujung Pandang, hanya diperkenankan apabila diantar oleh raja Bone. Hak istimewa inilah yang kemudian dihapus oleh Inggeris sehingga Kerajaan Bone

¹⁴⁵ Amiruddin. 1995. *Menelusuri Perjuangan I Maneng Arung Data Raja Bone ke-25 Sebagai Pahlawan Tanah Air 1824-1835*; Dalam "Kumpulan Makalah Seminar Sejarah, dengan Tema: Dinamika Kesejarahan Dalam Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua". Ujung Pandang: Depdikbud, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, hal.118.

¹⁴⁶ Abduh. 1981. *Op.,cit.,*, hal. 48.

menolak atas penghapusan itu. Terjadilah kemudian perang antara keduanya, kendatipun sebelumnya Kerajaan Bone pernah dibantu oleh Inggris dalam menguasai beberapa daerah di bagian selatan.¹⁴⁶

Pada waktu Belanda kembali berkuasa menggantikan Pemerintahan Inggris di Sulawesi Selatan, maka Kerajaan Bone kembali mengajukan pengakuan atas hak istimewa yang telah diberikan oleh Belanda sendiri pada masa pemerintahan Arung Palakka. Hal itu ditolak oleh pihak Belanda dan inilah yang merupakan salah satu penyebab sehingga pada masa pemerintahan Raja Bone I Benni Arung Data tidak mau menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Belanda untuk memperbarui perjanjian Bongaya. Hal ini pula yang menyebabkan sehingga pihak Pemerintah Belanda menuduh Raja Bone sebagai provokator terhadap raja-raja lainnya di daerah ini sehingga tidak mau menghadiri undangan pertemuan Belanda itu. Akibatnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan ultimatum kepada raja Bone bahwa; Apabila raja Bone tidak mau menandatangani perjanjian Ujung Pandang dalam jangka waktu dua bulan, maka Kerajaan Bone akan kehilangan haknya sebagai sekutu Belanda yang tertua di Sulawesi Selatan.¹⁴⁷

Sampai batas waktu yang ditentukan oleh Belanda raja Bone tetap pada pendiriannya, yaitu akan pernah mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda yang telah kembali ke Sulawesi Selatan untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan Inggris. Oleh karena itu, Belanda kemudian mempersiapkan suatu pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang Kerajaan Bone yang dianggap melawan kehendak Pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan. Pengerahan kekuatan secara besar-besaran (agresi I 1824-1825) berjumlah 1300

¹⁴⁷Amiruddin. 1995.*Op.,cit.*, hal. 120.

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

orang serdadu Belanda, 900 orang pribumi (dinas). Korps bantuan dari Panembahan Sumenep terdiri atas satu batalion prajurit tombak dan satu satuan pemanah berjumlah 60 orang. Pasukan Kerajaan Gowa sebanyak 3200 orang, Bantaeng sebanyak 200 orang, Galesong sebanyak 1200 orang, dan Binamu serta Bangkala 1500 orang. Jumlah pasukan seluruhnya adalah 7900 orang. Pasukan ini hanya sebagian yang mempergunakan senjata atau senapan.¹⁴⁸

Senjata-senjata modern yang tersedia dalam agresi ini adalah empat meriam ukuran 12 pon, dua meriam ukuran enam pon, dua mortir 20 inci, 2 mortir 15 inci, meriam lapangan terdiri atas lima dengan ukuran tiga pon, dua howister berukuran 24 pon. Artileri ringan mencakup tiga kanon seberat dua pon, dua kanon seberat satu pon, 6 howister 10 inci, enam howister seberat 13 inci. Dari angkatan laut dipersiapkan sebanyak delapan kapal perang dan tiga kapal meriam, sedangkan untuk tiga kapal angkut dipersiapkan oleh Tuan De Siso atas biaya sendiri.¹⁴⁹

¹⁴⁸Mappangara, 2004. *Op.cit.*, hlm.81. Dalam Mattulada, hal tersebut disebutkan bahwa; Pada pertengahan bulan Januari 1825, tibalah Perwira tinggi Tentara Belanda itu di Makassar, untuk melaksanakan perang penaklukan atas Tana Bone. Kekuatan militer di bawah pimpinan General Mayor van Geen, ditempatkan dibeberapa garnizoen-garnizoen yang diperkuat itu, ialah di Makassar, Maros, Bantaeng dan Bulukumba. Selanjutnya kurang lebih 1.400 orang personil Militer yang amat terlatih dikerahkan untuk penyerbuan ke pusat-pusat pertahanan di Tana Bone. Juga satu Divisi Angkatan laut untuk mendarat di Teluk Bone akan dikerahkan. Pasukan infantri yang didatangkan dari Maluku, juga dipersiapkan untuk penyerangan daratan bersama kurang lebih 3.200 orang laskar Butta Gowa, ikut dikerahkan untuk serangan-serangan ke semua kubuh pertahanan laskar Bone yang tersebar di berbagai tempat. Raja-raja lainnya yang sudah menandatangani pembaharuan Perjanjian Bungaya 1667, juga mempersiapkan pasukan berkuda dengan senjata senapan, barisan pejalan kaki bersenjata tombak dan kelewang ditambah seribu orang dari Selayar. Semuanya menggabungkan diri untuk menyerang Tana Bone dan sekutu-sekutunya. 1999.*Op.cit.*, hlm. 341.

¹⁴⁹*Ibid*, 2004, hlm. 82

Rombongan pasukan ini dipimpin oleh Van Geen tiba di Makassar pertengahan Januari 1825, sedangkan pasukan terakhir tiba pada 31 Januari 1825. Setelah tiba di Ujung Pandang, pasukan ini menanti selama 10 hari lamanya untuk berkumpulnya pasukan-pasukan Pemerintah Hindia Belanda, baik yang datang dari pulau Jawa dan Madura, maupun juga yang berasal dari sekutu-sekutu Belanda yang berada di daerah ini. Pasukan Kerajaan Gowa, Tallo, panglima-panglima perang tertinggi dari kerajaan-kerajaan ini bersatu untuk bersama-sama menyatukan kekuatan menaklukkan Kerajaan Bone dan sekutu-sekutunya. Dalam sumber lontarak disebutkan bahwa persiapan-persiapan ini diceriterakan secara panjang lebar, bagaimana panglima-panglima perang menyatakan keanggupannya dengan mengadakan tari-tarian perang sebelum terjun ke medan laga.¹⁵⁰

Tujuan utama agresi ini adalah untuk menyerang secara bersama-sama Kerajaan Bone dari berbagai penjuru karena dianggap telah melawan dan menentang Pemerintah Hindia Belanda yang baru berkuasa kembali. Akan tetapi sebelum melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Bone, rombongan ini terlebih dahulu menyerang kerajaan-kerajaan kecil yang telah menjadi sekutu Kerajaan Bone. Tujuan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan kecil ini adalah untuk mempersempit ruang gerak Kerajaan Bone bila terjadi pertempuran nanti. Kerajaan-kerajaan yang harus ditundukkan terlebih dahulu itu adalah Sinjai, Bulu-Bulu, dan sebagian lagi dikerahkan untuk menyerang Maros di bawah pimpinan Mayor Van der Wijk guna mempertahankan benteng-benteng Belanda dan seterusnya agar dapat digunakan sebagai tapak untuk menyerang Bone dari arah barat.

¹⁵⁰R..A. Kern dalam Mappangara, 2004, *ibid*

Kekuatan Angkatan Laut Belanda yang dikerahkan ke Teluk Bone, terdiri atas delapan buah kapal perang dan tiga buah kapal meriam, juga kapal-kapal pengangkut pasukan dan perbekalan dari Sumenep. Beberapa puluh buah kapal partikelir yang disewa, bersama 80 buah bark dan perahu-perahu layar pengangkut pasukan bumiputera, semuanya termasuk dalam satuan ekspedisi Penaklukkan I Belanda untuk menaklukkan Tana Bone yang menyatakan diri sebagai kerajaan atau negara merdeka dan berdaulat di Sulawesi Selatan. Selain itu, pasukan infantri reguler dari Jawa sebagai kekuatan utama berangsur-angsur datang dari Jawa. Pada akhir bulan Januari 1825, semua persiapan perang dinyatakan siap untuk melakukan misinya.¹⁵¹

Pada tanggal 5 Februari 1825, Belanda mengirimkan pasukannya ke daerah selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Roeder, dan pada tanggal 28 Februari 1825, ekspedisi Belanda yang disertai pasukan Kerajaan Gowa berangkat meninggalkan Makassar menuju Bantaeng, dan Bulukumba yang selanjutnya menyerang Sinjai dan Kajang.¹⁵² Pada tanggal 10 Maret 1825, pasukan Mayor Lobron bersama Karaeng Bantaeng (I Bagala) memasuki wilayah kekuasaan Kajang. Karaeng Kajang I Daeng Pahakkang, tidak melakukan perlawanan dan memilih jalan untuk berdamai dengan syarat pasukan pemerintah Belanda tidak mengganggu rakyat Kajang. Begitu juga dengan rumah-rumah dan kebun-kebun rakyat tidak dirusak dan dibakar.¹⁵³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa, perundinganpun segera digelar di rumah Karaeng Kajang yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan

¹⁵¹Mattulada. 1999. *Op.,cit.*, hlm. 341.

¹⁵²Amiruddin. 1995. *Op.,cit.*, hlm. 122.

¹⁵³Poelinggomang.dkk. 2004. *Op.,cit.*, hlm 227. Baca juga: Mattulada, 1999. *Op.,cit.*, hlm. 342

orang Bone dan orang Kajang mengamuk. Karaeng Bantaeng yang ikut dalam perundingan itu tewas, tetapi Mayor Lobron dapat meloloskan diri. Akibat kejadian itu, maka Belanda sangat murka sehingga menyerang dan membakar habis rumah-rumah penduduk. Karaeng Kajang dapat meloloskan diri dan mencari perlindungan di daerah-daerah pegunungan. Peristiwa ini sebenarnya sangat merugikan pihak Belanda karena tujuan utamanya untuk menyerang dan menguasai Bone terhambat.

Menurut salah satu sumber menyebutkan bahwa pada tanggal 25 Februari 1825, Mayor Le Bron de Vexela menerima perintah untuk menyerang dari belakang dengan satu kesatuan pribumi yang dibantu oleh satu kompi tentara Eropa melalui Batu Baludan Kassi, terhadap orang-orang Bone yang bertahan dalam jarak tertentu di Bulukumba. Sementara itu, Jenderal van Geen akan bekerjasama dari sisi laut. Sangat beruntung karena usaha ini dilakukan dengan baik Mayor Le Bron dan berhasil merebut empat benteng didekat Kassi dan terjadi pertempuran singkat diantara kedua belah pihak di belakang benteng dan mereka menyerah dengan mudah sehingga mereka dapat masuk dengan gampang ke dalam wilayah Bulukumba, sementara orang-orang Bone segera menarik diri. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Bone, dan memilih sungai Sinjai sebagai tempat pendaratan pertama, panglima beserta kekuatan induknya berangkat dengan kapal ke sana. Sementara Mayor Le Bron de Vaxela sekali lagi akan menempuh perjalanan lewat darat, dengan sebagian besar kesatuan pribumi dan memilih melalui Kassi menuju laut. Tanggal 6 Maret 1825, panglima tersebut berangkat untuk mencapai tujuan operasi di Bulukumba. Perjalanan ini sangat sulit, bukan karena takut sama musuh yang hampir selalu muncul setiap saat di beberapa tempat, melainkan karena jalan yang tidak rata dan sungai yang bergelombang tinggi.

Hal itu menghambat laju perjalanan Mayor Le Bron untuk muncul tepat waktu di Sinjai sesuai waktu yang ditetapkan. Pada tanggal 13 Maret 1825 barulah mereka dapat mendarat dan keesokanpaginya baru mencapai muara sungai Sinjai,¹⁵⁴ segera mempercepat pendaratan dimana orang-orang Bone telah berkumpul dengan suatu kekuatan besar, namun dapat dipukul mundur sebelum peralatan arteleri yang diperlukan dibongkar.

Akibat kekalahan Sinjai, maka terbuka pintu untuk memasuki Kerajaan Bone dari arah selatan dimana Belanda membagi dua pasukannya, satu melalui jalur darat dan satu lagi melalui jalur laut. Pasukan yang melalui jalur segera diperintahkan untuk menaiki kapal mereka masing-masing untuk selanjutnya menuju ke Bone. Medan perang yang berawa-rawa, dan serangan penyakit malaria sangat menghambat laju perjalanan pasukan Belanda. Walaupun demikian, semangat mereka tetap menggebu-gebu untuk secepat mungkin mengakhiri perang lini. Kerajaan Bone akan diserang dari berbagai arah dan penjurus oleh pasukan Belanda yang tekatnya semakin membara itu walaupun menyadari bahwa medannya sangat berat karena banyak rawa-rawa. Mereka berupaya segera untuk dapat menembus pertahanan Kerajaan Bone agar dapat

¹⁵⁴Anomim, 1854. *Bijdragen Tot De Geschiedenis Van Celebes*, dalam *Tijdschrift van het Nederlandsh Indie (TNI) Jilid II*, hln. 138. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keesokan harinya orang mengulangi serangan terhadap benteng-benteng musuh, dan orang-orang Bone segera kembali dipukul mundur, tanpa terkecuali karena takut dengan adanya tembakan panah api. Akhirnya dengan perasaan takut lalu mengundurkan diri dengan pasukan berkuda yang menerobos garis Belanda. Selain itu, ia juga mengalami tekanan melalui pasukan *huzaar* dan satu penolakan yang dilakukan oleh pasukan cadangan yang telah membuat mereka kacau balau sehingga akhirnya mereka meninggalkan daerah itu dan lari ke pegunungan untuk bersembunyi. Negeri Mangarabombang yang telah dikuasai oleh pasukan Bone, diambil alih oleh pasukan Belanda, dan setelah itu, juga Sinjai dikorbankan untuk dibakar.

segera sampai ke pesisir pantai Teluk Bone, yaitu Bajoe. Tempat ini adalah pelabuhan Kerajaan Bone, satu daerah pertahanan yang oleh sebagian rakyat Bone dipercaya tidak akan pernah dijatuhkan.

Pasukan Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Sinjai pada tanggal 23 Maret 1825 menuju Bone dan tiba di sana pada keesokan harinya. Dalam agresi militer ini pasukan Pemerintah Hindia Belanda dibantu oleh Raja Gowa I Mappatunru Karaeng Lembangparang Tumenanga ri Katangka. Pasukan van Geen yang tiba di pelabuhan Bajoe pada tanggal 24 Maret 1825, tidak segera melakukan perlawanan. Rintangan medan yang sangat berat, setidaknya mengurungkan niatnya untuk sementara. Pasukan Belanda menduga bahwa medan pertempuran untuk daerah Bone tentulebih sulit jika dibandingkan dengan apa yang telah dihadapi di Sinjai. Oleh karena itu diadakanlah pengintaian untuk mengetahui keadaan medan pertempuran yang sebenarnya. Van Rijneveld ditugaskan melakukan pengintaian yang kemudian hasilnya dilaporkan bahwa benteng-benteng yang ada di sepanjang pantai tidak tidak menjadi masalah. Benteng-benteng yang ada

Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1825, kesatuan Mayor Le Bron de Vexela muncul. Mungkin sebelumnya tujuan itu dicapai diduga musuh akan lebih dahulu muncul menyerang dan akan menyerang dari belakang sehingga pukulan itu akan sangat berbahaya. Sedangkan Mattulada, 1999. Hlm. 342-343 ada menyebutkan bahwa; Setelah insiden itu (serangan atas Kajang), agar tidak terlambat menggabungkan diri di wilayah Bone seperti yang telah ditentukan, maka pasukan Belanda meneruskan perjalanannya ke Sinjai. Tiba di tempat itu pada tanggal 18 Maret 1825. Pasukan induk Belanda di bawah pimpinan General Mayor van Geen, sudah tiba di Pelabuhan Mangara Bombang (Sinjai) pada tanggal 14 Maret 1825. Kubu-kubu pertahanan orang-orang Bone di Sinjai, dalam keadaan siaga menyambut kedatangan pasukan Belanda. Kedatangan pasukan Belanda baik yang datang melalui darat maupun yang datang melalui laut mendapat perlawanan dan serangan yang hebat.

¹⁵⁵P.B. Standen, hlm. 187, dalam; Poelinggomang. dkk. 2004, *op.cit.*, hlm. 228

diibaratkan hanya sebagai kubangan kerbau semata-mata.¹⁵⁵

Senada dengan itu, sumber lainnya menyebutkan juga bahwa oleh karena penyakit mulai muncul di kalangan pasukan Belanda dan penyebarannya yang sangat cepat di kalangan pasukan operasi militer itu. Oleh karena itu, pimpinan pasukan Belanda segera memerintahkan agar pasukan segera bergerak menuju BajoE, kota dagang utama orang-orang Bone yang dipertahankan dengan benteng-benteng yang sangat baik. Pada tanggal 23 Maret 1825, panglima bersama pasukan induk berangkat kembali kapal ke Bone, dan Mayor Le Bron de Vaxela bersama psukan pribuminya dikirim lewat darat. Tetapi kini dia juga ditipu oleh pepadunya sehingga ia terlambat mengadakan serangan dari arah timur. Setelah armada itu berlabuh di depan BajoE, orang-orang Belanda mengadakan pemantauan seadanya dimana Mayor Gey dan Jenderal van Geen yang memerintahkan agar berdiri dalam jarak tembak dengan meriam Bone. Pada tanggal 27 Maret 1825 ke tempat pendaratan yang dilindungi oleh beberapa rakit dengan serangan palsu. Pasukan yang baru tiba segera bergabung bersama panglimanya, kendati pun medan agak sulit ditembus oleh kapal laut karena kondisi air yang mulai surut. Suatu serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Belanda yang baru tiba dengan bayonet sehingga orang-orang Bone mengundurkan diri mencarai posisi yang strategis untuk mengadakan serangan balik. Baru setelah orang Belanda semuanya mendarat, orang-orang Bone tampaknya mulai menyerang orang-

¹⁵⁶ Anonim, 1854. *Bijdragen Tot De Geschiedenis van Celebes*, dalam ; *Tijdschrift voor Nederlands Indie (TNI) jilid II, op.,cit.*, hlm. 184. Baca juga; Suriadi Mappangara, 2003, *op.,cit.*, hlm.84. Menyatakan bahwa pasukan van Geen tiba di Bone pada tanggal 23 Maret 1825, tidak segera melakukan penyerangan. Rintang medan yang amat sulit setidaknya me-ngurungkan niatnya untuk sementara waktu. Pasukan Belanda menduga, bahwa medan pertempuran untuk wilayah Bone tentu lebih sulit jika dibandingkan dengan apa yang

orang Belanda di laut dengan kekuatan yang besar. Setelah itu, pendudukan benteng-benteng pertahanan segera diambil alih oleh Belanda dengan demikian Bajoe segera dikuasai.¹⁵⁶

Menurut dugaan pihak Belanda, bahwa laskar pertahanan Kerajaan Bone tentu sudah mempersiapkan perlawanan dengan membuat kubu-kubu pertahanan yang dilindungi dengan tanah liat dan batu karang., seperti yang mereka jumpai di kubu-kubu pertahanan yang menghambat pasukan Belanda di Sinjai. Sementara itu, berita tentang gerakan Mayor van Lobron dari Sinjai ke daerah Bone belum juga terdengar oleh orang-orang Bone. Reaksi-reaksi dari daratan terhadap tembakan-tembakan provokasi, itu pun tak ada ter-dengar. Hal itu menimbulkan dugaan bagi pihak Belanda, bahwa laskar Bone amat menahan diri, dan kemungkinan besar tidak bersedia melakukan perlawanan dengan sengit terhadap serbuan pihak Belanda.

Walaupun pasukan Bone mempertahankan wilayahnya di sepanjang teluk Bone sekuat tenaganya, akan tetapi karena persenjataan yang tidak seimbang, akhirnya wilayah pantai BajoE dapat direbut dalam waktu satu hari saja. Dengan jatuhnya benteng pertahanan di sepanjang pantai BajoE, termasuk pelabuhan BajoE mengakibatkan pasukan Belanda tanpa susah payah dapat memasuki ibu kota Kerajaan Bone tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Laskar pengawal Pantai Tana Bone pada akhirnya mengundurkan diri ke daerah pedalaman setelah mencederai beberapa puluh tentara Belanda. Laskar pantai meninggalkan 60

telah dihadapi di Sinjai. Oleh karena itu, diadakan pengintaian untuk mengetahui keadaan medan yang sebenarnya. Van Rijneveld ditugaskan untuk melakukan tugas tersebut dan hasil pemantauannya disimpulkan bahwa benteng-benteng yang ada tidak akan berarti apa-apa, karena ibaratnya hanya sebuah kubangan kerbau.

pucuk meriam dan puluhan senjata bedil, mesiu, dan lain-lain peralatan perang. Dalam pertempuran pantai itu, laskar Bone kehilangan sekitar 200 orang anggota yang tewas. Semua peralatan perang yang ditinggalkan itu dirampas oleh tentara Belanda, termasuk puluhan perahu pengangkut. Kubu-kubu pertahanan dan rumah-rumah sekitar pelabuhan dibumiha-nguskan oleh pasukan Belanda. General van Geen, berte-kad melanjutkan perlawanan untuk menduduki ibukota kerajaan Tana Bone. Beberapa hari kemudian, setelah BajoE diduduki, maka General van Geen, bersama raja Gowa (I Mappatunru Karaeng Lembang Parang), dikawal oleh pasukan pilihan yang kuat, bergerak dengan penuh kewaspadaan yang tinggi dari BajoE ke Kota raja Watampone.¹⁵⁷

Tekanan berat yang dilancarkan pasukan Belanda menjadikan pasukan Tana Bone terpaksa mundur seiring dengan majunya pasukan Belanda. Untuk melemahkan pasukan Belanda, taktik gerilya merupakan alternatif lain dalam rangka memenangkan pertempuran. Taktik yang demikian ini sangat didukung oleh laskar-laskar Bone mengetahui dengan baik medan pertempuran. Diungsikannya ratu Bone secara psikologis telah membangkitkan semangat perlawanan di kalangan rakyat Bone karena raja bagi rakyat Bone dianggap sebagai inti kerajaan. Itulah sebabnya sehingga ratu Bone tidak ditemukan oleh tentara Belanda karena telah diungsikan oleh para pengawalnya. Sebagai akibatnya, maka pasukan Belanda yang memimpin agresi ini merasa kecewa karena tidak dapat menangkap Ratu Bone I Banning Arung Data, Sultan Saleha Rabiattuddin. Segala upaya telah dilakukan untuk mencari

¹⁵⁷Mattulada,1999. *Op.,cit*, hlm. 344. Baca juga: Mappangara, 2004. *Op.,cit.*, hlm. 85; Muhammad Abduh, dkk.1985, *op.,cit.*, hlm. 53-54; Daeng Patunru, dkk. 1989, *op.,cit.*, hlm.249-250; Poelinggomang. 2004. *Op.,cit.*, hlm.228-229.

tahu keberadaan ratu Bone ini. Dari hasil laporan informannya serta laporan-laporan dari berbagai kalangan, diketahui bahwa ratu Bone bersama Arung Lompu berada di daerah Wajo. Sebagian pembesar Kerajaan Bone dan pasukan pertahanannya berada di daerah pertahanan Passempe, di atas lereng gunung, sebuah bukit pertahanan yang sangat ampuh dan sulit untuk ditembus karena posisinya yang sangat strategis. Sementara pasukan-pasukan sekutu Belanda yang putus asa karena lawan telah melarikan diri, dan nafsu perang yang masih berkobar itu, atas persetujuan van Geen, mereka lalu mengadakan pengrusakan-pengrusakan di ibukota Kerajaan Bone, termasuk membakar rumah-rumah penduduk.¹⁵⁸

Usaha keras yang dilakukan oleh General Mayor van Geen untuk bertemu sendiri dengan Arumpone atau para *Punggawa* (panglima) laskar perang Tana Bone, tidak berhasil. Karena itu, ditulisnya sebuah surat ultimatum kepada Arumpone yang diketahuinya berada di Wajo, yang isinya bahwa Arumpone bersama pembesar-pembesarnya dan serta para *punggawa-punggawa* (panglima-panglima) perang yang menyertainya harus menyerahkan diri di Watampone. General Mayor van Geen menjanjikan pengampunan apabila seruannya untuk menyerahkan diri dipenuhi. Kurir yang membawa surat itu, tak berhasil menemui Arumpone dan Arung Lompu. Pembesar Tana Bone yang berhasil ditemuinya, hanyalah mangkubumi kerajaan Tana Bone,

¹⁵⁸Poelinggomang.dkk.2004,*op.,cit.*, hlm. 229; Baca juga Mattulada, 1999. *Op.,cit.*, hlm. 344-345

¹⁵⁹Mattulada,1999.*Op.,cit.*, hlm. 345. Baca juga; Suriadi, 2004, *op.,cit.*, hlm. 86. Dalam sumber ini juga menyebutkan adanya surat *ultimatum* Belanda yang dikirimkan kepada Ratu Bone dan para pembesar Kerajaan Bone yang telah menyingkir ke daerah Wajo. Bahwa setelah pasukan Kerajaan Bone yang menjaga pesisir pantai teluk Bone tidak bisa menghalangi laju impasi pasukan Belanda dan terjadi pertempuran sengit yang tidak seimbang, maka

Tomarilaleng dan beberapa orang pembesar lainnya. Para pembesar Tana Bone itu, sama sekali tidak memberi reaksi terhadap *ultimatum* Belanda itu.¹⁵⁹

Agresi Belanda dianggap gagal oleh karena dalam serangan besar-besaran yang dilancarkan ini tidak berhasil menangkap Ratu Bone I Benni Arung Data karena telah diungsikan oleh para pengawalinya. Target sasaran yang sebenarnya adalah harus dapat menangkap raja Bone karena beliau dianggap tokoh penting yang telah menjadi pelopor penolakan atas raja-raja di Sulawesi Selatan terhadap rencana Pemerintahan Belanda untuk melakukan pembaharuan Kontrak Bugaya 1824 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di daerah ini. Oleh karena itulah pimpinan pasukan Belanda dalam agresi itu merasa kecewa atas kenyataan itu, sehingga Van Geen berusaha untuk mengadakan serangan ke daerah Wajo-Bone, tempat diperkirakan raja Bone dan pembesarnya berada. Sementara raja Bone diminta untuk menyerah, Belanda juga mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Letkol Zoutman bersama 100 orang infantri, juga ikut Kapten Herzens untuk mengejar armada BajoE yang telah melarikan diri. Mereka yang dikirim segera menyusuri sungai Cenrana, tetapi usaha itu tidak berhasil juga untuk mengejar raja Bone. Bahkan disimpulkan pada kenyataan itu bahwa memang raja Bone tidak mau menyerahkan diri sehingga harus dikejar sampai dimana pun juga.¹⁶⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyerangan ini gagal karena cuaca tidak memungkinkan sebab hujan turun terus menerus

pesisir pantai Teluk Bone akhirnya dikuasai dan pelabuhan BajoE diduduki oleh pasukan Belanda dan sekitarnya. Dengan demikian jalan menuju ibukota raja sudah terbentang lebar.

¹⁶⁰Anonim, 1854, *Bijdragen Tot De Geschiedenis Van Celebes, op., cit.*, hlm. 185

hingga air sungai Cenrana meluap sehingga banjir dan sulit untuk diarungi. Selain itu juga, wabah penyakit malaria berjangkit dan membawa bencana bagi pasukan Belanda. Terdapat enam orang perwira, termasuk Mayor Gambier, Letnan Vlingius, Bouwman, Bestelmeijer, Rubay, dan Cevers wafat karena terserang penyakit malaria. Bertambahnya jumlah pasien sakit di antara pasukan Belanda yang kembali, menuntut adanya istirahat bagi pasukannya.

Setelah ibukota kerajaan telah dibumihanguskan oleh pasukan Belanda dan sekutunya, maka Van Geen segera menarik pasukan induknya kembali ke Makassar melalui laut. Hal ini dilakukan mengingat bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukan di Kerajaan Bone mengingat rajanya sudah melarikan diri bersama para pembesarnya ke daerah Wajo sehingga tidak ada penyelesaian politik antara keduanya. Juga karena mengingat bahwa musim barat segera tiba dimana sangat membahayakan bagi pelayaran di Teluk Bone. Akhirnya van Geen tiba di Makassar pada tanggal 9 April 1825. Sementara itu, pasukan lainnya yang dipimpin oleh Mayor Le Bron de Vexela meninggalkan Tana Bone melalui jalan darat lewat pegunungan dan tiba di daerah Maros pada tanggal 21 April 1825, dan sehari kemudian tiba di Fort Rotterdam.

C. Akhir Perlawanan

Meskipun pasukan Kerajaan Bone telah melakukan perlawanan sekuat tenaga, namun karena perlengkapan perang yang dimilikinya tidak seimbang dengan persenjataan yang dimiliki oleh Belanda dan sekutunya, sehingga akhirnya kalah. Dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi selama perang tahun '1825, banyak sekali korban yang berjatuh pada kedua belah pihak. Kehancuran Ibukota Kerajaan Bone karena dibumihanguskan oleh pihak Belanda bersama sekutunya, dilakukan pihak Belanda karena

merasa kesal dan kecewa sebab raja Bone yang menjadi target utama untuk ditangkap, ternyata telah melarikan diri bersama para pembesarnya.

Usai melakukan penghancuran terhadap kota raja, dan melakukan pengejaran terhadap raja Bone tetapi tidak berhasil, akhirnya pasukan induk dan sekutu Belanda memutuskan meninggalkan Tana Bone menuju Makassar. Sebaliknya, raja Bone yang mengetahui bahwa pasukan Belanda dan sekutunya telah meninggalkan kota raja, maka segera beliau bersama pembesarnya kembali ke kota raja. Tetapi alangkah sedih hatinya ketika melihat kota raja telah rata dengan tanah karena habis dibakar oleh Belanda bersama sekutunya. Beliau bertekad untuk segera membangun kembali kota raja dan akan segera memperbaiki urusan tata pemerintahan karena selama perang berlangsung, urusan ini tidak pernah diurus lagi.

Penyerangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Belanda bersama sekutunya ke Bone, akhirnya tidak menghasilkan keputusan apa-apa yang berarti. Belanda tidak berhasil untuk memaksakan kehendaknya agar Bone dapat mematuhi isi dari perjanjian Bungaya yang sudah diperbaharui pada tahun 1824. Kegagalan ini menjadikan hubungan Kerajaan Bone dan Belanda semakin renggang. Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda dinyatakan gagal total dan tidak menghasilkan keputusan politik yang diharapkan. Oleh karena itu, pasukan Belanda tidak menempatkan pasukannya di Tana Bone meskipun daerah itu telah dikuasainya. Status Kerajaan Bone pada saat itu tidak diketahui seperti apa karena sewaktu wilayah itu dikuasai oleh Belanda, wilayah itu telah dikosongkan oleh raja Bone. Penyelesaian sengketa antara Belanda dan Tana Bone pada saat itu tidak ada titik temu karena pimpinan antara keduanya tidak

pernah bertemu diakhir pertempuran. Itulah sebabnya ketika kota raja Watampone telah dibakar habis, maka Belanda segera menarik mundur pasukannya kembali ke Makassar.

Penarikan mundur pasukan Belanda dan sekutu-sekutunya dari kota raja Watampone dilakukan sebab saat itu tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh pasukan Belanda mengingat raja Bone tidak ada di kota raja karena telah mengundurkan diri ke pedalaman. Apalagi ada kekhawatiran pasukan Belanda bahwa tidak lama lagi akan datang musim hujan yang akan menyebabkan pelayaran di Teluk Bone akan sangat berbahaya sehingga sebelum musim itu datang, mereka harus segera meninggalkan Tana Bone. Apabila penarikan pasukan terlambat dilakukan, maka ada kemungkinan mereka akan tertahan lama di daerah Bone. Sementara itu, tenaga-tenaga pasukan Belanda yang ada di Sulawesi Selatan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Batavia untuk menghadapi Perang Diponegoro (1825-1835). Itulah sebabnya sehingga Jenderal van Geen bersama armada dan pasukannya kembali ke Jawa untuk segera mengambil bagian dalam peperangan melawan Diponegoro.

Sementara itu, raja Bone bersama seluruh pembesar kerajaan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Belanda dan sekutunya. Segala aspek diperbaiki dan ditata kembali dengan sebaik-baiknya, termasuk konsolidasi pasukan perang, perbaikan pertanian dan kehidupan ekonomi dibangun kembali dengan penuh kesungguhan dan daya upaya yang keras dan berkelanjutan sehingga berhasil dengan memuaskan. Setelah semua kegiatan rehabilitasi selesai dilakukan, maka sejak tahun 1825, terjadi perpecahan di dalam tubuh kerajaan menjadi dua kelompok yang berbeda pandangan terhadap Pemerintah Hindia Belanda yang ada di Sulawesi Selatan. Perpecahan itu dipicu

oleh kehadiran kembali Belanda di Tana Bone yang merupakan suatu persoalan besar dalam Kerajaan Bone sepanjang abad ke-19.

Menurut Mattulada, 1999, bahwa kedua kelompok yang dianut oleh pembesar Tana Bone yang berlawanan itu, disebut sebagai berikut;

- a. Golongan pertama; adalah pendirian Arumpone Sultan Saleha Rabiutuddin, didukung oleh Arung Lompu dan *Punggawa* (panglima perang) Tana Bone serta sebahagian pembesar Pemerintahan Pusat Tana Bone. Pendirian atau sikap golongan ini, ialah sama sekali menolak adanya niat dan usaha perdamaian dengan Pemerintah Belanda.
- b. Golongan kedua; dipelopori oleh Mangkubumi Tana Bone La Mappangara Arung Sinre, didukung oleh sejumlah Pembesar Tana Bone lainnya, bersikap moderat. Mereka menerima usaha yang bersifat konfromistik, menerima perdamaian dan persekutuan dengan Pemerintah Belanda, agar Tana Bone terhindar dari kehancuran karena dilanda oleh peperangan.¹⁶¹

Selama agresi militer Belanda ke Bone 1824-1825, sikap *tomarilaleng* Kerajaan Bone yang didukung oleh Arung Barru Sumangerukka To Patarai saling bertentangan dengan yang dilakukan oleh raja Bone ketika itu sehingga menimbulkan konflik antara keduanya. *Tomarilaleng* berulang kali berusaha untuk mengubah sikap Arumpone yang anti terhadap Belanda, namun usaha itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Tiga tahun setelah penyerangan Bone oleh Belanda, atau pada tahun 1828 suasana pertentangan antara Kerajaan Bone dengan Pemerintah Hindia Belanda menjadi hangat kembali. Raja Bone Arung Data

¹⁶¹Mattulada, 1999, *op., cit.*, hlm. 346-347. Baca juga; Daeng Patunru, dkk. 1989. *Op., cit.*, hlm. 252-253

bersama pengikut-pengikutnya menyatakan dendamnya terhadap Belanda, beliau bahkan menyatakan bahwa selama beliau masih hidup maka ia akan menyuruh buruh semua orang Eropa (Belanda) yang berani menginjakkan kakinya di daerah kekuasaannya. Sikap raja Bone inilah yang ditentang oleh *tomarilaleng* La Mappangara Arung Sinre karena dianggap terlalu keras.¹⁶² Kerajaan Bone gagal, maka beliau memutuskan untuk meninggalkan Kerajaan Bone dan memilih Makassar sebagai tempat tinggalnya.

Akibat usaha yang telah dilakukan oleh La Mappangara Arung Sinre sebagai *tomarilaleng*. Kepergian Arung Sinre *Tomarilaleng* Bone ke Makassar, melapangkan pengaruh bagi kelompok pertama yang dimotori oleh Arumpone dan sebagian besar pembesar Kerajaan Bone yang berhaluan keras terhadap kehadiran Belanda yang semakin kuat. Kelompok ini semakin berkibar oleh karena raja Bone sendiri sebagai panutan dan pemimpin rakyat Bone adalah tokoh penentang paling keras terhadap Belanda, kemudian diamini oleh para pembantunya yang juga sangat berpengaruh di kalangan masyarakat. Selama Arung Sinre berada di Makassar, beliau berusaha sedikit demi sedikit, agar negerinya (Kerajaan Bone) mendapat ampunan dari Guber-nemen. Pada awalnya beliau memperoleh sedikit harapan akan hal itu, tetapi pada tahun 1835 Arumpone wafat, begitu juga *Punggawa Bone* sehingga merubah situasi dimana pe-ngaruh Arung Sinre semakin kuat kembali. Usaha-usaha untuk memperoleh pengampunan Kerajaan Bone dari Belan-da, kembali digagas.

Ketika raja Bone wafat dalam tahun 1835, beliau tidak mempunyai keturunan sehingga yang menggantikan kedudukannya atas persetujuan *Dewan hadat PituE* adalah

¹⁶²Daeng Patunru, 1989,*ibid*.

saudaranya yang bernama La Mappasilling Arung Panyili. Kondisi Kerajaan Bone pada masa awal pemerintahan beliau sedikit mengalami kegoncangan karena meningkatnya suhu politik antara kedua kubu yang berbeda prinsip terhadap kehadiran Belanda. Raja Bone sangat berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahannya karena beliau tidak mau dicap sebagai raja yang berat sebelah dalam menghadapi kedua kubu yang sedang berbeda sikap dan prinsip. Oleh karena itu, setahun setelah beliau menduduki tahta Kerajaan Bone dengan terpaksa harus memulihkan kembali kedudukan La Mappangara Arung Sinre sebagai *tomarilaleng* Kerajaan Bone. Kebijakan ini sebenarnya dirasakan berat sebelah oleh kelompok pendukung raja yang telah wafat, tetapi hal ini dilakukan oleh raja Bone mengingat tekanan dari dalam kerajaan sangat kuat.

Pemulihan kedudukan La Mappangara Arung Sinre sebagai *tomarilaleng* Kerajaan Bone membuat peta kekuatan berpihak kepada *tomarilaleng*. Itulah sebabnya beliau segera mengambil kebijakan yang lebih moderat terhadap Pemerintah Belanda. Sikap ini bertolak belakang dengan prinsip dari kubu pendukung ratu I Benni Arung Data. Kelompok ini lalu menentang kebijakan Arung Sinre dengan jalan melakukan koordinasi kekuatan untuk mengimbangi hal tersebut. Tetapi karena posisi Arung Sinre lebih kuat dan lebih dekat dengan raja sehingga beliau dapat meyakinkan raja Bone untuk segera membuka perundingan-perundingan dengan Pemerintah Belanda agar hubungannya dapat harmonis kembali.

Usaha Arung Sinre *tomarilaleng* Kerajaan Bone membujuk Raja Bone La Mappasiling Arung Panyili untuk membuka perundingan dengan Pemerintah Belanda, akhirnya terlaksana pada tahun 1837 atau dua tahun setelah menduduki tahta Kerajaan Bone. Perundingan antara keduanya masing-masing diwakili

oleh Gubernur Makassar De Filietas Bousquet untuk Belanda dan Kerajaan Bone oleh raja bersama sebagian pembesarnya, hasil sangat memuaskan bagi Belanda karena ada sinyal atau tanda menuju meja perdamaiannya. Pada tanggal 13 Agustus 1838 antara Kerajaan Bone dan Pemerintah Belanda mengadakan perdamaian dan perjanjian persahabatan. Perdamaian yang telah disepakati antara kedua pihak, setidaknya untuk sementara dapat memulihkan keadaan di Sulawesi Selatan.¹⁶³ Sekalipun raja Bone telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Pemerintah Belanda, namun beliau tidak pernah mau mengangkat sumpah atas perjanjian tersebut, sungguhpun demikian kenyataannya, yang pasti bahwa antara Kompeni Belanda dan pihak Kerajaan Bone telah terwujud kontrak perdamaian.

Perdamaian yang telah dicapai antara kedua pihak, sebenarnya telah memberi dampak yang kurang baik bagi Kerajaan Bone. Pasca perdamaian itu menyebabkan suhu politik cenderung meningkat dan memanas karena kelompok Arung Kajuara (pendukung anti Pemerintah Belanda) telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan *tomarila-leng* Arung Sinre. Konflik antar kedua kelompok itu

¹⁶³ Poelinggomang, dkk. 2004. Op., cit., hlm. 233-234. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: Ketidakpuasan kerajaan Bone terutama yang menyangkut dengan hal-hal istimewa yang didapatkan dari VOC (zaman Arung Palaka), dapat diselesaikan dengan mencantumkan bahwa utusan atau wakil dari raja Bone atau Raja Gowa yang tertua dalam pemerintahan akan mendapatkan kedudukan yang istimewa. Ikatan ini ternyata dapat meredam perang yang muncul sejak tahun 1824. Kedua penguasa ini berusaha sekeras mungkin untuk menjaga dan mematuhi syarat-syarat dalam perjanjian Bungaya 1824 yang telah ditandatangani. Hal ini setidaknya telah memberi kepuasan kepada Pemerintah Belanda, terlebih lagi dapat memaksa Kerajaan Bone tunduk kepada Pemerintah Belanda. Namun perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak, merupakan satu kemajuan yang pesat dan positif, di tengah munculnya konflik di daerah ini sehubungan dengan kehadiran Belanda. Kepuasan ini semakin bertambah dengan sikap tegas Raja Bone La Mappasilling Arung Panyili yang menolak ulur tangan James Brooke untuk membuat perjanjian persahabatan pada tahun 1840

akhirnya melahirkan perang saudara yang berakhir pada tahun 1842. Pasca perang saudara itu, kondisi keamanan di Kerajaan Bone berangsur mulai kondusif, namun hal ini tidak berlangsung lama sebab tahun 1844, kelompok haluan keras melakukan kudeta terhadap *tomarilaleng* Arung Sinre. Pertentangan yang melahirkan kudeta ini tidak hanya melibatkan Arung Sinre, tetapi juga raja Bone yang kemudian berselisih paham dengan Singkerru Rukka, yang juga berpandangan pro Belanda. Akhirnya Arung Sinre melarikan diri ke daerah Maros dan Arung Palakka (putera mahkota) beserta pembesar-pembesar Kerajaan Bone melarikan diri ke Barru.¹⁶⁴

Sehubungan dengan masalah itu, maka ketika Raja Bone La Mappasilling Arung Panyili meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1845, sementara putera mahkota tidak berada di Kerajaan Bonesehingga yang diangkat oleh *Dewan Hadat Pitu* adalah kemanakannya sendiri yang bernama La Parenrengi Arumpugi. Pelantikan raja Bone ini ditentang oleh kelompok Arung Sinre yang menginginkan Arung Palakka naik menduduki tahta Kerajaan Bone. Oleh karena itu, sekali pun telah dilantik raja yang baru, namun tidak menyelesaikan per-masalahan yang ada. Bahkan ada indikasi munculnya intrik-intrik untuk menggulingkan raja yang baru dilantik itu, yang didukung langsung oleh Arung Palakka dan Arung Sinre yang telah melarikan diri keluar dari wilayah Kerajaan Bone.

Masa awal pemerintahan La Parenrengi Arumpugi, hubungan dengan Pemerintah Belanda berjalan apa adanya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, hubungan baik itu mulai menemui banyak hambatan. Hambatan ini dipicu oleh adanya dua kelompok yang sejak tahun 1824 mulai terlihat, terutama perbedaan sikap terhadap kehadiran Pemerintah Belanda. Ada kelompok

164 Ibid.

moderat yang menginginkan kerja-sama dengan Belanda dan satunya lagi berhaluan keras yang tidak mau sama sekali menerima kehadiran Belanda di Sula-wesi Selatan. Kelompok moderat ini terutama diopelopori oleh Arung Palakka dan Arung Sinre yang merasa tidak puas sehingga mereka merancang suatu kudeta. Rencana kudeta itu sebenarnya dilatari oleh perasaan tidak puas atas pelan-tikan raja sebelumnya yaitu La Parenrengi Aumpugi. Padahal Arung Palakka menurut garis keturunannya adalah merupakan putera mahkota yang berdarah murni. Beliau bukan yang dilantik ketika penggantian raja oleh sebab yang bersangkutan pada waktu yang bersamaan tidak berada di tempat. Oleh karena tidak memungkinkan menyimpan jenazah seorang raja terlalu lama, maka *Dewan Hadat Pitue* menyetujui usul para pembesar kerajaan agar beliau digantikan oleh La Parenrengi Arumpugi, yaitu kemanakan dari raja yang sudah wafat.

Perlawanan Arung Palakka diperlihatkan pada tahun 1853 ketika beliau berangkat ke Makassar untuk melaporkan kepada Belanda bahwa keadaan di Kerajaan Bone sekarang sudah stabil sehingga diharapkan kepada Belanda untuk me-ngadakan peubahan mendasar seperti yang diharapkan oleh rakyat Bone. Apa yang dilaporkan oleh Arung Palakka itu mendapat perhatian dari Pemerintah Belanda. Untuk itu, Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya mengunjungi Barru, tempat berdiam sementara Arung Palakka, lalu beliau juga meminta informasi dari raja Tanete, dan Sidenreng tentang kondisi di Kerajaan Bone. Apa yang dilaporkan oleh Arung Palakka, akhirnya tidak ditindaklanjuti lagi oleh Pemerintah Belanda oleh karena Arung Palakka dianggap tidak lagi berada di daerah Kerajaan Bone, sedangkan apa yang terjadi di Kerajaan Bone dianggap urusan intern kerajaan tersebut. Karena masalahnya urusan intern, maka sebaiknya hal itu diselesaikan

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

sendiri oleh raja Bone tanpa campur tangan pihak lain, termasuk Pemerintah Belanda. (*)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan & Saran

Hubungan antara Arung Palakka dan VOC semakin terjalin oleh karena sama-sama mempunyai kepentingan. Arung Palakka bersedia membantu VOC untuk menghancurkan Kerajaan Gowa agar Kerajaan Bone dan Soppeng dapat terbebas dari perbudakan Kerajaan Gowa. Sementara itu, VOC sendiri bersedia bekerjasama dengan Arung Palakka karena menganggap Kerajaan Gowa adalah batu sandungan untuk menjalankan monopoli perdagangan di Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, pada tahun 1655, Arung Palakka dan Joan Maetsuyker mengikat suatu perjanjian. Isi perjanjian itu adalah bahwa "Selama matahari dan bulan memancarkan sinarnya, selama itu pula Bone dan Kompeni Belanda tetap bersatu teguh". Perjanjian ini tercetus berkat bantuan Arung Palakka terhadap VOC dalam perang untuk menundukkan Pariaman. Setelah itu Arung Palakka meminta kepada VOC untuk membantunya membebaskan Kerajaan Bone dari jajahan Kerajaan Gowa. Permintaan bantuan itu diterima VOC karena usaha untuk menduduki Kerajaan Gowa, juga menjadi cita-citanya.

Mereka kemudian membuat kesepakatan untuk me-lancarkan serangan atas Kerajaan Gowa. Setelah persekutuan terjalin, maka Kerajaan Gowa diserang, VOC dipimpin oleh C.J. Speelman

yang dibantu oleh Kapten Jonker Van Maniva dari Ambon serta Arung Palakka dan pasukan Angke yang terkenal itu. Setelah terjadi beberapa kali pertempuran hebat antara kedua pihak, maka Kerajaan Gowa menyatakan takluk atas VOC (Belanda) dan sekutu-sekutunya. Perundingan damai pun segera dilakukan untuk mengakhiri perang yang telah memakan banyak korban pada kedua belah pihak. Tanggal 18 November 1667, lahirlah perjanjian yang sangat terkenal sampai sekarang dengan nama Perjanjian Bungaya. Kendati pun perjanjian telah ditandatangani, namun perlawanan-perlawanan dari pihak Kerajaan Gowa belum juga tuntas. Sehingga pada tanggal 27 Juli 1669, dibuat lagi perjanjian baru untuk mengakhiri pertentangan di antara kedua pihak.

Lahirnya Perjanjian Bungaya, menandakan keruntuhan Kerajaan Gowa. Tetapi keruntuhan itu oleh sebagian pembesar Kerajaan Gowa tidak diterima dan berusaha melakukan perlawanan tetapi selalu gagal. Kegagalan itu memicu mereka untuk meninggalkan Kerajaan Gowa lalu berusaha mencari dukungan di luar wilayahnya kemudian kembali menyerang VOC dan sekutunya. Hal ini pun tidak banyak membawa hasil karena selain VOC yang harus dihadapi, juga Arung Palakka dan pasukan Bugisnya yang kuat dalam jumlah besar.

Sementara itu, pasca jatuhnya Kerajaan Gowamaka Kerajaan Bone menjadi satu-satunya kerajaan yang memegang kekuasaan politik di Sulawesi Selatan dibawa kendali Arung Palakka. Kendati Arung Palakka ketika awal keruntuhan Kerajaan Gowa belum diangkat menjadi raja, namun dalam tindak tanduknya seolah-olah dia yang menjadi raja Bone. Hal ini tentu saja berkaitan dengan jasa beliau dalam meruntuhkan Kerajaan Gowa sehingga oleh VOC diberikan hak istimewa. Hak istimewa itu meliputi bahwa setiap raja-raja atau pembesar kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ingin

menghadap gubernur di Fort Rotterdam harus sepengetahuan dan seizin Arung Palakka. Sekali pun Arung Palakka mendapat hak istimewa dari VOC, namun dalam berbagai hal beliau tidak tunduk sepenuhnya atas VOC. Hal ini disebabkan karena beliau sendiri mempunyai cita-cita untuk menjadikan Sulawesi selatan dalam satu ikatan kekeluargaan yang menempatkan Kerajaan Bone sebagai kendali dalam menentukan nasib wilayah tersebut.

Dalam perjalanan sejarah kedua pihak (VOC dan Arung Palakka) tidak selalu berada dalam satu kesatuan pendapat. Bahkan dalam kenyataan Arung Palakka lebih populer di kalangan masyarakat dibanding VOC. Selain itu, Arung Palakka juga mencoba untuk membangun kembali hubungannya dengan Kerajaan Gowa. Hubungan tersebut yang semakin akrab tersebut sangat mengkhawatirkan pihak VOC, apalagi ketika Arung Palakka mengadakan perkawinan lintas politik antara La Pataudengan I Mariama Karaeng Patukkangan. Hasil perkawinan ini nantinya dipersiapkan untuk menduduki tahta Kerajaan Gowa.

Sementara itu, kondisi Kerajaan Bone pasca kematian Arung Palakka sedikit mengalami perubahan oleh karena pimpinan baru VOC cenderung melupakan hak-hak istimewa yang telah diberikan kepada Kerajaan Bone oleh pemerintah VOC sebelumnya melalui C.J. Speelman. Apalagi pada awal abad ke-19 Inggris juga sudah mulai muncul di wilayah Sulawesi Selatan untuk menanamkan kekuasaannya. Bahkan Inggris telah mencoba secara rahasia untuk membina hubungan dengan Kerajaan Bone. Hubungan antara Inggris dengan Kerajaan Bone tercipta lewat bantuan Inggris kepada Kerajaan Bone ketika menyerang dan berhasil menghancurkan pos-pos pertahanan VOC Belanda yang ada di daerah Bantaeng dan Bulukumba pada 1797. Demikian juga ketika dalam 1800, Kerajaan Bone juga dibantu oleh Inggris untuk

memblo-kade pantai sebelah Selatan Makassar, sekalipun usaha ini tidak berhasil mendudukinya.

Kendatipun antara Inggris dan Kerajaan Bone telah terbina hubungan baik jauh sebelum Inggris menduduki Sulawesi Selatan, namun ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1811 dari tangan VOC Belanda, justru Bone menolaknya. Penolakan pihak Kerajaan Bone atas pendudukan Inggris tersebut didasarkan pada isi Perjanjian Bungaya 1667-1669, terutama pada pasal 6 yang berisi antara lain; Bahwa orang-orang Inggris harus diusir dari Celebes (Sulawesi). Sikap Kerajaan Bone yang menolak kehadiran Pemerintah Inggris di Sulawesi Selatan sangat mengkhawatirkan bagi Inggris. Karena sikap penolakan itu, maka Pemerintah Inggris mengingatkan pihak Raja Bone ke-23, Toappatunru mengenai hubungan mereka pada masa sebelumnya.

Peringatan itu tidak dihiraukan oleh pihak Kerajaan Bone, kecuali tuntutan Kerajaan Bone yang terdiri atas 6 poin dipenuhi oleh Pemerintah Inggris. Namun tuntutan yang diajukan oleh pihak Kerajaan Bone tidak dapat dipenuhi oleh pihak Pemerintah Inggris. Alasan penolakan itu disebutkan bahwa pihak Kerajaan Bone tidak membantu Inggris dalam mengambil alih kekuasaan di daerah ini. Karena itu Inggris merasa tidak perlu memberi hak-hak istimewa kepada Bone. Tidak sama seperti ketika Arung Palakka (Kerajaan Bone) membantu pihak VOC Belanda dalam memerangi Kerajaan Gowa. Arung Palakka sangat berjasa sehingga VOC-Belanda membe-rikan hak-hak istimewa sebagai balas jasa.

Atas penolakan itu, maka pada 6 Juni 1814, Mayor Jenderal Nightingale mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada raja Bone. Ultimatum itu memberikan kesempatan kepada raja Bone hingga pukul 12.00 malam untuk berpikir dan mengakui perbuatan-perbuatannya yang tidak sah selama ini. Ultimatum ini

tidak juga dihi-raukan oleh raja Bone. Oleh karena itu, pada 7 Juni 1814 sebe-lum fajar menyingsing Inggeris telah memulai serangannya terhadap perkampungan orang-orang Bugis di Bontoala, tempat kedudukan raja Bone. Istana raja Bone di Bontoala dibakar habis sehingga beliau dan pembesar-nya mengungsi.

Ketika beliau mengungsi, ia tidak membawa serta bendabenda *kalompoang* yang telah dikuasainya sejak lama, diambil oleh Arung Lompu kemudian menyerahkan kepada Pemerintah Inggeris di Makassar. Berikutnya Pe-merintah Inggeris mendesak *Dewan Bate Salapang* agar memilih dan mengangkat raja baru karena benda-benda *kalompoang* telah diambil kembali dari tangan raja Bone. Karena itu, akhirnya diangkatlah Mappatunru Karaeng Lembangparang sebagai raja Gowa ke-30. Pengangkatan raja Gowa ini sudah lebih berwibawa karena pengang-katannya disertai dengan benda-benda *kalompoang* teru-tama *sudanga*.

Di lain pihak, raja Bone dan pembesarnya yang telah mengungsi, dikejar oleh pasukan Sidenreng dan Soppeng karena bahwa yang bersangkutan telah berada di daerah Maros. Usaha ini tidak berhasil karena Bone mendapat bantuan tenaga dari sekutunya, yaitu Kerajaan Tanete dan Suppa. Sementara itu, Inggeris bersama pa-sukannya berusaha mengambil alih pelabuhan Parepare dari penguasaan Bone, selanjutnya untuk sementara diserahkan pengelolaannya kepada Datu Sidenreng La Wawo Sultan Ali yang merupakan sekutu setia Inggeris. Begitu juga daerah-daerah di *Noorder Provincie* yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Bone, yang di-perolehnya dari VOC dan menjadi hak-hak prerogatif Bone, juga diserang oleh pasukan Inggeris bersama se-kutunya. Sawah-sawah yang terdapat di daerah tersebut, juga diambil penguasaannya oleh pasukan Inggris dan selanjutnya dijual kepada umum atau dipinjam-pakai kepada

orang-orang Eropa dan orang-orang Gowa yang telah berjasa kepada Pemerintah Inggris.

Hingga menjelang masa akhir pemerintahan Inggris di Sulawesi Selatan, Inggris bersama sekutunya belum berhasil menyelesaikan sikap penentangan yang dilakukan oleh Kerajaan Bone, Tanete dan Suppa. Dan pada bulan Oktober 1815 Kapten Wood terpaksa harus meninggalkan Makassar karena harus digantikan oleh Mayor D.M. Dalton (1815-1816). Beberapa hari setelah memegang jabatan sebagai *Resident* Makassar, menyerang daerah wilayah utara yang merupakan wilayah pertahanan Kerajaan Tanete. Tetapi serangan ini pun tidak berhasil karena Tanete dan Bone tetap menguasai wilayah tersebut. Dan sejak Januari sampai Agustus 1815, Mayor Dalton mengerahkan kembali pasukannya untuk menyerang daerah *Noorder Provincie*. Serangan ini pun tidak berhasil sampai akhirnya Pemerintah Inggris ditarik dari Sulawesi Selatan pada 25 September 1816. Wilayah-wilayah yang menjadi taklukannya selama pemerintah-annya, kemudian harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Belanda.

Penyerahan daerah-daerah taklukkan Pemerintah Inggris di Sulawesi Selatan ke tangan Pemerintah Hindia Belanda menimbulkan gejolak keras di tubuh Kerajaan Bone. Sikap penentangan juga diperlihatkan oleh pihak Bone hampir sama ketika Pemerintah Inggris mengambil alih wilayah-wilayah koloni VOC-Belanda di daerah ini. Bahkan sikap penolakan itu nantinya lebih hebat daripada ketika Pemerintah Inggris berkuasa. Pihak Kerajaan Bone sebenarnya mungkin bisa menerima kehadiran kembali Pemerintah Belanda, asalkan pihak Belanda mau menerima tawaran yang diajukan oleh pihak Kerajaan Bone. Salah satu tawaran yang diajukan oleh pihak Kerajaan Bone adalah hak-hak prerogatif yang telah diberikan oleh VOC Belanda pasca

Perjanjian Bungaya kepada Bone pada masa Arung Palakka.

Tawaran yang diajukan oleh pihak Kerajaan Bone, sama juga dengan syarat atau tawaran yang diajukan ketika Pemerintah Inggris mulai berkuasa di daerah ini. Tawaran itu adalah bahwa pihak Kerajaan Bone meng-inginkan kembali hak-hak prerogatif yang telah diberikan oleh VOC-Belanda (C.J. Speelman). Salah satu hak-hak prerogatif itu adalah bahwa setiap raja-raja atau pembesar kerajaan di Sulawesi Selatan yang ingin menghadap kepada pembesar Belanda di Ford Rotterdam, harus seizin dan diantar oleh raja Bone.

Tuntutan pihak Kerajaan Gowa ternyata tidak disetujui oleh pihak Belanda dan menyatakan bahwa hal itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang. Bahkan pihak Pemerintah Belanda lebih jauh akan mengubah isi Perjanjian Bungaya 1667 yang kemudian dikenal dengan nama Pembaharuan Perjanjian Bungaya 1824. Sikap Pemerintah Belanda disikapi pula oleh Kerajaan Bone dengan menyatakan bahwa mulai saat ini kami keluar dan tidak akan terikat lagi dengan isi perjanjian Bungaya 1667. Dan kami akan menanggung segala resikonya, termasuk perang sampai titik darah yang penghabisan jika itu memang diperlukan.

Dalam proses perjalanan penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Bungaya 1667, beberapa kali pertemuan yang diselenggarakan antara Pemerintah Belanda dengan raja-raja sekutu di Sulawesi Selatan, ternyata raja Bone, raja Tanete, dan raja Suppa tidak pernah memenuhi undangan untuk hadir pada pertemuan itu. Oleh karena itu, Pemerintah Belanda menganggap ketidakhadiran raja-raja yang diundang pada pertemuan itu adalah karena dipropokatori oleh Raja Bone I Benni Arung Data. Raja Bone ini sejak awal diangkatnya menjadi raja tidak pernah mau bekerjasama dengan Belanda, begitu pula dengan raja-raja pendahulunya.

Setelah diadakan beberapakali negosiasi untuk menemukan titik temu, tetapi tidak pernah berhasil mencapai kesepakatan. Maka Belanda menganggap bahwa raja Bone dan sekutunya memang keras kepala sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal. Pemerintah Belanda lalu mempersiapkan satu pasukan besar yang didukung oleh beberapa kerajaan sekutu. Persiapan pasukan segera dilakukan dan akan mempergunakan segala kekuatan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan oleh Belanda mengingat bahwa Kerajaan Bone pada saat itu adalah satu kerajaan besar dan mempunyai pengaruh besar pada beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

Sebelum Belanda menggempur Kerajaan Bone dengan kekuatan penuh, maka terlebih dahulu Belanda menyerang kerajaan-kerajaan Sekutu Bone yang berada di wilayah Utara, yaitu Kerajaan Tanete (rajanya adalah La Patau), dan Kerajaan Suppa. Begitu juga kerajaan Sekutu yang berada di wilayah Selatan seperti; Bantaeng dan Bulukumba serta Sinjai yang merupakan pintu masuk ke Kerajaan Bone. Maksud penyerangan terhadap wilayah-wilayah ini adalah untuk memberikan sok terapi bagi Kerajaan Bone agar mau merubah sikapnya dan mau bekerja sama dengan Pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan.

Meskipun wilayah-wilayah itu sebagian telah diduduki oleh pasukan Belanda bersama sekutunya, namun Kerajaan Bone tidak pernah mau merubah sikapnya yang tidak mau kerjasama dengan Belanda. Oleh karena itu pasukan segera diberangkatkan menuju pelabuhan BajoE, dari sini pasukan akan menuju ibukota kerajaan. Setelah pasukan Bone yang menjaga pesisir pantai BajoE dapat dikalahkan dan kuasai, selanjutnya pasukan Belanda bersama sekutunya menyerbu masuk ke ibukota kerajaan. Belanda sangat kecewa ketika menginjakkan kaki di ibukota kerajaan karena kota tersebut sudah dikosongkan.

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

Kenyataan itu membuat pimpinan pasukan Belanda murka sehingga sekutu-sekutunya merasa kecewa, lalu atas persetujuan pimpinan pasukan Belanda, mereka lalu membakar kotaraja rata dengan tanah. Hasil akhir perang ini (agresi militer Belanda 1824) ke Tana Bone tidak membawa hasil karena tidak dapat memaksa raja Kerajaan Bone untuk tunduk dan menandatangani pembaharuan Perjanjian Bungaya 1824. Raja Bone dan para pembesarnya berhasil mengungsi ke daerah pedalaman sebelum pasukan Belanda masuk ke ibukota kerajaan sehingga antara keduanya tidak pernah bertemu.

Akhirnya penyerangan Kerajaan Bone pada agresi militer 1824 dianggap gagal total sehingga penyelesaian antara kedua pihak tidak tercapai. Dan pada waktu yang bersamaan, Pemerintah Belanda di Batavia juga mengalami perang dengan Pangerang Diponegoro (perang Jawa) 1825-1835, sehingga pasukan yang ada di Sulawesi Selatan juga dibutuhkan karena tenaga yang ada di Batavia kurang memadai. Oleh karena itu, Belanda segera meninggalkan Bone menuju Makassar dalam dua jurusan yaitu satu melalui jalur darat lewat Maros dan satu lagi melalui jalur laut. Mereka tiba di Makassar pada tanggal 22 April 1825 setelah mengalami perjalanan kurang lebih 24 hari lamanya.

Kegagalan agresi ini sehingga menyebabkan tidak adanya penyelesaian yang menghasilkan keputusan politik. Belanda tidak berhasil memaksakan kehendaknya agar Bone dapat mematuhi isi dari Perjanjian Bungaya yang sudah diperbaharui pada tahun 1825. Karena kegagalan ini pula menyebabkan hubungan Belanda dan Kerajaan Bone semakin renggang. Sepeninggal pasukan Belanda dan sekutunya, maka raja Bone beserta pembesarnya kembali ke Watampone.

Setelah Belanda meninggalkan Kerajaan Bone, raja beserta seluruh pembesar kerajaan segera membangun kembali kerajaannya.

Tetapi hal ini sudah sangat terlambat karena di dalam tubuh kerajaan muncul konflik di antara para bangsawan terkait sikap mereka terhadap Belanda. Kedua kelompok ini berbeda pandangan dan sikap, satu menginginkan kerjasama dengan Belanda dan satu lagi tetap menolak kerjasama. Kelompok yang menolak kerjasama dipimpin oleh raja Bone dan Arung Lompu serta sebagian pembesar dan *punggawa*, sedang kelompok yang mau kerjasama dipimpin oleh *Tomarilaleng* Arung Sinre. Pandangan kelompok kedua ini menganggap bahwa Kerajaan Bone pasti hancur kalau tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Itulah sebabnya sehingga Arung Sinre meninggalkan Bone dan pergi menetap di Makassar karena merasa gagal untuk mempengaruhi Raja Bone I Benni Arung Data agar mau bekerjasama dengan Belanda.

Sementara itu, kedua kelompok ini mulai memperlihatkan kekuatannya ketika I Benni Arung Data meninggal dunia dan digantikan oleh saudaranya yang bernama La Mappasiling Arung Panyili. Raja ini pada masa awal pemerintahannya agak sulit untuk menentukan kebijakan, terutama terhadap dua kelompok yang berbeda pandangan itu. Kelompok pertama ini sejak meninggalnya I Benni Arung Data, mulai menurun pengaruhnya, sebaliknya kelompok kedua dapat menekan raja dengan kuatnya. Itulah sebabnya sehingga pada tahun 1836, raja yang baru ini dengan terpaksa memulihkan kembali kedudukan *Tomarilaleng*.

Kembali *Tomarilaleng* Bone pada kedudukannya yang semula, sedikit demi sedikit dapat mempengaruhi raja Bone Arung Panyili agar mau membuka perundingan-perundingan dengan Pemerintah Belanda. Akhirnya pada tahun 1837 perundingan dilakukan dan berhasil mengadakan perdamaian dalam tahun 1838. Perdamaian ini berhasil meredakan untuk sementara hubungan Bone dengan Belanda, sebab salah satu isi perjanjian

perdamaian itu adalah dengan dicantumkan hak-hak istimewa yang didapatkan dari VOC, salah satunya adalah bahwa wakil dari Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa yang tertua dalam pemerintahan akan mendapatkan kedudukan yang istimewa.

Semakin kuatnya kedudukan *tomarilaleng* membuat suhu politik dalam tubuh Kerajaan Bone semakin meruncing. Kelompok yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda melakukan kudeta pada tahun 1844 terhadap kedudukan *Tomarilaleng*. Akhirnya beliau melarikan diri bersama putera mahkota Arung Palakka dan minta perlindungan di daerah Maros dan Barru. Dan ketika Raja Bone Arung Panyili meninggal dunia pada 1845, maka yang menggantikan beliau adalah salah seorang kemanakannya yang bernama La Parenrengi Arumpugi. Pengangkatan beliau tidak disetujui oleh pihak kelompok kedua karena menganggap bahwa yang berhak atas kedudukan raja di Bone adalah Arung Palakka.

Pergantian raja baru itu tidak menyelesaikan pertikaian yang ada, bahkan ada indikasi bahwa kelompok kedua tersebut ingin menjatuhkan raja yang baru dilantik itu. Tetapi yang pasti bahwa pada awal pemerintahannya, hubungan Bone dengan Belanda berjalan agak damai. Namun pada tahun-tahun berikutnya, hubungan itu mulai menemui banyak hambatan. Hal itu terutama dipicu oleh adanya pertentangan dua kelompok yang berbeda sikap dan pandangan terhadap Belanda. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Zainal.1999. *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*.Makassar :Hasanuddin University Press
- Abduh, Muhammad,dkk. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, IDSN
- Amiruddin. 1995. *Menelusuri Perjuangan I Manneng Arung Data Raja Bone Ke-25 Sebagai Pahlawan Tanah Air*. Ujung Pandang: BPSNT
- Asba, A.Rasyid. 2010. *Gerakan Sosial di Tanah Bugis; Raja Tanete La Patau Menentang Belanda*. Jogyakarta :Ombak
- Amir, Andi Muhammad. 1986. *Bone Selayang Pandang*. Watampone : Damai
- Andaya, Leonard. 1981.*Warisan ArungPalakka, (The Heritage of ArungPalakka, A History Of South Celebes, in the Seventeenth Century)*. The Hague :MartinusNihoff
- Anonim. 1854. *Bijdragen Tot De Geschiedenis van Celebes, dalam: Tijdschrift Voor Nederlandsh, Jilid II*
- Asmad Riady Lamallongeng, A. Jamaluddin.2007. *Catatan Harian Raja-Raja Bone*. Makassar : La Macca Press
- Brahmasari, Ida Ayu.2007. *Buku Panduan Penyusunan Thesis*.Untag. Surabaya: Universitas Tujuh Belas Agustus 1945.

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

- Dg.Patuntu, Abd. Razak. 1969.*Sejarah Gowa*. Ujung Pandang :YayasanKebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Daeng Patunru, Abd. Razak. 1987. *Sejarah Wajo*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Daeng Patunru, Abd. Razak. 1989.*Sejarah Bone*. Ujung Pandang :YayasanKebudayaan
- Poelinggomang, Edward,L.dkk. 2004, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I dan II*.Makassar :BadanPenelitiandanPengembangan Daerah (Balitbangda)
- Poelinggomang, Edward,L.2005. *Sejarah Tanete*. Barru : Pemerintah Kabupaten Barru
- Gising, Basrah. 2002. *Sejarah Kerajaan Tanete*. Makassar: Samajaya
- Hamid, Abu, dkk. 2002. *Sejarah daerah Sinjai*. Sinjai : Yayasan Kebudayaan Pustaka Sinjai
- Hamid, Abu,dkk.2007. *Sejarah Bone*, Watampone: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan Tenggara
- Kila, Syahrir. 1986. *Gerakan Repatriasi Syekh Yusuf Ke Tanah Makassar*. Ujung Pandang: Skrip-si Sarjana Jurusan Sejarah dan Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin
- Limbugau, Daud. 1985. *Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874*. Jogyakarta : Tesis pada Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada
- M.C.Ricklefs. 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* Jakarta : Serambi
- Mattulada. 1998.*Sejarah, Masyarakat, danKebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar : Hasanuddin University Press

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

- Mappangara, Suriadi. 2003. *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Paeni, Mukhlis. Dkk. 1985. *Batara Gowa, Messianisme Gerakan Sosial di Makassar*. Jogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Palloge, Andi. 1990. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Watampone : Yayasan Al'Muallim
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : Pemda Tk.I Provinsi Sulawesi Selatan.
- Qahhar, Abdul. 2010. *Arung Palakka Datu Tungke'na Tanah Bone*. Watampone : Yayasan Al' Muallim
- Rasyid, Darwas. 1994. *Latenritatta Aru Palakka Dalam Konteks Sejarah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: BKSNT.
- Shahib, Muh. Reom. 1980. *Bone Kartu Mati Bagi Perkembangan Perjuangan Merah Putih di Sulawesi Selatan Pada Tahun 45-50*. Ujung Pandang : Skripsi Unhas
- Sagimun, M.D. 1986. *Sultan Hasanuddin Menentang VOC*. Jakarta: Depdikbud
- Syarifuddin, Amir. 1989. *Perjanjian Antar Kerajaan Menurut Lontarak; Mengungkap Salah satu Aspek Dalam Sejarah Hukum Internasional Adat Abad XV-XVIII di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Walinono, Hasan. 1979. *Tanete; Suatu Studi Sosiologi Politik*. Ujung Pandang: Disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

syahrir kila

KETEGUHAN DALAM MENEGAKKAN SIRI'

Kajian Perjuangan
I Benni Arung Duta Melawan Belanda

Editor
Edward L. Poelinggomang

de la macca

Jl. Borong Raya No. 75 A
Telp. 0411-2410294 - 0811 468 957
Email: gunmonoharto@yahoo.com

GERBANG KECERDASAN
MENUJU PERADABAN
YANG LEBIH BAIK

ISBN 978-979-3897-60-8



9 789793 897608